RENCANA STRATEGIS 2025-2029

PEMERINTAH KOTA CILEGON

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat strategi dan kebijakan di bidang industri dan perdagangan, berdasarkan isu strategis, masukan pemangku kepentingan, dan kebijakan nasional. Dalam kerangka mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, Pemerintah Kota Cilegon menempatkan sektor industri dan perdagangan sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah. Kota Cilegon dikenal luas sebagai kawasan industri strategis di Provinsi Banten, dengan dominasi industri baja, kimia, petrokimia, serta potensi logistik yang besar berkat kedekatannya dengan Pelabuhan Merak dan jalur utama lintas Jawa-Sumatera. Hal ini menjadikan Cilegon memiliki kontribusi signifikan dalam memperkuat struktur industri nasional melalui keberadaan kawasan industri modern yang terus berkembang.

Sejalan dengan karakteristik tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon (Disperindag) memegang peran strategis sebagai penggerak utama pembangunan sektor industri lokal, sekaligus fasilitator pemberdayaan IKM agar mampu naik kelas dan menjadi penopang ekonomi kerakyatan. Melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, peningkatan mutu produk, sertifikasi, hingga fasilitasi akses pasar digital dan ekspor, Disperindag mendorong terciptanya wirausaha baru yang dapat memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Kota Cilegon. Selain itu, Disperindag Kota Cilegon juga memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok (bapokting) melalui pemantauan rutin di Pasar Rakyat dan ritel modern, penyelenggaraan operasi pasar, serta pemutakhiran data harga harian. Upaya ini menjadi bagian integral dalam mendukung ketahanan pangan dan daya beli masyarakat.

Transformasi pelayanan publik terus diperkuat melalui digitalisasi layanan perizinan usaha berbasis OSS, integrasi data pelaku IKM, serta pengembangan sistem monitoring harga dan stok bapokting secara daring. Langkah ini sekaligus menjadi wujud implementasi reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis program prioritas.

Seluruh program, kegiatan, dan kebijakan Disperindag Kota Cilegon diarahkan agar selaras dengan prioritas pembangunan nasional namun tetap berlandaskan pada kebutuhan, potensi, dan kondisi spesifik Kota Cilegon. Harapannya, melalui sinergi antara penguatan industri, pemberdayaan IKM, stabilitas perdagangan, serta pelayanan publik yang modern, akan tercipta pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Kota Cilegon.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA CILEGON



ANDRIYANTI, SE., MM
NIP. 19760701 200701 2 012


RPJPN 2025-2045
Visi Indonesia Emas 2045
Transformasi Ekonomi
Peran Disperindag Cilegon
1. Penguatan IKM
3. Peningkatan Ekspor dan Hilirisasi
4. Digitalisasi Perdagangan dan Pasar
5. Penguatan SDM Industri Lokal

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **1**

DAFTAR ISI **3**

BAB I
PENDAHULUAN **6**

1.1 Latar Belakang 6

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 12

1.3 Maksud dan Tujuan 14

1.4 Sistematika Penulisan 16

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH **17**

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 17

2.1.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Perangkat Daerah 17

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 48

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 50

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 64

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 66

2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 70

2.3 Isu Strategis 74

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN **77**

3.1 Tujuan 77

3.2 Sasaran 81

3.2.1 Terwujudnya Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang Akuntabel dan Profesional 81

3.2.2 Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan 82

3.2.3 Meningkatnya Daya Saing Sektor Perindustrian 83

3.3 Strategi 86

3.3.1. Meningkatkan tata Kelola organisasi melalui perencanaan, penganggaran dan pelaporan berbasis kinerja yang terintegrasi dengan SPBE dan e-sakip 86

3.3.2. Mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk efisiensi pelayanan 86

3.3.3. Penguatan daya saing perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan 86

3.3.4. Transformasi IKM menuju naik kelas dan berdaya saing 87

3.4. Arah Kebijakan Strategis 88

3.4.1 Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 88

3.4.2 Pentahapan Renstra 2025-2029 92

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 98

4.1 Program 98

4.2 Kegiatan 98

4.3 Sub Kegiatan 98

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah 136

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) Disperindag 143

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK) 145

BAB V

PENUTUP 147

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Uraian Tugas dan Manajerial Disperindag Kota Cilegon	48
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status dan Unit Kerja	48
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan	49
Tabel 2.4 Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	49
Tabel 2.5 Jumlah Aset Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon Per 31 Desember 2024	49
Tabel 2.6 Pertumbuhan IKM Tahun 2021-2024	51
Tabel 2.7 Data/ Profil Pasar yang telah terbangun di Kota Cilegon	52
Tabel 2.8 Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	54
Tabel 2.9 Pedagang Pasar dan Pedagang Kaki Lima (PKL)	54
Tabel 2.10 Keterisian Kios, Los, Awning dan Pelataran	54
Tabel 2.11 Capaian Presentase Terpenuhinya alat standar kemetrologian	55
Tabel 2.12 Evaluasi Renstra Tahun 2021 – 2026	58
Tabel 2.12.1 Evaluasi Kinerja Renstra 2021-2026	60
Tabel 2.12.2 Evaluasi Realisasi Anggaran 2021-2026	62
Tabel 2.13 Mitra Kerja Disperindag	67
Tabel 2.14 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran	71
Tabel 2.15 Isu Strategis Perangkat Daerah	77
Tabel 3.1: Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	85
Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	91
Tabel 3.3 Penahapan Renstra PD	97
Tabel 4.1 Program / Kegiatan / Subkegiatan	101
Tabel 4.2 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Disperindag Kota Cilegon	116
Tabel 4.3 Program Prioritas Daerah	141
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra Pd Pemerintah Kota Cilegon	144
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kota Cilegon	146

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peran Disperindag dalam RPJPN 2025-2029	10
Gambar 1.2 Diagram infografis keterkaitan RPJMD Banten 2025-2029 dan Disperindag Cilegon	11
Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Pada Disperindag Kota Cilegon	18
Gambar 2.2 Realisasi Retribusi Daerah	51
Gambar 2.3 Ringkasan Renstra Disperindag Kota Cilegon	57
Gambar 2.4 Mind Map Tren Anggaran dan Realisasi	64
Gambar 2.5 Tren Anggaran dan Realisasi Per Program	74
Gambar 2.6 Analisis Keterhubungan dengan Renstra Disperindag Kota Cilegon 2025-2029	77
Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah	78
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan	82
Gambar 3.3 Mind Map Renstra Disperindag Kota Cilegon	85

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sehaluan Visi Strategis Pemerintahan Prabowo - Gibran untuk mengarahkan Indonesia mencapai Indonesia Emas 2045, fokus utama pembangunan adalah keluar dari *middle income trap* melalui pertumbuhan ekonomi 6% per tahun. Disambung dengan Mewujudkan Ekonomi Pancasila, yaitu kombinasi antara pasar bebas dan keadilan sosial. Sepuluh Fokus Kebijakan Nasional: mencakup industrialisasi, ketahanan pangan-energi-air, pengentasan kemiskinan, hingga transformasi keuangan dan reformasi birokrasi. Keterkaitan logika pembangunan tersebut dengan fungsi kedinasan teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangann (Disperindag) Kota Cilegon di tingkat daerah, dilihat dari posisi vital Disperindag dalam mengimplementasikan transformasi tersebut secara lokal. Hubungan strategis pertama dapat dilihat dari karakteristik Cilegon sebagai Kota Industri.

Peran Disperindag Cilegon krusial dalam mendukung hilirisasi industri, pemanfaatan potensi logistik, serta pengembangan IKM berorientasi ekspor. Sejalan dengan visi RPJMD, strategi Disperindag menitikberatkan pada penguatan sektor industri kecil-menengah (IKM), perbaikan infrastruktur Pasar Rakyat, dan penjaminan stabilitas harga bahan pokok. Program prioritas lima tahun ke depan mencakup revitalisasi pasar rakyat, stabilisasi harga barang pokok, pengembangan pusat industri kreatif dan kawasan perdagangan, penguatan produk IKM, serta optimalisasi metrologi legal dan perizinan distribusi. Semua program ini dilaksanakan dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Disperindag sesuai ketentuan daerah, untuk memperkuat kinerja ekonomi lokal secara inklusif dan berkelanjutan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Termasuk Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, mengamanatkan setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana strategis perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan resmi daerah pada tingkat Perangkat Daerah yang memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah serta pembangunan daerah secara umum dalam jangka waktu 5 tahun.

Rencana strategis perangkat daerah memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyenggaraan pembangunan daerah antara lain sebagai:

a. Pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi, memastikan semua kegiatan yang dilakukan selaras dengan tujuan pembangunan daerah.
b. Penjabaran RPJMD, membantu menerjemahkan visi dan misi RPJMD ke dalam program dan kegiatan yang konkret.
c. Koordinasi dan sinkronisasi, mencegah program dan kegiatan antar perangkat daerah tumpang tindih sehingga fokus pada tujuan yang sama.
d. Pengukuran kinerja, indikator kinerja yang jelas memungkinkan pemerintah daerah mengukur kemajuan dan keberhasilan program dan kegiatan pembangunan.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan dimulai dari pembentukan Tim Renstra Disperindag yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon. Tim penyusun terdiri dari unsur Bidang Perdagangan, Perindustrian, Metrologi, dan Sekretariat. Secara umum proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi:

a. Persiapan Penyusunan Renstra, Dimulai dari pembentukan Tim Penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra dan penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra.
b. Pengumpulan data dan informasi, seperti RPJMD, kondisi dan potensi daerah, hasil evaluasi kinerja sebelumnya dan aspirasi masyarakat.

c. Pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan kebutuhan data dari laporan hasil analisis, resume/notulen- notulen rapat, bahan paparan, hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan.

d. Perumusan Rancangan Renstra, yaitu menganalisis gambaran pelayanan, perumusan isu- isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga perumusan outcome.

e. Penyajian dan Penyampaian Rancangan Renstra;

f. Perumusan rancangan akhir Renstra;

g. Penyusunan dokumen Renstra;

h. Penetapan Renstra.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan disusun dengan berpedoman pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon 2025-2029 dan mengacu pada Renstra Kementerian dan Lembaga yang terkait, antara lain:

a. Kementerian Perindustrian;

b. Kementerian Perdagangan; dan

c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon 2025-2029 dipergunakan sebagai acuan perencanaan operasional kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja. Penyusunan Anggaran berdasar Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) guna mendukung operasional kegiatan yang telah disusun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon.

'Strategi Transformasi Bangsa 2045' memberikan kerangka makro nasional yang menuntut pelaksanaan konkret di daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon adalah aktor penting dalam mendekatkan visi nasional dan RPJMD Provinsi Banten dengan realitas lokal. Dimana peran strategis Disperindag Cilegon:

1) Motor penggerak industrialisasi lokal.

2) Fasilitator pemberdayaan IKM.

3) Penjaga stabilitas perdagangan barang kebutuhan pokok.

4) Pemimpin digitalisasi sektor perdagangan dan perindustrian.

5) Penghubung antara ekonomi kerakyatan dengan pertumbuhan nasional.

1.1.1. Koneksi Revisi Renstra 2025 – 2029 Disperindag Kota Cilegon dengan sasaran RPJPN:

RPJPN memiliki 5 Sasaran Visi, antara lain:

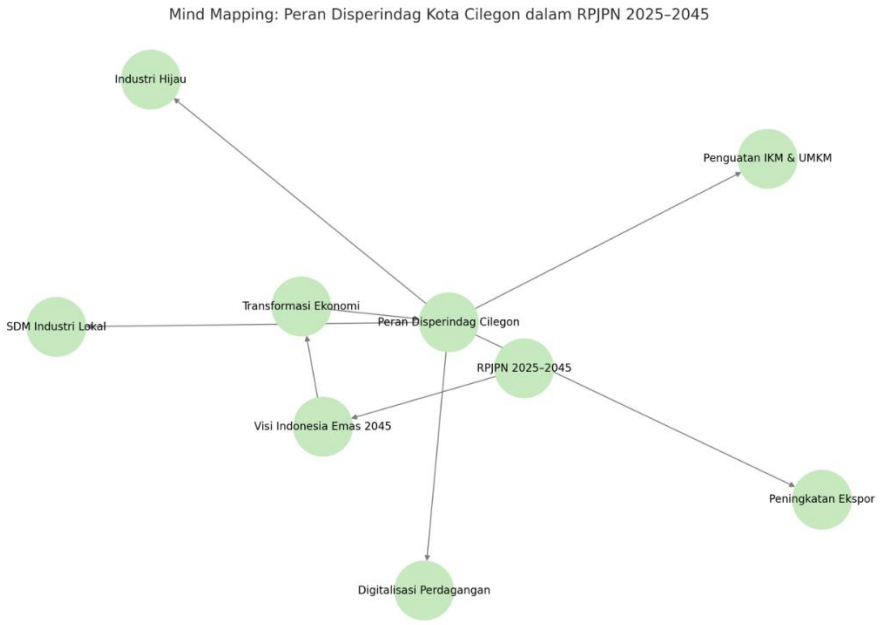
1. Pendapatan per kapita setara negara maju
2. Daya saing SDM meningkat
3. Emisi gas rumah kaca menurun

Peran Disperindag Cilegon signifikan dalam meningkatkan nilai tambah industri dengan mendorong hilirisasi dan efisiensi proses industri. Pelatihan dan sertifikasi SDM sektor industri untuk mendongkrak daya saing tenaga kerja lokal. Mendorong industri hijau dan ramah lingkungan, sejalan dengan komitmen nasional menuju *net zero emission*. Oleh sebab itu diperlukan penguatan kelembagaan dan keterpaduan kebijakan daerah. Dalam Pasal 10 RPJPN disebutkan bahwa RPJP Daerah harus selaras dengan RPJP Nasional, termasuk dalam arah kebijakan, tujuan, dan indikator pencapaian . Implikasi perihal ini bagi Revisi Renstra 2025 – 2029 Disperindag Kota Cilegon adalah:

1. Melibatkan data dan indikator kinerja sesuai yang ditetapkan pusat.
2. Menjalin sinergi lintas OPD dan sektor industri untuk menciptakan dampak konkret pada masyarakat. RPJPN juga menyerap nilai-nilai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), misalnya:
   a. Goal 8: Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonom;
   b. Goal 9: Industri, inovasi, dan infrastruktur;
   c. Goal 12: Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon merupakan motor lokal untuk mendukung capaian target nasional, khususnya dalam:

1. Mentransformasikan struktur ekonomi berbasis industri
2. Mengembangkan ekosistem perdagangan modern dan digital
3. Meningkatkan kapasitas SDM dan pelaku usaha
4. Menumbuhkan industri hijau yang mendukung keberlanjutan



Gambar 1. 1 Mind Maping peran Disperindag dalam RPJPN 2025-2045

Berdasarkan analisis Dokumen Rancangan Awal RPJMD 2025–2029 Provinsi Banten, Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon mengutama dari sisi arah kebijakan dan capaian kinerja di sektor industri dan perdagangan:

1. Kinerja dan Peran Strategis Industri dan Perdagangan

   Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Banten pada tahun 2024 mencapai 30,33%, dengan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) industri yang sempat mencapai 4,93% pada 2021 . Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 12,38%, dengan pertumbuhan positif setelah sempat terkontraksi. Kota Cilegon sebagai pusat industri besar (khususnya sektor baja dan petrokimia), menjadi bagian penting dalam menyumbang angka tersebut, dan ini perlu dijadikan acuan dalam merumuskan target kinerja sektoral oleh Disperindag Cilegon.

2. Arah Kebijakan Strategis

   RPJMD menggarisbawahi pentingnya peningkatan daya saing sektor industri dengan mendorong efisiensi produksi dan distribusi. Penguatan daya saing perdagangan melalui peningkatan kualitas produk dan perluasan akses pasar. Hal ini selaras dengan tugas strategis Disperindag Kota Cilegon untuk:

   a) Mendorong modernisasi industri (khususnya sektor padat karya),

   b) Menyediakan fasilitasi ekspor-impor bagi pelaku usaha lokal,

   c) Memperkuat peran Pasar Rakyat dan logistik sebagai jaringan distribusi utama.

3. Prioritas Pembangunan Ekonomi Daerah

RPJMD menetapkan bahwa pembangunan ekonomi inklusif harus dilakukan melalui:

a) Insentif investasi, terutama di sektor industri strategis,

b) Transformasi ekonomi digital dan ekonomi kreatif,

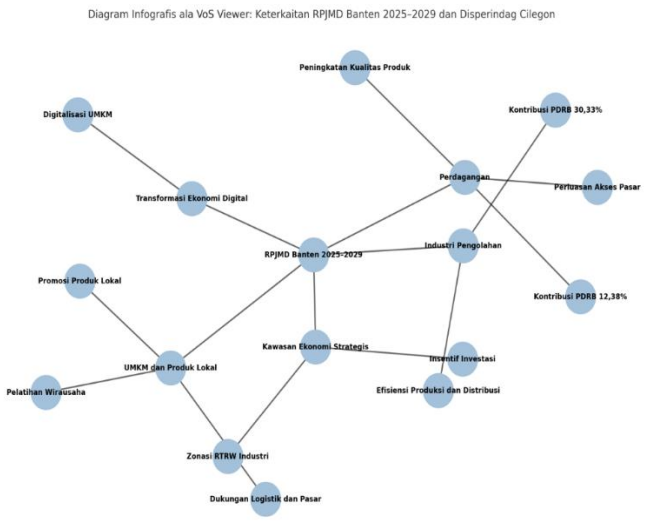
c) Penguatan IKM dan produk lokal sebagai basis ekonomi kerakyatan .

Rencana strategis Disperindag Cilegon 2025-2029 perlu menyesuaikan arahan strategis di atas dengan meningkatkan pelatihan wirausaha baru dan tenaga kerja industri, membuka ruang promosi dan digitalisasi produk IKM, menyediakan regulasi atau insentif yang mendukung iklim usaha kompetitif.

4. Program Prioritas Daerah

RPJMD menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur industri dan logistik, Pengembangan kawasan ekonomi strategis dan optimalisasi kawasan industri dalam RTRW sebagai bagian dari intervensi pembangunan prioritas .

RPJMD Banten 2025–2029 menyajikan arah strategis yang sangat relevan untuk diselaraskan dengan rencana strategis Disperindag Kota Cilegon. Fokus utama berada pada peningkatan daya saing industri, perluasan pasar perdagangan, insentif investasi, serta digitalisasi ekonomi lokal. Integrasi antara RPJMD provinsi dan rencana sektoral kota adalah kunci agar strategi pembangunan industri dan perdagangan Cilegon lebih terarah dan kontributif bagi pertumbuhan ekonomi regional.



Gambar 1.2 Diagram infografis keterkaitan RPJMD Banten 2025-2029 dan Disperindag Cilegon

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 99);

13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 123);
14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 127);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan sekaligus Pedoman/acuan secara umum dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan Tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon.

Revisi Renstra ini disusun dengan maksud merumuskan arah kebijakan dan strategi teknis Disperindag periode 2025–2029 agar selaras dengan visi/misi daerah dan RPJMD Cilegon. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi program unggulan serta indikator kinerja yang konkret sesuai dengan tupoksi Disperindag.

Secara operasional, Renstra bertujuan memperkuat perencanaan bidang industri dan perdagangan, meningkatkan efisiensi pelayanan publik (misalnya perizinan dan monitoring harga), serta mendorong peningkatan daya saing IKM dan pasokan barang pokok murah dan merata. Hasil yang diharapkan adalah tercapainya arah pembangunan industri-perdagangan yang praktis dan implementatif, sekaligus tidak melampaui kewenangan Disperindag sebagaimana diatur regulasi daerah. Tujuan Penyusunan Revisi Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. **Menjadi pedoman utama** dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan penganggaran tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon secara konsisten, terarah, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah,

2. **Menyediakan dasar pengukuran kinerja organisasi**, yang dapat digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk menilai capaian kinerja serta sebagai dasar akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan,
3. **Mengarahkan seluruh aparatur** di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon dalam berpikir, bersikap, dan bertindak secara selaras demi pencapaian tujuan strategis organisasi,
4. **Menjadi acuan dalam merancang mekanisme evaluasi kinerja**, menyusun indikator keberhasilan, serta memastikan seluruh rencana kerja mengacu pada hasil yang dapat diukur secara obyektif dan berkelanjutan,
5. **Berperan sebagai kompas strategis** dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon. Renstra ini juga menjadi alat kendali perubahan melalui evaluasi berkelanjutan dan inovasi kebijakan yang responsif terhadap dinamika pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Revisi Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta, sistematika penulisan Dokumen Rencana Strategis (Renstra).

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Gambaran pelayanan dimana di dalamnya data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan, Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan, Data dan informasi, Penyajian tugas dan fungsi OPD. Mengidentifikasi permasalahan, Ringkasan permasalahan, Mengidentifikasi isu strategis, Merumuskan isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini paling sedikit memuat: Menyajikan Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida Kota Cilegon. Selain itu, Bab ini juga memuat Strategi, Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Disperindag Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan indikator dan target pagu indikatif, Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kota Cilegon tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja utama (IKU) dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Perangkat Daerah

A. Tugas Dan Fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Cilegon

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan dan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Daerah sebagai berikut :

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan Urusan Pemerintahaan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah;
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada tugas membantu walikota dengan menjalankan fungsi:
    a. perencanaan dan pembangunan industri;
    b. pengendalian izin usaha industri;
    c. pengelolaan sistem informasi industri nasional;
    d. perizinan dan pendaftaran perusahaan;
    e. pengembangan ekspor;
    f. peningkatan sarana distribusi perdagangan;
    g. stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan
    h. barang penting;
    i. standardisasi dan perlindungan konsumen;
    j. penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
    k. pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota; dan
    l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Susunan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon:

a. Kepala Dinas;

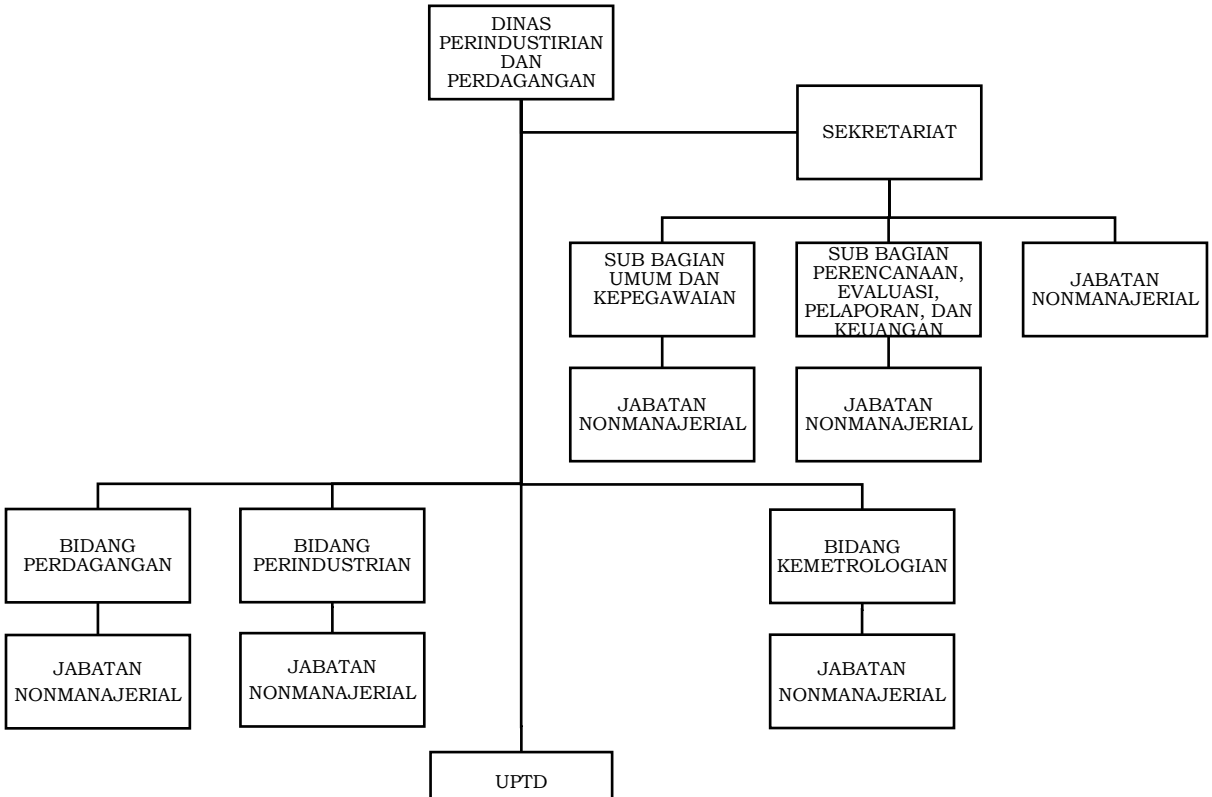
1) Sekretariat, membawahkan :
   a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
   c) Jabatan Nonmanajerial;
2) Bidang Perdagangan, membawahkan jabatan non manajerial;
3) Bidang Perindustrian, membawahkan jabatan non manajerial; dan
4) Bidang Kemetrologian, membawahkan jabatan non manajerial;

Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon terdapat 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar bertugas melaksanakan kegiatan pengelolaan Pasar Rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pasar Rakyat.

Saat ini, terdapat 3 UPTD Pasar di bawah koordinasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu :

a. UPTD Pasar Kranggot;
b. UPTD Pasar Blok F; dan
c. UPTD Pasar Merak.

B. **STRUKTUR ORGANISASI**



Gambar 2 1 Bagan Susunan Organisasi Pada Disperindag Kota Cilegob

C. URAIAN TUGAS DAN MANAJERIAL DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA CILEGON

Tabel 2.1 Uraian Tugas dan Manajerial Disperindag Kota Cilegon

No	Nama Jabatan Manajerial	Uraian Tugas		Kinerja	Indikator	Satuan
1	Kepala Dinas	1	Merumuskan penyelenggaraan:			
		1.1	Program pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;	Terlaksananya program pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Capaian program pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya
		1.2	Program pengembangan ekspor;	Terlaksananya program pengembangan ekspor	Capaian program pengembangan ekspor	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya
		1.3	Program pengendalian Izin Usaha Industri;	Terlaksananya program pengendalian Izin Usaha Industri	Capaian program pengendalian Izin Usaha Industri	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya
		1.4	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;	Terlaksananya program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Capaian program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya
		1.5	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan;	Terlaksananya program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Capaian program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya
		1.6	Program perencanaan dan pembangunan industri;	Terlaksananya program perencanaan dan pembangunan industri	Capaian program perencanaan dan pembangunan industri	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya
		1.7	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan;	Terlaksananya program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Capaian program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya
		1.8	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;	Terlaksananya program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Capaian program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya
		1.9	Program standardisasi dan perlindungan konsumen; dan/atau	Terlaksananya program standardisasi dan perlindungan konsumen	Capaian program standardisasi dan perlindungan konsumen	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya
		1.10	Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Capaian program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya

No	Nama Jabatan Manajerial	Uraian Tugas		Kinerja	Indikator	Satuan
		2	Dalam merumuskan penyelenggaraan tersebut di atas, setiap perumusan dilaksanakan melalui pentahapan sebagai berikut:			
		2.1	Menetapkan rencana kerja berdasarkan rencana strategis perangkat daerah	Penetapan rencana kerja berdasarkan rencana strategis perangkat daerah	Jumlah dokumen rencana kerja berdasarkan rencana strategis perangkat daerah	Dokumen
		2.2	Menetapkan hasil dialog kinerja dalam menentukan strategi perumusan pencapaian kinerja melalui penerapan sistem kerja;	Penetapan hasil dialog kinerja dalam menentukan strategi perumusan pencapaian kinerja melalui penerapan sistem kerja	Jumlah dokumen penetapan hasil dialog kinerja dalam menentukan strategi perumusan pencapaian kinerja melalui penerapan sistem kerja	Dokumen
		2.3	Mengoordinasikan pelaksanaan tugas secara kolaboratif dan sinergi secara internal dan eksternal perangkat daerah;	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas secara kolaboratif dan sinergi di lingkup unit kerjanya	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan tugas secara kolaboratif dan sinergi di lingkup unit kerjanya	Kegiatan
		2.4	Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas di lingkungan Unit Organisasi sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan, serta ketentuan yang berlaku;	Terlaksananya pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di lingkungan Unit Organisasi sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan, serta ketentuan yang berlaku	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di lingkungan Unit Organisasi sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan, serta ketentuan yang berlaku	Kegiatan
		2.5	Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan aktivitas yang dijalankan;	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan aktivitas yang dijalankan	Jumlah kegiatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan aktivitas yang dijalankan	Kegiatan
		2.6	Melaksanakan penilaian kinerja pegawai; dan	Terlaksananya penilaian kinerja pegawai	Jumlah pegawai yang dinilai kinerjanya	Orang
		2.7	Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung	Tersusun dan tersampaikannya laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung	Dokumen
		3	Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi bersama, termasuk akuntabilitas kinerja serta aspek	Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi bersama, termasuk akuntabilitas kinerja serta aspek	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi bersama, termasuk	Kegiatan

No	Nama Jabatan Manajerial	Uraian Tugas		Kinerja	Indikator	Satuan
			kelembagaan dan tata laksana pada lingkup Unit Organisasi	kelembagaan dan tata laksana pada lingkup Unit Organisasi	akuntabilitas kinerja serta aspek kelembagaan dan tata laksana pada lingkup Unit Organisasi	
		4	Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif serta tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan	Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif serta tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif serta tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan	Kegiatan
		5	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kegiatan
2	Sekretaris	1	Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas:			
		1.1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Capaian pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya
		1.2	Administrasi keuangan perangkat daerah;	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Capaian pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya
		1.3	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Capaian pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya
		1.4	Administrasi kepegawaian perangkat daerah;	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Capaian pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya
		1.5	Administrasi umum perangkat daerah;	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya
		1.6	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Capaian pelaksanaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya
		1.7	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;	Tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Capaian pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya

No	Nama Jabatan Manajerial	Uraian Tugas		Kinerja	Indikator	Satuan
					daerah	
		1.8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah; dan/atau	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Capaian pelaksanaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya
		1.9	Koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang	Capaian pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya
		2	Untuk menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas, setiap aktivitas dilaksanakan melalui pentahapan sebagai berikut:			
		2.1	Menyusun rencana kerja berdasarkan skala prioritas aktivitas yang ditetapkan;	Tersusunnya rencana kerja berdasarkan skala prioritas aktivitas yang ditetapkan	Jumlah dokumen rencana kerja berdasarkan skala prioritas aktivitas yang ditetapkan	Dokumen
		2.2	Melaksanakan dialog kinerja dalam menentukan strategi pelaksanaan setiap aktivitas melalui penerapan sistem kerja;	Terlaksananya dialog kinerja dalam menentukan strategi pelaksanaan setiap aktivitas melalui penerapan sistem kerja	Jumlah kegiatan dialog kinerja dalam menentukan strategi pelaksanaan setiap aktivitas melalui penerapan sistem kerja	Kegiatan
		2.3	Mengoordinasikan pelaksanaan tugas secara kolaboratif dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait;	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas secara kolaboratif dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan tugas secara kolaboratif dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait	Kegiatan
		2.4	Memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan, serta ketentuan yang berlaku;	Terlaksananya pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan, serta ketentuan yang berlaku	Jumlah kegiatan pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan, serta ketentuan yang berlaku	Kegiatan
		2.5	Menyelia dan memeriksa pelaksanaan tugas pegawai pada unit kerja;	Terlaksananya penyeliaan dan pemeriksanaan pelaksanaan tugas pegawai pada unit kerja	Jumlah kegiatan penyeliaan dan pemeriksanaan pelaksanaan tugas pegawai pada unit kerja	Kegiatan

No	Nama Jabatan Manajerial	Uraian Tugas		Kinerja	Indikator	Satuan
		2.6	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan aktivitas ;	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan aktivitas	Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan aktivitas	Kegiatan
		2.7	Melaksanakan penilaian kinerja dalam pelaksanaan aktivitas; dan	Terlaksananya penilaian kinerja dalam pelaksanaan aktivitas	Jumlah kegiatan penilaian kinerja dalam pelaksanaan aktivitas	Kegiatan
		2.8	Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung	Tersusun dan tersampaikannya laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung	Dokumen
		3	Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi bersama, termasuk akuntabilitas kinerja serta aspek kelembagaan dan tata laksana pada lingkup unit kerja	Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi bersama, termasuk akuntabilitas kinerja serta aspek kelembagaan dan tata laksana pada lingkup unit kerja	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi bersama, termasuk akuntabilitas kinerja serta aspek kelembagaan dan tata laksana pada lingkup unit kerja	Kegiatan
		4	Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif serta tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan	Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif serta tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif serta tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan	Kegiatan
		5	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kegiatan
2.1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas:			
		1.1	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD;	Tersedianya rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Dokumen
		1.2	Pengamanan barang milik daerah SKPD;	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	Dokumen
		1.3	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD;	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan
		1.4	Pemanfaatan barang milik daerah SKPD;	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah SKPD	Dokumen

No	Nama Jabatan Manajerial	Uraian Tugas		Kinerja	Indikator	Satuan
		1.5	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai;	Tersedianya unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Unit
		1.6	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket
		1.7	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian;	Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen
		1.8	Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen
		1.9	Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen
		1.10	Pemindahan tugas pegawai lingkup perangkat daerah;	Terlaksananya pemindahan tugas pegawai lingkup perangkat daerah	Jumlah pegawai yang dipindahtugaskan	Orang
		1.11	Perencanaan dan pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;	Tersusunnya perencanaan dan pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang
		1.12	Sosialisasi peraturan perundang-undangan;	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang
		1.13	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang
		1.14	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Paket
		1.15	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket
		1.16	Penyediaan peralatan rumah tangga;	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket
		1.17	Penyediaan bahan logistik	Tersedianya bahan logistik	Jumlah paket bahan logistik	Paket

No	Nama Jabatan Manajerial	Uraian Tugas		Kinerja	Indikator	Satuan
			kantor;	kantor	kantor yang disediakan	
		1.18	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket
		1.19	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen
		1.20	Penyediaan bahan/material;	Tersedianya bahan/material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket
		1.21	Fasilitasi kunjungan tamu;	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan
		1.22	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan
		1.23	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD;	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen
		1.24	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;	Terlaksananya dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen
		1.25	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;	Tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit
		1.26	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan;	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit
		1.27	Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor;	Tersedianya alat angkutan darat tak bermotor	Jumlah unit alat angkutan darat tak bermotor yang disediakan	Unit
		1.28	Pengadaan mebel;	Tersedianya mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit
		1.29	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit
		1.30	Pengadaan aset tetap lainnya;	Tersedianya aset tetap lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Unit

No	Nama Jabatan Manajerial	Uraian Tugas		Kinerja	Indikator	Satuan
		1.31	Pengadaan aset tak berwujud;	Tersedianya aset tak berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit
		1.32	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit
		1.33	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit
		1.34	Penyediaan jasa surat menyurat;	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan
		1.35	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan
		1.36	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan
		1.37	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan
		1.38	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit
		1.39	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit
		1.40	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor;	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit
		1.41	Pemeliharaan mebel;	Terlaksananya pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit
		1.42	Pemeliharaan peralatan dan	Terlaksananya pemeliharaan	Jumlah peralatan dan	Unit

No	Nama Jabatan Manajerial	Uraian Tugas		Kinerja	Indikator	Satuan
			mesin lainnya;	peralatan dan mesin lainnya	mesin lainnya yang dipelihara	
		1.43	Pemeliharaan aset tetap lainnya;	Terlaksananya pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Unit
		1.44	Pemeliharaan aset tak berwujud;	Terlaksananya pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit
		1.45	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit
		1.46	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit
		1.47	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit
		1.48	Pelayanan informasi publik dan diseminasi informasi;	Terlaksananya pelayanan informasi publik dan diseminasi informasi	Jumlah kegiatan pelayanan informasi publik dan diseminasi informasi	Kegiatan
		1.49	Penyelenggaraan hubungan masyarakat dan pengelolaan pengaduan masyarakat;	Terlaksananya penyelenggaraan hubungan masyarakat dan pengelolaan pengaduan masyarakat	Jumlah kegiatan penyelenggaraan hubungan masyarakat dan pengelolaan pengaduan masyarakat	Kegiatan
		1.50	Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau perumusan rancangan perjanjian kerjasama; dan/atau	Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau perumusan rancangan perjanjian kerjasama	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau perumusan rancangan perjanjian kerjasama	Dokumen
		1.51	Pelaksanaan uraian tugas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Terlaksananya uraian tugas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen/kegiatan/laporan pelaksanaan uraian tugas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya
		2	Untuk menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas, setiap bentuk aktivitas dilaksanakan			

No	Nama Jabatan Manajerial	Uraian Tugas		Kinerja	Indikator	Satuan
			melalui pentahapan sebagai berikut:			
		2.1	Menyusun rancangan rencana kerja berdasarkan skala prioritas aktivitas yang ditetapkan untuk dibahas bersama dengan atasan langsung;	Tersusunnya rancangan rencana kerja berdasarkan skala prioritas aktivitas yang ditetapkan untuk dibahas bersama dengan atasan langsung	Jumlah dokumen rancangan rencana kerja berdasarkan skala prioritas aktivitas yang ditetapkan untuk dibahas bersama dengan atasan langsung	Dokumen
		2.2	Melaksanakan dialog kinerja dalam menentukan rancangan strategi pelaksanaan setiap aktivitas melalui penerapan sistem kerja;	Terlaksananya dialog kinerja dalam menentukan rancangan strategi pelaksanaan setiap aktivitas melalui penerapan sistem kerja	Jumlah kegiatan dialog kinerja dalam menentukan rancangan strategi pelaksanaan setiap aktivitas melalui penerapan sistem kerja	Kegiatan
		2.3	Mengoordinasikan pelaksanaan tugas secara kolaboratif dan sinergi di lingkup unit kerjanya;	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas secara kolaboratif dan sinergi di lingkup unit kerjanya	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan tugas secara kolaboratif dan sinergi di lingkup unit kerjanya	Kegiatan
		2.4	Memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan, serta ketentuan yang berlaku;	Terlaksananya pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan, serta ketentuan yang berlaku	Jumlah kegiatan pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan, serta ketentuan yang berlaku	Kegiatan
		2.5	Menyelia dan memeriksa pelaksanaan tugas pegawai pada unit kerja;	Terlaksananya penyeliaan dan pemeriksaan pelaksanaan tugas pegawai pada unit kerja	Jumlah kegiatan penyeliaan dan pemeriksaan pelaksanaan tugas pegawai pada unit kerja	Kegiatan
		2.6	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan aktivitas yang menjadi kewenangan unit kerjanya;	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan aktivitas yang menjadi kewenangan unit kerjanya	Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan aktivitas yang menjadi kewenangan unit kerjanya	Kegiatan
		2.7	Melaksanakan penilaian kinerja dalam pelaksanaan aktivitas; dan	Terlaksananya penilaian kinerja bawahan dalam pelaksanaan aktivitas	Jumlah kegiatan penilaian kinerja dalam pelaksanaan aktivitas	Kegiatan
		2.8	Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung	Tersusun dan tersampaikannya laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung	Dokumen

No	Nama Jabatan Manajerial	Uraian Tugas		Kinerja	Indikator	Satuan
		3	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi bersama, termasuk akuntabilitas kinerja serta aspek kelembagaan dan tata laksana pada lingkup unit kerja	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi bersama, termasuk akuntabilitas kinerja serta aspek kelembagaan dan tata laksana pada lingkup unit kerja	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi bersama, termasuk akuntabilitas kinerja serta aspek kelembagaan dan tata laksana pada lingkup unit kerja	Kegiatan
		4	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif serta tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif serta tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif serta tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan	Kegiatan
		5	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kegiatan
2.2	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan	1	Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas:			
		1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen
		1.2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD;	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen
		1.3	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD;	Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen

No	Nama Jabatan Manajerial	Uraian Tugas		Kinerja	Indikator	Satuan
		1.4	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD;	Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen
		1.5	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA- SKPD;	Tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan perubahan DPA- SKPD	Dokumen
		1.6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan
		1.7	Evaluasi kinerja perangkat daerah;	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan
		1.8	Penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, pelayanan publik, pengelolaan SPI, serta fasilitasi implementasi Reformasi Birokrasi;	Tersedianya dokumen penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, pelayanan publik, pengelolaan SPI, serta fasilitasi implementasi Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, pelayanan publik, pengelolaan SPI, serta fasilitasi implementasi Reformasi Birokrasi	Dokumen
		1.9	Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah;	Terselenggaranya walidata pendukung statistik sektoral daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	Dokumen
		1.10	Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah;	Terlaksananya pengumpulan data statistik sektoral daerah	Jumlah data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	Data
		1.11	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara
		1.12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan selain	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan selain	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan selain	Dokumen

No	Nama Jabatan Manajerial	Uraian Tugas		Kinerja	Indikator	Satuan
			Renstra PD dan Renja PD;	Renstra PD dan Renja PD	Renstra PD dan Renja PD yang disusun	
		1.13	Koordinasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diampu;	Terkoordinasikannya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diampu	Jumlah subtansi koordinasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diampu	Substansi
		1.14	Sinkronisasi dan harmonisasi Pusat dan Daerah dalam rangka mendukung target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan;	Tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi Pusat dan Daerah dalam rangka mendukung target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil sinkronisasi dan harmonisasi Pusat dan Daerah dalam rangka mendukung target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Berita Acara
		1.15	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan
		1.16	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen
		1.17	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD;	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen
		1.18	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD;	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Dokumen
		1.19	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD;	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan
		1.20	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;	Tersedianya dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Dokumen
		1.21	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan	Laporan

No	Nama Jabatan Manajerial	Uraian Tugas		Kinerja	Indikator	Satuan
			SKPD;	penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	
		1.22	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran; dan/atau	Tersedianya dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen
		1.23	Pelaksanaan uraian tugas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya uraian tugas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen/kegiatan/laporan pelaksanaan uraian tugas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya
		2	Untuk menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas, setiap bentuk aktivitas dilaksanakan melalui pentahapan sebagai berikut:			
		2.1	Menyusun rancangan rencana kerja berdasarkan skala prioritas aktivitas yang ditetapkan untuk dibahas bersama dengan atasan langsung;	Tersusunnya rancangan rencana kerja berdasarkan skala prioritas aktivitas yang ditetapkan untuk dibahas bersama dengan atasan langsung	Jumlah dokumen rancangan rencana kerja berdasarkan skala prioritas aktivitas yang ditetapkan untuk dibahas bersama dengan atasan langsung	Dokumen
		2.2	Melaksanakan dialog kinerja dalam menentukan rancangan strategi pelaksanaan setiap aktivitas melalui penerapan sistem kerja;	Terlaksananya dialog kinerja dalam menentukan rancangan strategi pelaksanaan setiap aktivitas melalui penerapan sistem kerja	Jumlah kegiatan dialog kinerja dalam menentukan rancangan strategi pelaksanaan setiap aktivitas melalui penerapan sistem kerja	Kegiatan
		2.3	Mengoordinasikan pelaksanaan tugas secara kolaboratif dan sinergi di lingkup unit kerjanya;	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas secara kolaboratif dan sinergi di lingkup unit kerjanya	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan tugas secara kolaboratif dan sinergi di lingkup unit kerjanya	Kegiatan
		2.4	Memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan, serta ketentuan yang berlaku;	Terlaksananya pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan, serta ketentuan yang berlaku	Jumlah kegiatan pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan	Kegiatan

No	Nama Jabatan Manajerial	Uraian Tugas		Kinerja	Indikator	Satuan
					hambatan, serta ketentuan yang berlaku	
		2.5	Menyelia dan memeriksa pelaksanaan tugas pegawai pada unit kerja;	Terlaksananya penyeliaan dan pemeriksaan pelaksanaan tugas pegawai pada unit kerja	Jumlah kegiatan penyeliaan dan pemeriksaan pelaksanaan tugas pegawai pada unit kerja	Kegiatan
		2.6	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan aktivitas yang menjadi kewenangan unit kerjanya;	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan aktivitas yang menjadi kewenangan unit kerjanya	Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan aktivitas yang menjadi kewenangan unit kerjanya	Kegiatan
		2.7	Melaksanakan penilaian kinerja dalam pelaksanaan aktivitas; dan	Terlaksananya penilaian kinerja bawahan dalam pelaksanaan aktivitas	Jumlah kegiatan penilaian kinerja dalam pelaksanaan aktivitas	Kegiatan
		2.8	Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung	Tersusun dan tersampaikannya laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung	Dokumen
		3	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi bersama, termasuk akuntabilitas kinerja serta aspek kelembagaan dan tata laksana pada lingkup unit kerja	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi bersama, termasuk akuntabilitas kinerja serta aspek kelembagaan dan tata laksana pada lingkup unit kerja	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi bersama, termasuk akuntabilitas kinerja serta aspek kelembagaan dan tata laksana pada lingkup unit kerja	Kegiatan
		4	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif serta tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif serta tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif serta tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan	Kegiatan
		5	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kegiatan
3	Kepala Bidang Perdagangan	1	Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas :			
			Pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan	Terlaksananya pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan	Capaian pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi,	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya

No	Nama Jabatan Manajerial	Uraian Tugas	Kinerja	Indikator	Satuan
		bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/ Kota :	pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/ Kota	pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/ Kota	
		Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit Surat Keterangan Asal) :	Terlaksananya penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit Surat Keterangan Asal)	Capaian penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit Surat Keterangan Asal)	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya
		Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan :	Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Capaian pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya
		Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya :	Terlaksananya pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	Capaian pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya
		Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kabupaten/ Kota :	Terlaksananya penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Capaian penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya
		Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota :	Terlaksananya pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota	Capaian pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya
		Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota :	Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota	Capaian pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya
		Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota :	Terlaksananya penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Capaian penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya
		Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam	Terlaksananya pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan	Capaian pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya

No	Nama Jabatan Manajerial	Uraian Tugas		Kinerja	Indikator	Satuan
			negeri :	produk dalam negeri	produk dalam negeri	
			Melalui pelaksanaan aktivitas :			
		1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ;	Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen Rekomendasi
		1.2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri ;	Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Dokumen
		1.3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik ;	Verifikasi persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	dokumen
		1.4	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri ;	Terlaksananya Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Dokumen
		1.5	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri ;	Verifikasi persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan	Dokumen

No	Nama Jabatan Manajerial	Uraian Tugas		Kinerja	Indikator	Satuan
					Waralaba (STPW) Luar Negeri	
		1.6	Fasilitasi Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik ;	Verifikasi persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektroni	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	Dokumen
		1.7	Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik ;	Terlaksananya Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah data dan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	dokumen
		1.8	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya ;	Terlaksanakannya Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Laporan
		1.9	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 ;	Terfasilitasinya Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Dokumen
		1.10	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) ;	Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan
		1.11	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA ;	Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen
		1.12	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan ;	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Satuan
		1.13	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan ;	Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana	Satuan

No	Nama Jabatan Manajerial	Uraian Tugas		Kinerja	Indikator	Satuan
				Perdagangan	Distribusi Perdagangan	
		1.14	Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota ;	Terselenggarannya kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	Kegiatan
		1.15	Identifikasi terhadap lembaga dan potensi komoditas Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota ;	Tersedianya informasi terkait lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	Jumlah laporan lembaga identifikasi dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	laporan
		1.16	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan ;	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen
		1.17	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan ;	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen
		1.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat ;	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan
		1.19	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat ;	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan
		1.20	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat ;	Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan
		1.21	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laporan

No	Nama Jabatan Manajerial	Uraian Tugas		Kinerja	Indikator	Satuan
			1 (Satu) Kabupaten/Kota ;	Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
		1.22	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan ;	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan
		1.23	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota ;	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan
		1.24	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan ;	Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Dokumen
		1.25	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi ;	Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan
		1.26	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi ;	Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan
		1.27	Pameran Dagang Nasional ;	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha
		1.28	Pameran Dagang Lokal ;	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha
		1.29	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan ;	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha
		1.30	Peningkatan Citra Produk Ekspor ;	Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk

No	Nama Jabatan Manajerial	Uraian Tugas		Kinerja	Indikator	Satuan
		1.31	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri ;	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Orang
		1.32	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota;	Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM
		1.33	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota ;dan/atau	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan, dan jasa murah	UMKM
		1.34	Pelaksanaan uraian tugas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Terlaksananya uraian tugas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen/kegiatan/laporan pelaksanaan uraian tugas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya
		2	Untuk menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas, setiap aktivitas dilaksanakan melalui pentahapan sebagai berikut :			
		2.1	Menyusun rencana kerja berdasarkan skala prioritas aktivitas yang ditetapkan;	Tersusunnya rencana kerja berdasarkan skala prioritas aktivitas yang ditetapkan	Jumlah dokumen rencana kerja berdasarkan skala prioritas aktivitas yang ditetapkan	Dokumen
		2.2	Melaksanakan dialog kinerja dalam menentukan strategi pelaksanaan setiap aktivitas melalui penerapan sistem kerja;	Terlaksananya dialog kinerja dalam menentukan strategi pelaksanaan setiap aktivitas melalui penerapan sistem kerja	Jumlah kegiatan dialog kinerja dalam menentukan strategi pelaksanaan setiap aktivitas melalui penerapan sistem kerja	Kegiatan
		2.3	Mengoordinasikan pelaksanaan tugas secara kolaboratif dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait;	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas secara kolaboratif dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan tugas secara kolaboratif dan sinergi dengan pemangku	Kegiatan

No	Nama Jabatan Manajerial	Uraian Tugas		Kinerja	Indikator	Satuan
					kepentingan terkait	
		2.4	Memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan, serta ketentuan yang berlaku;	Terlaksananya pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan, serta ketentuan yang berlaku	Jumlah kegiatan pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan, serta ketentuan yang berlaku	Kegiatan
		2.5	Menyelia dan memeriksa pelaksanaan tugas pegawai pada unit kerja;	Terlaksananya penyeliaan dan pemeriksanaan pelaksanaan tugas pegawai pada unit kerja	Jumlah kegiatan penyeliaan dan pemeriksanaan pelaksanaan tugas pegawai pada unit kerja	Kegiatan
		2.6	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan aktivitas ;	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan aktivitas	Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan aktivitas	Kegiatan
		2.7	Melaksanakan penilaian kinerja dalam pelaksanaan aktivitas; dan	Terlaksananya penilaian kinerja dalam pelaksanaan aktivitas	Jumlah kegiatan penilaian kinerja dalam pelaksanaan aktivitas	Kegiatan
		2.8	Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung	Tersusun dan tersampaikannya laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung	Dokumen
		3	Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi bersama, termasuk akuntabilitas kinerja serta aspek kelembagaan dan tata laksana pada lingkup unit kerja	Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi bersama, termasuk akuntabilitas kinerja serta aspek kelembagaan dan tata laksana pada lingkup unit kerja	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi bersama, termasuk akuntabilitas kinerja serta aspek kelembagaan dan tata laksana pada lingkup unit kerja	Kegiatan
		4	Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif serta tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan	Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif serta tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif serta tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan	Kegiatan
		5	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kegiatan
4	Kepala Bidang	1	Menyelenggarakan,			

No	Nama Jabatan Manajerial	Uraian Tugas		Kinerja	Indikator	Satuan
	Perindustrian		mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas :			
			Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota :	Terlaksananya penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	Capaian penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota :	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya
			Penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota :	Terlaksananya penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya
			Melalui pelaksanaan aktivitas :			
		1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen
		1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Implementasi Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri;	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Implementasi Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Implementasi Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen
		1.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri;	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen
		1.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan	Terselenggaranya Koordinasi,	Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen

No	Nama Jabatan Manajerial	Uraian Tugas		Kinerja	Indikator	Satuan
			Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;	Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
		1.5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat;	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Implementasi Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen
		1.6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri;	Dievaluasinya Implementasi Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen
		1.7	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri;	Tersusunnya rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan wilayah industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan wilayah industri	Rekomendasi
		1.8	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di tingkat Kabupaten/Kota;	Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diiklankan - Jumlah program pengawasan jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Dokumen
		1.9	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri;	Tersedianya data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan wilayah industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan wilayah industri	Laporan
		1.10	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Wilayah Industri;	Tersusunnya rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan wilayah industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan wilayah industri	Rekomendasi
		1.11	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota keseluruhan merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota keseluruhan merupakan Penanaman	Dokumen

No	Nama Jabatan Manajerial	Uraian Tugas		Kinerja	Indikator	Satuan
				dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	
		1.12	Fasilitasi verifikasi memuat persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA);	Terfasilitasinya verifikasi memuat persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pengumpulan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi memuat persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka publikasi perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen
		1.13	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);	Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen
		1.14	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas;	Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen
		1.15	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri	Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen

No	Nama Jabatan Manajerial	Uraian Tugas		Kinerja	Indikator	Satuan
			dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas; dan/atau	dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	
		1.16	Pelaksanaan uraian tugas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Terlaksananya uraian tugas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen/kegiatan/laporan pelaksanaan uraian tugas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya
		2	Untuk menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas, setiap aktivitas dilaksanakan melalui pentahapan sebagai berikut :			
		2.1	Menyusun rencana kerja berdasarkan skala prioritas aktivitas yang ditetapkan;	Tersusunnya rencana kerja berdasarkan skala prioritas aktivitas yang ditetapkan	Jumlah dokumen rencana kerja berdasarkan skala prioritas aktivitas yang ditetapkan	Dokumen
		2.2	Melaksanakan dialog kinerja dalam menentukan strategi pelaksanaan setiap aktivitas melalui penerapan sistem kerja;	Terlaksananya dialog kinerja dalam menentukan strategi pelaksanaan setiap aktivitas melalui penerapan sistem kerja	Jumlah kegiatan dialog kinerja dalam menentukan strategi pelaksanaan setiap aktivitas melalui penerapan sistem kerja	Kegiatan
		2.3	Mengoordinasikan pelaksanaan tugas secara kolaboratif dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait;	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas secara kolaboratif dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan tugas secara kolaboratif dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait	Kegiatan
		2.4	Memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan, serta ketentuan yang berlaku;	Terlaksananya pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan, serta ketentuan yang berlaku	Jumlah kegiatan pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan, serta ketentuan yang berlaku	Kegiatan
		2.5	Menyelia dan memeriksa pelaksanaan tugas pegawai pada	Terlaksananya penyeliaan dan pemeriksanaan pelaksanaan	Jumlah kegiatan penyeliaan dan pemeriksanaan	Kegiatan

No	Nama Jabatan Manajerial	Uraian Tugas		Kinerja	Indikator	Satuan
			unit kerja;	tugas pegawai pada unit kerja	pelaksanaan tugas pegawai pada unit kerja	
		2.6	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan aktivitas ;	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan aktivitas	Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan aktivitas	Kegiatan
		2.7	Melaksanakan penilaian kinerja dalam pelaksanaan aktivitas; dan	Terlaksananya penilaian kinerja dalam pelaksanaan aktivitas	Jumlah kegiatan penilaian kinerja dalam pelaksanaan aktivitas	Kegiatan
		2.8	Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung.	Tersusun dan tersampaikannya laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung	Dokumen
		3	Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi bersama, termasuk akuntabilitas kinerja serta aspek kelembagaan dan tata laksana pada lingkup unit kerja	Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi bersama, termasuk akuntabilitas kinerja serta aspek kelembagaan dan tata laksana pada lingkup unit kerja	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi bersama, termasuk akuntabilitas kinerja serta aspek kelembagaan dan tata laksana pada lingkup unit kerja	Kegiatan
		4	Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif serta tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan	Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif serta tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif serta tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan	Kegiatan
		5	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kegiatan
5	Kepala Bidang Kemetrologian	1	Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas :			
			Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	Terlaksananya pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	Capaian pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya
			Melalui pelaksanaan aktivitas :			
		1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang;	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Satuan
		1.2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal;	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang	Orang

No	Nama Jabatan Manajerial	Uraian Tugas		Kinerja	Indikator	Satuan
					Dibina	
		1.3	Penyidikan Metrologi Legal; dan/atau	Terlaksananya Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Satuan
		1.4	Pelaksanaan uraian tugas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Terlaksananya uraian tugas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen/kegiatan/laporan pelaksanaan uraian tugas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dokumen / Laporan / Kegiatan / Satuan lainnya
		2	Untuk menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas, setiap aktivitas dilaksanakan melalui pentahapan sebagai berikut :			
		2.1	Menyusun rencana kerja berdasarkan skala prioritas aktivitas yang ditetapkan;	Tersusunnya rencana kerja berdasarkan skala prioritas aktivitas yang ditetapkan	Jumlah dokumen rencana kerja berdasarkan skala prioritas aktivitas yang ditetapkan	Dokumen
		2.2	Melaksanakan dialog kinerja dalam menentukan strategi pelaksanaan setiap aktivitas melalui penerapan sistem kerja;	Terlaksananya dialog kinerja dalam menentukan strategi pelaksanaan setiap aktivitas melalui penerapan sistem kerja	Jumlah kegiatan dialog kinerja dalam menentukan strategi pelaksanaan setiap aktivitas melalui penerapan sistem kerja	Kegiatan
		2.3	Mengoordinasikan pelaksanaan tugas secara kolaboratif dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait;	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas secara kolaboratif dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan tugas secara kolaboratif dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait	Kegiatan
		2.4	Memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan, serta ketentuan yang berlaku;	Terlaksananya pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan, serta ketentuan yang berlaku	Jumlah kegiatan pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan, serta ketentuan yang berlaku	Kegiatan
		2.5	Menyelia dan memeriksa pelaksanaan tugas pegawai pada unit kerja;	Terlaksananya penyeliaan dan pemeriksanaan pelaksanaan tugas pegawai pada unit kerja	Jumlah kegiatan penyeliaan dan pemeriksanaan pelaksanaan tugas pegawai pada unit kerja	Kegiatan

No	Nama Jabatan Manajerial	Uraian Tugas		Kinerja	Indikator	Satuan
		2.6	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan aktivitas ;	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan aktivitas	Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan aktivitas	Kegiatan
		2.7	Melaksanakan penilaian kinerja dalam pelaksanaan aktivitas; dan	Terlaksananya penilaian kinerja dalam pelaksanaan aktivitas	Jumlah kegiatan penilaian kinerja dalam pelaksanaan aktivitas	Kegiatan
		2.8	Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung	Tersusun dan tersampaikannya laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung	Dokumen
		3	Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi bersama, termasuk akuntabilitas kinerja serta aspek kelembagaan dan tata laksana pada lingkup unit kerja	Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi bersama, termasuk akuntabilitas kinerja serta aspek kelembagaan dan tata laksana pada lingkup unit kerja	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi bersama, termasuk akuntabilitas kinerja serta aspek kelembagaan dan tata laksana pada lingkup unit kerja	Kegiatan
		4	Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif serta tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan	Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif serta tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif serta tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan	Kegiatan
		5	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kegiatan

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon yang merupakan salah satu perangkat daerah didukung oleh sejumlah personil atau Aparatur yang mengemban tugas dan fungsinya, sampai dengan Tahun 2024 jumlah Aparatur sebanyak:

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status dan Unit Kerja

UNIT	PNS	P3K	TKK	THL	JUMLAH	%
Dinas	36	4	7	45	92	48,42
UPT Pasar Kranggot	7	-	1	35	43	22,63
UPT Pasar Blok F	5	-	2	27	34	17,89
UPT Pasar Merak	5	-	1	15	21	11,05
Jumlah Total	53	4	11	122	190	100

Hingga akhir 2024, total aparatur di lingkungan Disperindag berjumlah 188 orang. Komposisinya terdiri dari 53 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 4 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 11 Tenaga Kerja Kontrak (TKK), dan 122 Tenaga Harian Lepas (THL). Sebaran pegawai terbesar berada di kantor dinas pusat (48,42%), disusul UPT Pasar Kranggot (22,63%), UPT Blok F (17,89%), dan UPT Merak (11,05%).

Dilihat dari jabatan dan golongan, mayoritas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berada pada golongan III dan IV, yang mencerminkan tingkat pengalaman dan tanggung jawab yang relatif tinggi dalam struktur birokrasi. Dari sisi kualifikasi pendidikan, hampir 30% pegawai telah menyelesaikan pendidikan minimal Strata-1 (S1). Kondisi ini mencerminkan bahwa SDM yang dimiliki memiliki kapasitas yang cukup mumpuni, baik dalam aspek teknis maupun administratif, sehingga diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secara profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Tabel 2.3 : Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan

JABATAN	GOLONGAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
Kepala Dinas	-	-	-	1	1
Sekretaris	-	-	-	1	1
Kepala Bidang	-	-	-	3	3
Kepala Sub Bagian	-	-	-	1	1
Kepala UPT	-	-	3	-	3
Kepala Sub TU	-	-	2	-	2
Pelaksana PNS	2	14	13	-	29
Fungsional	-	-	10	3	13
Jumlah Total	**2**	14	28	9	53

Tabel 2.4 : Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

UNIT KERJA	GOLONGAN					JUMLAH
	SMP	SMA	D3	S1	S2	
Dinas		8	2	15	13	36
UPT Pasar Kranggot	1	4	-	1	1	7
UPT Pasar Blok F	1	2	-	-	2	5
UPT Pasar Merak	1	3	-	1	-	5
Jumlah Total	3	17	2	16	16	55

Per 31 Desember 2024, total nilai aset Disperindag tercatat sebesar lebih dari Rp 139 miliar. Ini mencakup aset lancar, aset tetap seperti tanah dan bangunan, serta aset tidak berwujud. Akumulasi penyusutan dan amortisasi telah diperhitungkan dalam penyajian laporan keuangan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Tabel 2.5 : Jumlah Aset Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon Per 31 Desember 2024

No	Uraian		Rp.
1.	**Aset Lancar**		**1.067.110.475.30**
	-	Kas bendahara penerimaan	20.000.00
	-	Kas bendahara pengeluaran	-
	-	Piutang Retribusi Daerah	2.925.657.615.00
	-	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	11,618,397,957.13
	-	Penyisihan Piutang	-13,658,353,838.83
	-	Biaya dibayar di muka	154,800,000.00
	-	Persediaan	26,588,742.00
2.	**Aset Tetap**		**134,919,334,018.53**
	a.	Tanah	54,369,501,198.00
	b.	Peralatan dan Mesin	16,472,475,974.32
	c.	Gedung dan Bangunan	82,212,515,989.80
	d.	Jalan, irigasi, dan jaringan	11,342,643,504.00
	e.	Aset tetap lainnya	11,203,900.00
	f.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2,227,206,860.00
	g.	Akumulasi penyusutan Aset tetap	-31,716,213,408
3.	**Aset lainnya**		**4,229,386,449.20**
	a.	**Aset tidak berwujud**	**465,824,000.00**
	b.	**Aset lain-lain**	**4,109,012,199.20**
	c.	**Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**	**-345,449,750.00**

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2024

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon merupakan kinerja pelayanan sebelumnya, yang ditetapkan secara umum dan akan berdasarkan kewenangan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pembantuan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

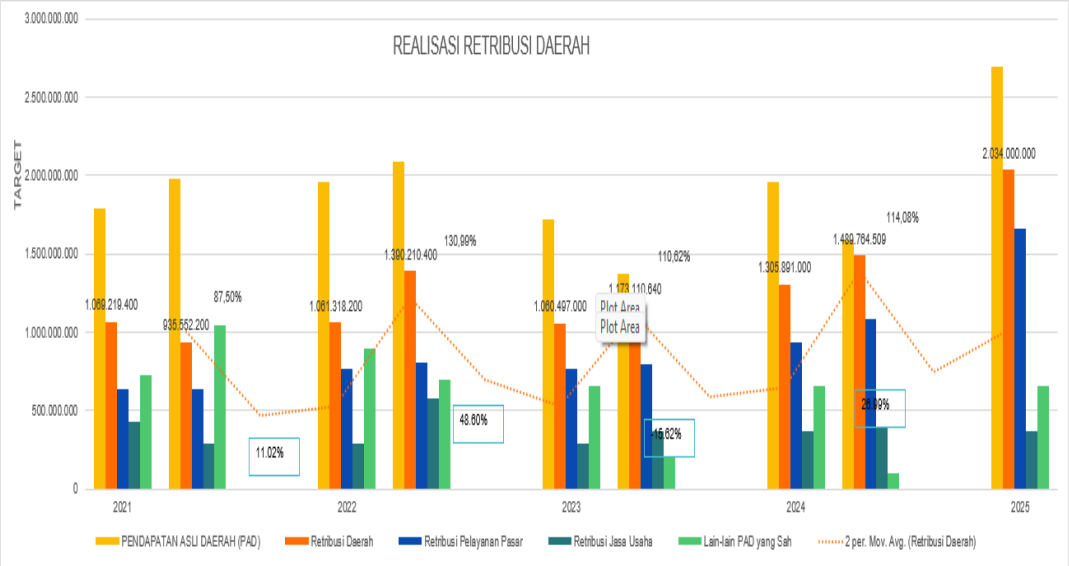
Sedangkan fungsinya yaitu Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian dan Perdagangan; Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Perindustrian dan Perdagangan; Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Walikota Cilegon sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon sampai dengan tahun 2024, diantaranya:

- **Sekretariat,** Pengelolaan retribusi daerah, termasuk penetapan target, pencatatan realisasi, dan pelaporannya, merupakan bagian dari kewenangan Sekretariat Dinas. Sekretariat berperan dalam menyusun perencanaan target retribusi tahunan, melakukan pemantauan kinerja pemungutan, serta menyusun laporan capaian sebagai bagian dari pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fungsi ini dijalankan untuk memastikan bahwa setiap unit teknis pelaksana, termasuk UPT Pasar, berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan mendukung optimalisasi PAD secara menyeluruh.

  Berdasarkan data capaian hingga tahun 2024, realisasi retribusi pelayanan pasar mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, realisasi tercatat sebesar Rp503 juta, meningkat menjadi Rp536 juta pada 2022, dan mencapai puncaknya sebesar Rp550 juta pada tahun 2023. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi Rp475 juta.

  Menindaklanjuti dinamika tersebut, pada tahun 2025 Pemerintah Kota Cilegon menetapkan target retribusi pelayanan pasar sebesar Rp600 juta. Upaya pencapaian target ini akan didukung melalui strategi penataan kelembagaan, peningkatan kapasitas petugas, serta penguatan sistem pemungutan berbasis digital, dengan tetap mengacu pada koordinasi di bawah supervisi sekretariat.



Gambar 2.2 Realisasi Retribusi Daerah

- **Bidang Perindustrian** sampai dengan saat ini telah melakukan penumbuhan dan pembinaan terhadap industri kecil menegah (IKM) di kota Cilegon. Sampai dengan Tahun 2024 industri kecil menengah kota Cilegon berjumlah sebanyak 1610, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6 : Pertumbuhan IKM Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah IKM	Pertumbuhan
2024	1610	26,67%
2023	1271	7,03%
2022	1674	39,037%
2021	1206	15,63%

Jumlah IKM di Kota Cilegon terus mengalami fluktuasi selama 2021–2024. Tahun 2022 menjadi puncak pertumbuhan dengan kenaikan 39,04%, sedangkan 2023 mengalami penurunan sebelum kembali meningkat pada 2024 menjadi 1.610 unit usaha. Disperindag menargetkan konsistensi pertumbuhan ini melalui program fasilitasi dan pendataan berbasis sistem informasi nasional.

- **Bidang Perdagangan** melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan melayani dan melindungi konsumen/masyarakat Kota Cilegon diantaranya adalah Survey Harga Barang Pokok, Stabilisasi Harga Barang Pokok, Pengawasan Distribusi Barang Berbahaya serta Pengawasan Inflasi di Kota Cilegon. Kegiatan ini bertujuan untuk melayani dan melindungi masyarakat dari ketersediaan barang kebutuhan pokok dan stabilitasi harga kebutuhan barang pokok, serta terbebas dari bahan berbahaya.

Masyarakat juga dilindungi dari bahan berbahaya berupa barang-barang yang sudah tidak layak edar, serta barang yang mengandung bahan berbahaya yang tidak layak konsumsi. melakukan pembinaan Pasar Rakyat di Kota Cilegon. Pada kegiatan Survey Sarana Distribusi Perdagangan, sampai dengan saat ini kota Cilegon sudah memiliki Pasar Rakyat kecamatan sebanyak 8 pasar yang tersebar di 8 Kecamatan yakni: Pasar Baru (Kecamatan Jombang), Pasar Blok F (Kecamatan Cilegon), Pasar Cigading (Kecamatan Cigading), Pasar Tegal Bunder (Kecamatan Purwakarta), Pasar Pulomerak (Kecamatan Pulomerak), Pasar Cibeber (Kecamatan Cibeber), Pasar Cikerai (Kecamatan Cikerai) dan Pasar Grogol Kecamatan Grogol.

Tabel 2.6: Data/ Profil Pasar yang telah terbangun di Kota Cilegon

No.	Nama Pasar	Lokasi	Luas	Tahun Berdiri	Los	Kios	Emprakan
1.	Pasar Kranggot	Kel. Sukmajaya Kec. Jombang	5.6 Ha	2006	288	678	185
2.	Pasar Blok F	Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon	1.5 Ha	2016	77	240/75	461
3.	Pasar Baru Merak	Kel. Tamansari Kec. Pulomerak	1 Ha	2000	190	310	150
4.	Pasar Tegal Bunder	Kel. Tegal Bunder Kec. Purwakarta	3.500 M2	2014	82	22	-
5.	Pasar Wisata Cigading	Kel. Kubangsari Kec. Ciwandan	3.000 M2	1990	24	50	-
6.	Pasar Cibeber	Kel. Cikerai Kec. Cibeber	640 M2	2018	28	14	-
7.	Pasar Citangkil	Kel. Warnasari Kec. Citangkil	700 M2	2018	-	20	-
8.	Pasar Grogol	Kelu. Kotasari Kec. Grogol	2.000 M2	2018	10	35	-

Disperindag mengelola beberapa pasar utama seperti Pasar Kranggot, Blok F, dan Pasar Baru Merak. Dari segi capaian Standar Nasional Indonesia (SNI), rata-rata capaian meningkat dari 36% (2022) menjadi 42% (2024). Namun, beberapa pasar masih perlu perhatian khusus, terutama dari segi infrastruktur dan utilitas.

Tabel 2.7 : Tabel Capaian SNI Pasar Rakyat

Nama Pasar	2022				2023		2024	
	Tipe Pasar	Ceklis SNI	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
Pasar Blok F	I	44	21	47,73	41	89,13	35	80
Pasar Merak	III	44	24	54,55	24	54,55	40	91
Pasar Baru Cilegon	I	44	22	50,00	31	67,39	28	64
Pasar Wisata Cigading	IV	44	22	50,00	22	50	24	55
Pasar Cikerai	IV	44	13	29,55	0	0	8	18
Pasar Kecamatan Citangkil	IV	44	12	27,27	12	27,27	7	16
Pasar Kecamatan Grogol	IV	44	8	18,18	0	0	2	5
Pasar Tegal Bunder	IV	44	8	18,18	0	0	3	7
Jumlah rata-rata				**36,93%**		**36,04 %**		**42%**

Sumber: Data Bidang Perdagangan diolah kembali

- **Bidang Metrologi Legal** melakukan kegiatan Terhadap perlindungan Pedagang tentang Tertib Ukur. Sebab itu Masyarakat dilindungi dari kerugian atas kecurangan para pedagang terhadap satuan ukur/timbangan. Untuk itu dilakukan uji tera secara kontinu terhadap para pedagang. Untuk uji tera ini, tidak hanya dilakukan terhadap para pedagang saja, akan tetapi juga dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan di kota Cilegon yang menggunakan alat tera baik skala kecil maupun besar. Hal ini juga didukung dengan keberadaan bidang metrologi legal yang mempunyai tugas melakukan tera dan tera ulang di kota Cilegon. Sebanyak 256 unit usaha telah mengantongi izin resmi, terdiri dari pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan gudang. Sementara itu, alat ukur kemetrologian telah mencapai tingkat keterpenuhan sebesar 83,49% dari total kebutuhan 109 unit, menunjukkan langkah maju dalam perlindungan konsumen.

Tabel 2.8: Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Pusat Perbelanjaan - Ramayana - Transmart - Cilegon Centre Mall (CCM) - City Mall - Sosoro Mall	5
2.	Toko Swalayan (Alfamart, Indomart, Supermarket lainnya.)	185
3.	Jumlah Tanda Daftar Gudang (Yang sudah berizin)	66
	JUMLAH	**256**

Tabel 2.9: Pedagang Pasar dan Pedagang Kaki Lima (PKL)

No	Nama Pasar	Lokasi	Luas	Tahun Berdiri	Los	Kios	Emprakan
1.	Pasar Kranggot	Kel. Sukmajaya Kec. jombang	5.6 Ha	2006	288	678	185
2.	Pasar Blok F	Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon	1.5 Ha	2016	77	240/75	461
3.	Pasar Baru Merak	Kel. Tamansari Kec. Pulomerak	1 Ha	2000	190	310	150
4.	Pasar Tegal Bunder	Kel. Tegal Bunder Kec. Purwakarta	3.500 M2	2014	82	22	-
5.	Pasar Wisata Cigading	Kel. Kubangsari Kec. Ciwandan	3.000 M2	1990	24	50	-
6.	Pasar Cibeber	Kel. Cikerai Kec. Cibeber	640 M2	2018	28	14	-
7.	Pasar Citangkil	Kel. Warnasari Kec. Citangkil	700 M2	2018	-	20	-
8.	Pasar Grogol	Kelu. Kotasari Kec. Grogol	2.000 M2	2018	10	35	-

Tabel 2.10: Keterisian Kios, Los, Awning dan Pelataran

NO	URAIAN/ TITIK LOKASI	JUMLAH
1.	Pedagang Kaki Lima (data per tahun 2018)	**623**
2.	Pedagang pada Pasar Baru Cilegon	Kios : Terisi 507 Los : Terisi 184 Awning : Terisi 432 Pelataran : Terisi 1.190
3.	Pedagang pada Pasar Baru Merak	Kios :Terisi 137 Los : Terisi 25 Pelataran : Terisi 457
4.	Pedagang pada Pasar Blok F	Kios :Terisi 240 Los :Terisi 90 Pelataran :Terisi 457

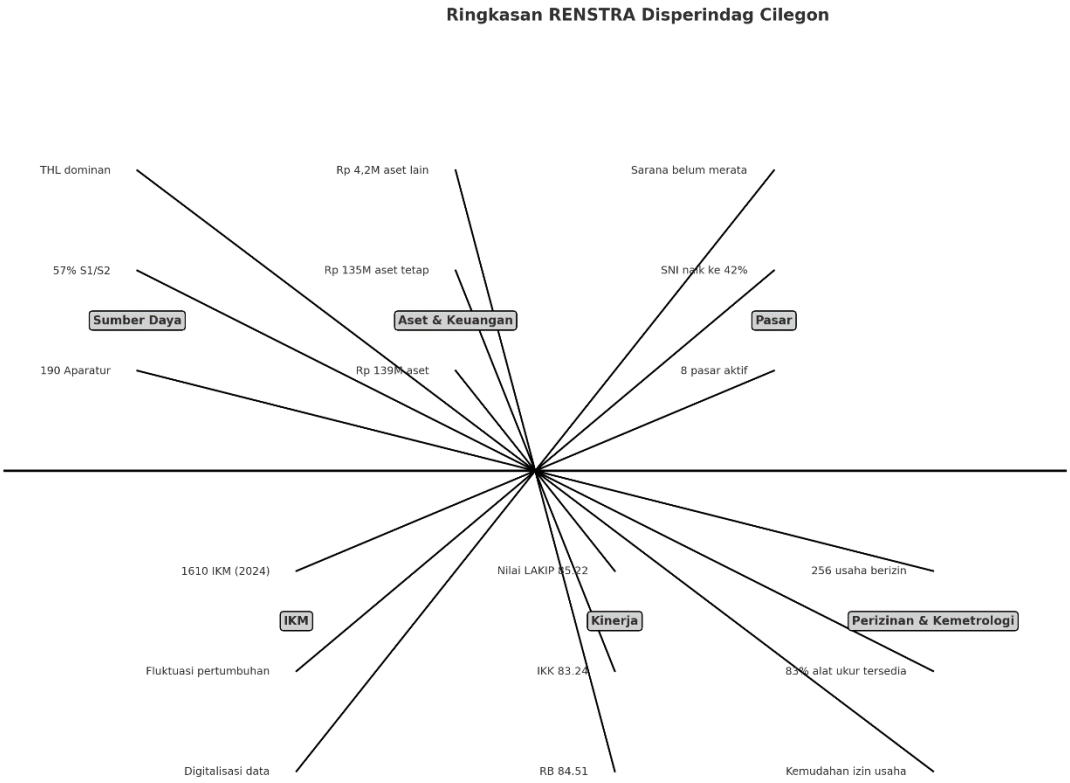
Tabel 2.11: Capaian Presentase Terpenuhinya alat standar kemetrologian

Jumlah Alat Standard Kemetrologian yang dimiliki	**91 Alat Standard**	**83,49%**
Jumlah Alat Standard Kemetrologian yang dibutuhkan	**109 Alat Standard**	

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut maka jelas bahwa kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon yang secara rutin harus dilaksanakan setiap tahun dan setiap lima tahun berkisar pada perumusan kebijakan dan pembinaan terhadap aktivitas perdagangan dan industri, yang pencapaian kinerjanya dapat terlihat pada tabel sebagai berikut. Evaluasi kinerja pelayanan menunjukkan bahwa capaian indikator strategis secara umum berada di atas target. Nilai LAKIP cenderung stabil di kisaran 82–85 poin. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dan kinerja retribusi menunjukkan tren peningkatan, meskipun pada 2023 sempat terjadi penurunan realisasi retribusi sebesar -7,19%. Capaian pelayanan seperti pemenuhan standar pasar rakyat, fasilitasi izin usaha, stabilitas harga, dan alat kemetrologian menunjukkan progres yang baik. Rata-rata realisasi anggaran tahunan untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah mencapai 89–93%. Beberapa program mengalami fluktuasi signifikan dalam realisasi seperti pengelolaan sistem informasi industri dan distribusi perdagangan, menandakan perlunya optimalisasi perencanaan dan monitoring anggaran. Dalam lima tahun terakhir, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon terus mengoptimalkan berbagai program strategis untuk memperkuat sektor industri dan perdagangan daerah. Pengalokasian anggaran diarahkan tidak hanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola organisasi.

Pada bidang industri, melalui Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Disperindag fokus mendorong pengembangan kawasan industri, pembinaan IKM, serta hilirisasi produk unggulan, guna memperkokoh posisi Cilegon sebagai kota industri nasional. IKM (Industri Kecil Menengah) sebanyak ±981 unit menyumbang kontribusi tertinggi dalam struktur PDRB Cilegon. Sementara itu, di sektor perdagangan, Program Peningkatan Sarana Distribusi dan Stabilitas Harga Bapokting menjadi instrumen utama dalam menjaga kelancaran distribusi, menata pasar, dan mengendalikan harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB merupakan Kedua tertinggi setelah industri, dengan laju pertumbuhan 7,73% (2019). Infrastruktur pasar: 8 pasar rakyat tersebar di 8 kecamatan. Jumlah pelaku usaha: Pedagang Kaki Lima (PKL): ±650; Mini

market: 158; Supermarket dan pusat perbelanjaan modern: total 16 unit. Disperindag juga mengembangkan sistem OSS, integrasi data usaha, serta pemantauan harga daring untuk mempermudah perizinan dan layanan publik. Program lainnya seperti perlindungan konsumen, pengembangan ekspor, hingga pemasaran produk dalam negeri dijalankan untuk memperluas pasar, meningkatkan kualitas produk lokal, dan membuka peluang ekspor bagi pelaku usaha di Kota Cilegon. Dengan sinergi program tersebut, Disperindag berkomitmen terus memperkuat peran dalam pembangunan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menegaskan Kota Cilegon sebagai salah satu pusat industri dan perdagangan terdepan di Indonesia.



Gambar 2.3 Ringkasan Renstra Disperindag Kota Cilegon

Tabel 2.12 : Evaluasi Renstra Tahun 2021 – 2026

Program Prioritas	Uraian Indikator	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD pada RKPD Tahun Ke-								Capaian Target RPJMD pada RKPD Tahun ke-								Tingkat Capaian Target RPJMD pada RKPD Tahun ke-								Capaian Tahun Akhir Periode		Rasio Capaian Akhir	
					2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	T1.K	T1.Rp	T2.K	T2.Rp	T3.K	T3.Rp	T4.K	T4.Rp	R1.K	R1.Rp	R2.K	R3.Rp	R3.K	R3.Rp	R4.K	R4.Rp	C1.K	C1.Rp	C2.K	C2.Rp	C3.K	C3.Rp	C4.K	C4.Rp	CA.K	CA.Rp	R.K	R.Rp
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase teselesaikannya Perencanaan dan Pembangunan Industri	%	#N/A	100	100	651.215.423	100	2.469.194.289	100	2.450.592.476	100	1.958.900.000	100	582.142.870	85	1.845.680.988	86	2.174.126.375	53,33	671.352.078	100,00	89,39	85,00	74,75	86,00	88,72	53,33	34,27	53,33	5.273.302.311	64,87	57,43
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	53,00	71	53	44.922.305	57	309.949.477	60	188.996.870	#N/A	-	86	44.718.259	86	252.632.460	92,77	173.084.539	#N/A	-	61,63	99,55	66,28	81,51	64,68	91,58	N/A	N/A	#N/A	470.435.258	#N/A	72,70
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam promosi dan pemasaran produk dalam negeri	Pelaku Usaha	#N/A	5	0	183.291.311	5	-	5	81.818.485	#N/A	-	7	136.962.600	0	-	5	72.184.219	#N/A	-	N/A	74,72	0,00	N/A	100,00	88,22	N/A	N/A	#N/A	209.146.819	40,00	65,18
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang Terdata dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	#N/A	25	#N/A	-	5	131.596.966	10	45.455.891	#N/A	-	#N/A	-	10,1	119.116.020	7,29	34.365.464	#N/A	-	N/A	N/A	202,00	90,52	72,90	75,60	N/A	N/A	#N/A	153.481.484	109,96	66,45
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Presentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI kecil dan menengah, IPUI kecil dan menegah serta IUKI dan IPKI yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	#N/A	75	0	-	50	216.490.187	60	102.058.050	65	75.000.000	0	-	42,6	147.980.267	71,93	97.155.159	51,21	38.984.000	N/A	N/A	85,20	68,35	119,88	95,20	78,78	51,98	51,21	284.119.426	75,70	57,47

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	81,80	82,8	82,3	###### ######	82,3	###### ######	82	###### ######	82,8	###### ######	81,8	###### #####	82,11	###### ######	83,24	###### ######	85,22	###### #####	99,39	75,32	99,77	87,29	101,51	89,92	102,92	91,91	85,22	55.209.048.546	342,00	68,89
-	Pertumbuhan Realisasi Retribusi (OPD Penghasil)	%	#N/A	7,9	5		6		8		8		7,76		24,31		-7,19		26,97		155,20		405,17		-89,88		337,13		26,97		161,52	
-	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	C	65	50		54		56		62		44,96		82.02		82,01		84,5		89,92		N/A		146,45		136,29		84,50		99,38	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat yang Sesuai Standar	%	#N/A	20	0	###### ######	20	5.301.565.644	20	4.556.337.120	20	3.852.632.000	37	###### #####	37	3.333.110.650	36,04	4.337.719.809	42	494.028.999	N/A	67,53	185,00	62,87	180,20	95,20	210,00	12,82	42,00	10.343.729.445	153,39	47,68
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Koefisien Kenaikan Harga Bahan Pokok	%	< 6 %	< 6 %	6	548.084.756	6	564.358.767	6	398.794.437	10	334.872.300	8,77	515.322.390	9,8	471.237.393	8,37	366.323.799	6,18	90.140.444	146,17	94,02	163,33	83,50	139,50	91,86	61,80	26,92	6,18	1.443.024.026	102,16	59,26
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pelaku Usaha yang difasilitasi Ekspor	%	#N/A	29	0	59.984.880	29	456.043.097	29	225.455.891	29	270.000.000	0	47.863.880	26	385.965.828	38,71	195.688.917	38,71	242.821.051	N/A	79,79	89,66	84,63	133,48	86,80	133,48	89,93	38,71	872.339.676	95,10	68,23
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	90,62	95	91	296.219.938	91	792.665.489	92	1.075.241.964	93	360.000.000	100	289.615.574	100	738.791.240	100	1.058.101.810	334	227.118.382	109,89	97,77	109,89	93,20	108,70	98,41	359,14	63,09	334,00	2.313.627.006	5566,62	70,49

Tabel 2.12.1 : Evaluasi Kinerja Renstra 2021-2026

	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	TAHUN							
				2021		2022		2023		2024	
				T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Peningkatan layanan pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah (poin)	50	50	54	82.006	56	83.02	62	84.50
			Nilai Lakip Perangkat Daerah (nilai)	82.3	82.23	82.3	82.11	82.8	83.24	82.8	85.22
			Pertumbuhan Realisasi Retribusi (%)	5	7.76	6	24.50	8	-7.19	7.4	26.97
2.	Pemerataan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Peran Perindustrian Terhadap Perluasan Lapangan Kerja	Persentase terselesaikannya Perencanaan dan Pembangunan Industri (%)	100	100	100	85	100	94.74	100	53.3
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan industri kecil menengah (%)	0	0	50	42.60	60	71.93	65	42
			Persentase Industri/ Pelaku Usaha yang Terdata dalam Sistem Informasi Industri Nasional (%)	0	0	5	10.10	10	7.29	15	12.6

3.	Peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya Fasilitas Perdagangan, Fasilitasi Ekspor dan Fasilitasi Kemetrologian	Persentase Pasar Rakyat yang Sesuai Standar (%)	0	0	20	37	20	36.04	20	42
			Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (%)	53	86	57	92.88	60	92.77	64	94.9
			Persentase Pelaku Usaha yang di Fasilitasi Ekspor (%)	-	-	-	-	65	-	65	38.7
			Persentase Alat Standar Kemetrologian (%)	-	-	55	68	60	83.49	72	83.5
		Terwujudnya Stabilitas Harga Bahan Pokok	Tingkat stabilitas harga bahan pokok (%)	<10 %	6,8	<10	9,83	<10	15.79	<10	6.18

Tabel 2.12.2: Evaluasi Realisasi Anggaran 2021-2026

Uraian	Anggaran Tahun Ke					Realisasi Tahun Ke				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	19.948.806.206	19.563.907.315	21.919.499.729	21.748.090.568	21.913.931.674	17.601.898.523	17.579.813.469	20.393.120.578	-	-
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.469.194.289	2.450.592.476	1.958.900.000	895.775.000	450.000.000	1.845.680.988	2.174.676.375	671.352.078	-	-
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	216.490.187	102.058.050	75.000.000	225.000.000	250.000.000	146.220.267	97.155.159	38.984.000	-	-
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	131.596.966	45.455.891	-	40.000.000	150.000.000	120.876.020	34.883.177	-	-	-
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	309.949.477	188.996.870	-	250.000.000	250.000.000	252.632.460	172,964,539	-	-	-
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5.301.565.644	4.556.337.120	3.852.632.000	4.274.340.942	5.118.125.224	3.333.110.650	4,338,049,809	494.028.999	-	-
Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	564.358.767	398.794.437	334.872.300	415.172.737	415.172.737	471.237.393	366.323.799	90.140.444	-	-
Program Pengembangan Ekspor	196.126.784	225.455.891	270.000.000	565.000.000	570.000.000	173.457.184	195,688,917	242.821.051	-	-
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	0	81.818.485	-	150.000.000	150.000.000	0	72,184,219	-	-	-
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	792.665.489	1.075.241.964	360.000.000	607.653.750	724.914.438	738.791.240	1,058,101,810	227.118.382	-	-

Pada periode 2022–2024, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan kinerja yang konsisten dan efektif. Anggaran meningkat dari Rp19,94 miliar pada 2022 menjadi Rp21,91 miliar pada 2024, dengan realisasi yang juga tumbuh dari Rp17,60 miliar menjadi Rp20,39 miliar. Persentase realisasi berada pada kisaran 88–93%, mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran. Kenaikan pada 2024 menandakan penguatan kapasitas operasional dan dukungan terhadap misi peningkatan kualitas layanan publik serta efisiensi birokrasi yang menjadi bagian penting Renstra.

Berbeda dengan itu, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri mengalami penurunan anggaran dan realisasi. Dari Rp2,46 miliar di 2022, anggaran menyusut menjadi Rp1,95 miliar di 2024. Realisasi pun turun drastis dari Rp1,84 miliar pada 2022 menjadi hanya Rp671 juta pada 2024. Rasio realisasi yang hanya 34,3% pada 2024 mengindikasikan perlambatan dalam pelaksanaan program hilirisasi industri dan pembinaan IKM, padahal Renstra 2025–2029 menekankan percepatan pengembangan IKM, sentra produksi, dan sertifikasi produk.

Hal serupa terlihat pada Program Pengendalian Izin Usaha Industri, di mana anggaran turun dari Rp216 juta pada 2022 menjadi Rp75 juta pada 2024. Realisasi juga menyusut hingga hanya Rp39 juta pada 2024. Tren ini menunjukkan penurunan aktivitas izin industri, sementara Renstra menargetkan peningkatan investasi sektor industri berbasis green economy dan energi terbarukan.

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) bahkan mengalami penghentian anggaran pada 2024. Dari Rp131 juta pada 2022, anggaran turun menjadi Rp45 juta pada 2023 dan nol pada 2024. Realisasi yang sebelumnya mencapai 91,9% di 2022 juga berhenti di 2024. Hal ini perlu diwaspadai karena agenda digitalisasi industri, termasuk integrasi data IKM, merupakan salah satu prioritas Renstra.

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan mengikuti pola serupa. Dari anggaran Rp309 juta pada 2022, angka tersebut turun menjadi Rp0 pada 2024. Realisasi yang mencapai Rp252 juta pada 2022 dan Rp172 juta pada 2023 menunjukkan perlunya reformasi menuju perizinan berbasis OSS yang lebih modern dan terintegrasi sebagaimana diarahkan dalam Renstra.

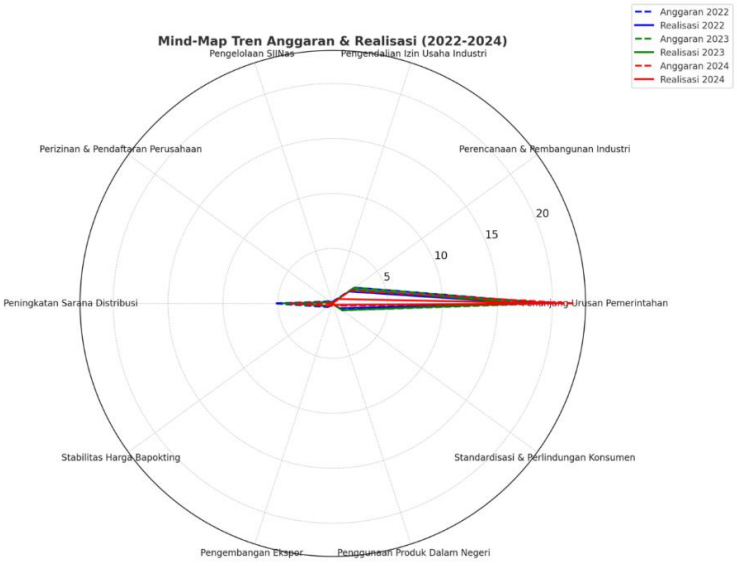
Tren yang lebih positif terlihat pada Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan hingga 2023, dengan anggaran Rp5,30 miliar pada 2022 dan realisasi Rp3,33 miliar. Pada 2023, realisasi melonjak menjadi Rp4,33 miliar dengan rasio realisasi 95,2%. Namun, pada 2024, realisasi turun tajam menjadi hanya Rp494 juta. Hal ini menunjukkan perlambatan dalam program revitalisasi pasar rakyat, yang padahal menjadi fokus utama Renstra untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan standar SNI di Pasar Rakyat.

Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) juga menunjukkan penurunan realisasi, dari Rp471 juta pada 2022 menjadi Rp90 juta pada 2024. Rasio realisasi yang hanya 26,9% pada 2024 menjadi perhatian serius, mengingat stabilitas harga bapok merupakan salah satu misi inti dalam Renstra untuk melindungi daya beli masyarakat. Di sisi lain, Program Pengembangan Ekspor menunjukkan tren positif. Anggaran meningkat dari Rp196 juta pada 2022 menjadi Rp270 juta pada 2024, dengan realisasi yang stabil di kisaran 86–89%. Program ini mendukung agenda promosi IKM dan peningkatan daya saing produk lokal di pasar ekspor, sesuai prioritas Renstra.

Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri terlihat tidak konsisten, hanya berjalan pada 2023 dengan anggaran Rp81 juta dan realisasi Rp72 juta. Padahal, program ini berperan penting dalam memperkuat rantai pasok lokal dan mendukung produk dalam negeri, sebuah aspek yang ditekankan dalam Renstra. Terakhir, Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen mencatat kinerja impresif pada 2023, dengan realisasi mencapai Rp1,05 miliar atau 98,4% dari anggaran. Namun, pada 2024 realisasi menurun menjadi Rp227 juta. Peningkatan sertifikasi pasar dan penguatan uji tera pada 2023 perlu dilanjutkan untuk menjaga konsistensi perlindungan konsumen sesuai target Renstra 2025–2029.

Secara keseluruhan, program dengan kinerja paling efektif adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Pengembangan Ekspor, dengan rasio realisasi stabil di atas 85%. Sebaliknya, Program Perencanaan Industri, Sarana Distribusi Perdagangan, dan Stabilitas Harga Bapokting menunjukkan penurunan kinerja pada 2024.

Tren positif pada program ekspor dan perlindungan konsumen mendukung misi “Cilegon Modern” yang berfokus pada daya saing dan inklusivitas ekonomi. Namun, sektor perizinan, digitalisasi (SIINas), dan distribusi memerlukan intervensi kebijakan yang lebih kuat agar sejalan dengan target Renstra 2025–2029.



Gambar 2.4 Mind MapTren Anggaran dan Realisasi

Analisis SWOT

1. **Perdagangan**:

   Kekuatan : Tingkat daya beli tinggi, cakupan pasar luas.

   Kelemahan : Belum optimalnya tata kelola pasar & integrasi data.

   Peluang : Peningkatan PAD dari retribusi pasar, potensi distribusi Pulau Jawa-Sumatera.

   Ancaman : PKL liar, produk berbahaya, belum ada BPSK.

2. **Perindustrian**:

   Kekuatan : Kontribusi tinggi pada PDRB, embrio kemitraan industri besar-IKM.

   Kelemahan : Akses modal dan legalitas minim, keterampilan SDM rendah.

   Peluang : Diversifikasi sektor (logam, sandang, pangan).

   Ancaman : Persaingan antar skala industri, isu limbah, belum adanya regulasi kemitraan IKM.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon dalam pengembangan pelayanan yaitu dengan mengetahui faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan arah organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi Kota Cilegon. Arah tersebut dilakukan dengan cara menetapkan tujuan dan strateginya secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan faktor kunci tersebut.

i. KELEMAHAN DAN KEKUATAN

Analisis Kekuatan Internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiyaan, sarana dan prasarana. Analisis lingkungan internal dikelompokan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (Weaknes) atau kekuatan (Strength) organisasi dalam mewujudkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon diantaranya :

A. KEKUATAN

1. Memiliki Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
2. Adanya pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan;
3. Tersedianya dana untuk menunjang kegiatan-kegiatan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
4. Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
5. Kebijakan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Adanya komitmen dan tanggung jawab yang besar dari pimpinan OPD.

B. KELEMAHAN

1. Belum dilakukannya analisis beban kerja yang merata pada setiap sub unit kerja sebagai bahan untuk analisis dan menentukan berapa kebutuhan aparatur tiap bidang;
2. Belum terpenuhinya proposionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi;
3. Belum optimalnya dukungan sarana, prasarana dan pemeliharaan serta operasional pasar rakyat menuju pasar rakyat bersih dan sehat yang Bersertifikat Standard Nasional;
4. Belum optimalnya pengendalian harga untuk stabilisasi/ harga komoditas sehingga tidak terjadi fluktuatif harga atau gejolak harga komoditas pangan dan lainnya;
5. Belum adanya koordinasi lintas sektor dalam rangka pembangunan urusan perdagangan untuk meningkatkan laju pertumbuhan perdagangan;
6. Belum optimalnya dukungan secara anggaran dan kinerja di setiap perangkat daerah dalam penanganan pengendalian inflasi;
7. Belum optimalnya penataan dan tata kelola pedagang kaki lima dalam rangka meningkatkan PAD.
8. Masih banyaknya IKM yang membutuhkan pembinaan-pembinaan untuk bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi IKM;
9. Belum optimalnya konektivitas rantai produksi industri kecil dan menengah (IKM) terhadap rantai produksi industri besar;
10. Belum adanya lokasi/ tanah untuk sentra IKM;
11. Belum adanya workshop untuk Dekranasda;

ii. PELUANG DAN ANCAMAN

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (opportunity) dan ancaman (threats) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Analisis lingkungan ekternal menghasilkan peluang-peluang di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon, diantaranya :

A. PELUANG

1. Adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pada Sektor Industri dan Perdagangan;
2. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang memadai;
3. Jumlah pelaku industri dan perdagangan yang cukup besar dan berkembang;
4. Sumber Daya Manusia yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan Industri dan Perdagangan;

B. ANCAMAN

1. Persaingan yang makin ketat pada era globalisasi;
2. Kebutuhan akan pelayanan di sektor perindustrian dan perdagangan lebih cepat, lebih murah sebagai perwujudan good governance yang masih membutuhkan perhatian;
3. Produksi Industri dan Perdagangan yang masih harus diperbaiki mengingat produk dari luar negeri sebagai pesaing makin banyak.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon memiliki peran strategis dalam pelayanan publik di bidang pengembangan industri dan fasilitasi perdagangan, yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemberdayaan pelaku usaha, serta perlindungan konsumen. Layanan yang diberikan mencakup pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM), fasilitasi promosi dan pemasaran, pengendalian harga dan distribusi bahan pokok, perlindungan konsumen, hingga penyelenggaraan kemitraan usaha dan pemberdayaan pelaku industri. Seluruh layanan tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk lokal, menjaga stabilitas ekonomi daerah, serta menciptakan iklim usaha yang inklusif, sehat, dan berkelanjutan. Kelompok sasaran layanan Disperindag sangat beragam, mencakup pelaku usaha, masyarakat sebagai konsumen, serta lembaga pendukung sektor industri dan perdagangan:

a. Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM)
   Sebagai sasaran utama pembinaan dan fasilitasi dalam bentuk pelatihan, perizinan usaha, kemudahan akses bahan baku dan pembiayaan, peningkatan kapasitas produksi, serta promosi produk lokal dalam dan luar negeri.

b. Pelaku Usaha Perdagangan dan Distribusi
   Sebagai mitra dalam penyediaan dan distribusi bahan pokok serta barang penting lainnya, serta penerima layanan fasilitasi perdagangan dalam dan luar negeri, termasuk penyelenggaraan pasar murah dan pameran dagang.

c. Masyarakat Konsumen
   Sebagai sasaran utama pengawasan dan perlindungan hak konsumen terhadap praktik perdagangan yang adil, jaminan mutu barang, serta stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok.

d. Asosiasi dan Lembaga Mitra Usaha (seperti KADIN, Dekranasda, HIPMI, CMM)
   Sebagai mitra kolaboratif dalam menyelenggarakan pelatihan, promosi, penjajakan pasar, hingga kemitraan strategis antara IKM dengan dunia industri.

e. Lembaga Pendidikan dan Lembaga Sertifikasi
   Sebagai mitra dalam peningkatan kapasitas SDM industri dan perdagangan, serta dukungan terhadap sertifikasi kompetensi dan produk untuk meningkatkan kualitas dan daya saing.

f. Perangkat daerah lintas sektor dan BUMD
   Sebagai mitra koordinasi dalam penguatan ekosistem industri-perdagangan, integrasi program lintas sektor, serta pengembangan kawasan industri dan perdagangan berbasis potensi daerah.

Untuk menyelenggarakan layanan secara efektif, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon memerlukan dukungan kolaboratif dari berbagai perangkat daerah dan mitra strategis eksternal. Kolaborasi ini berfungsi untuk menyinergikan kebijakan, memperluas jaringan usaha, serta mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi lokal.

Selain mendorong penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan di tingkat daerah, Disperindag juga menginisiasi pendekatan kolaboratif berbasis pentahelix, yakni sinergi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, masyarakat, dan media. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat jejaring kerja sama dalam upaya percepatan peningkatan kapasitas dan daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM). Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat mendorong transformasi IKM menjadi lebih profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memiliki akses yang lebih luas ke pasar regional maupun nasional.

Sebagai bentuk konkret dari strategi ini, sejumlah program didorong untuk diimplementasikan, antara lain penyelenggaraan forum tahunan “Cilegon IKM Summit” sebagai wadah pertukaran praktik baik dan peluang kemitraan; pengembangan kolaborasi riset terapan dengan perguruan tinggi untuk mendukung inovasi produk, desain, serta efisiensi proses produksi; dan pelaksanaan kampanye publik bertajuk “Bangga Produk Lokal Cilegon” guna memperkuat citra positif dan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan serta kualitas produk IKM lokal.

Berikut adalah perangkat daerah dan mitra kerja beserta peran strategisnya dalam mendukung layanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon:

Tabel 2.13 : Mitra Kerja Disperindag

Nama OPD	Peran Strategis	Keterkaitan dengan Program Disperindag
Bapperida Kota Cilegon	Menyelaraskan arah kebijakan & program pembangunan dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD).	Mengawal agar program/kegiatan Disperindag terintegrasi dengan prioritas daerah.
BPKPAD Kota Cilegon	Penyusunan dan asistensi anggaran APBD; memastikan efisiensi & akuntabilitas keuangan daerah.	Mendukung pembiayaan program penguatan industri & perdagangan Disperindag.
Bagian Organisasi Setda	Pembinaan SAKIP dan pendampingan penyusunan LAKIP; memastikan cascading IKU & evaluasi kinerja OPD.	Membantu meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Disperindag.
Inspektorat Kota Cilegon	Pengawasan dan reviu pelaksanaan program serta audit kinerja.	Menjamin program Disperindag tepat sasaran, efektif, & sesuai ketentuan.
Dinas Perhubungan Kota Cilegon	Mengatur lalu lintas, parkir, fasilitas jalan distribusi; mendukung akses ke pasar	Memastikan kelancaran distribusi barang dan kenyamanan aktivitas perdagangan.
DPMPTSP Kota Cilegon	Pelayanan perizinan usaha & penanaman modal secara terintegrasi melalui OSS.	Mempermudah perizinan IKM/industri & menarik investasi sesuai program Disperindag.
Diskominfo Kota Cilegon	Mengembangkan infrastruktur & sistem informasi digital; mendukung publikasi & pelayanan daring.	Mendukung digitalisasi data IKM, OSS, pemantauan harga, serta promosi produk lokal.

Dinas Pendidikan Kota Cilegon	Pengembangan SDM melalui pendidikan vokasi & keterampilan kewirausahaan.	Mendukung literasi kewirausahaan & kesiapan SDM industri/IKM lokal.
Dinas Koperasi & UKM	Pembinaan pelaku UMKM, akses pembiayaan, dan kemitraan.	Bersinergi dengan Disperindag dalam pemberdayaan IKM & penyerapan produk lokal.
Dinas PUPR & Perkim Kota Cilegon	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan distribusi & pasar rakyat.	Mendukung kelayakan sarana perdagangan dan distribusi industri.
Bagian Hukum Setda	Fasilitasi penyusunan regulasi, perjanjian kerja sama, dan pendampingan produk hukum daerah	Memastikan kepastian hukum dalam kebijakan & program Disperindag
BUMD	Penggerak ekonomi dalam penguatan ekosistem industri dan perdagangan.	Mendorong kemitraan local dan penciptaan lapangan kerja
Dekranasda	Menjadi etalase promosi produk daerah dan membina pelaku kriya dan IKM kreatif	Pendamping pelaku kriya dan IKM kreatif dalam promosi dan pameran produk lokal
KADIN, HIPMI, dan Asosiasi Usaha	Fasilitator pelatihan, kemitraan dan promosi usaha serta mendorong pembinaan usaha lokal	Memperkuat kemitraan industri dan pemerintah serta mendukung pengembangan IKM.
Dunia usaha dan perbankan	Pembuka akses pasar dan teknologi.	Berperan dalam program perluasan kesempatan kerja.
Lembaga Sertifikasi Produk	Menjamin mutu dan keamanan produk sesuai standar nasional dan internasional serta memberikan kepercayaan pasar terhadap produk IKM.	Mendukung program daya saing IKM dan akses pasar IKM.

Sinergi yang terbangun antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan berbagai pemangku kepentingan merupakan fondasi penting dalam memperkuat transformasi ekonomi daerah yang berbasis industri dan perdagangan berkelanjutan. Melalui pendekatan kolaboratif ini, diharapkan pertumbuhan sektor industri dan perdagangan di Kota Cilegon mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing daerah dalam skala regional maupun nasional.

2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan dan isu strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilakukan melalui evaluasi terhadap capaian kinerja pelayanan, analisis kondisi internal dan eksternal organisasi, serta penelaahan terhadap dinamika kebijakan pembangunan industri dan perdagangan di tingkat nasional, regional, dan lokal. Pemahaman yang komprehensif terhadap tantangan aktual menjadi dasar dalam merumuskan strategi pelayanan yang responsif, adaptif, dan berkelanjutan. Permasalahan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon Tahun 2025–2029 dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator kinerja pelayanan, hasil penelaahan Rancangan Awal RPJMD 2025–2029, kondisi faktual daerah, serta hasil penjaringan masukan dari pelaku industri, pelaku perdagangan, dan pemangku kepentingan terkait. Permasalahan-permasalahan ini menggambarkan kesenjangan antara kondisi layanan saat ini dengan kondisi ideal yang seharusnya tercapai dalam penguatan sektor industri dan perdagangan daerah.

Berikut ini sajian identifikasi permasalahan utama berdasarkan sumber-sumber tersebut:

Tabel 2.14: Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

N0	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Sarana perdagangan yang ada belum sesuai standar untuk mendukung perkembangan perdagangan di Kota Cilegon	Belum optimalnya pengelolaan dan peningkatan sarana perdagangan	Minimnya revitalisasi Sarana prasarana perdagangan yang sesuai standar
			Belum optimalnya Sumber Daya dan fasilitas untuk menerapkan standar dalam sarana perdagangan
			Belum optimalnya kerjasama dengan stakeholder terkait pembangunan sarana dan prasarana perdagangan yang sesuai standar
2.	Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok	Kurang terkendalinya kenaikan harga barang kebutuhan pokok	Ketergantungan pasokan dari luar daerah
			Belum adanya kebijakan terkait penangan rantai pasok untuk kebutuhan pokok

			Belum optimalnya kerjasama antar daerah
3.	Belum adanya Pelaku usaha yang di Fasilitasi Ekspor	banyak pelaku usaha belum mampu atau belum mendapatkan akses yang memadai untuk menembus pasar ekspor	kurangnya pemahaman dan kapasitas pelaku usaha mengenai regulasi, standar produk dan strategi ekspor
			terbatasnya fasilitas dan dukungan akses terhadap pendampingan, pembiayaan serta infrastruktur logistik yang mendukung ekspor
			ketatnya persyaratan di pasar internasional dan tingginya persaingan dengan produk dari negara lain
4.	Rendahnya Jumlah Pelaku usaha yang Berpartisipasi dalam Promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	banyaknya pelaku usaha belum aktif dalam program promosi dan pemasaran produk dalam negeri	kurangnya informasi dan akses terhadap program promosi
			terbatasnya kapasitas pelaku usaha dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran termasuk pemanafaatan digital marketing
			biaya promosi yang tinggi dan minimnya dukungan insentif dari pemerintah daerah terhadap pelaku usaha kecil
5.	Rendahnya Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	banyak pelaku usaha belum memiliki izin usaha atau dokumen legalitas yang lengkap	Kurangnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya izin usaha
			Kompleksitas prosedur perizinan
			kurangnya pendampingan dalam proses pengurusan izin
6.	Belum optimalnya Pembangunan Industri kota	Belum optimalnya Implementasi Rencana dan Pembangunan Industri Kota	Belum terselesaikannya proses penetapan rencana dan pembanungan industri kota
			Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan provinsi dalam porses penetapan rencana dan pembanungan industri kota

			Belum adanya TIM yang menjalankan rencana dan pembangunan industri kota
7.	Belum optimalnya Pembangunan Industri kotaBelum Optimalnya Pendataan dan Pengendalian Izin usaha industri di Kota Cilegon	Belum optimalnya pendataan, pemantauan dan pengawasan IKM	Belum optimalnya Sumber Daya yang dimiliki baik internal maupun eksternal terkait pemahaman perizinan sektor industri
			Kurangnya kesadaran pelaku usaha terkait perizinan sektor industri
			Belum adanya kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong optimalisasi terkait perizinan sektor industri
8.	Belum optimalnya pelayanan kemetrologian	Kurangnya pelayanan dan pengawasan kemetrologian	Belum optimalnya pelolaan data potensi UTTP yang wajib tera dan tera ulang
			Minimnya penyediaan peralatan dan fasilitas yang mendukung terhadap pelayanan kemetrologian
			terbatasnya Sumber Daya yang memadai dalam meningkatkan pelayanan kemetrologian
			Kurangnya kesadaran Masyarakat untuk melakukan wajib tera dan tera ulang

Analisis keterkaitan antara permasalahan pokok dengan arah strategis Renstra Disperindag Kota Cilegon 2025–2029 menunjukkan bahwa identifikasi permasalahan utama menjadi pondasi penting dalam merumuskan program prioritas, seperti:

1. Belum optimalnya sarana perdagangan direspons dengan program revitalisasi pasar rakyat, peningkatan infrastruktur distribusi, serta pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Pasar Rakyat.
2. Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok ditangani melalui program stabilisasi harga, pembentukan BUMD Pangan, dan penguatan sistem informasi distribusi untuk menjaga keterjangkauan harga.
3. Masalah kurangnya fasilitasi ekspor bagi pelaku usaha dijawab dengan program pengembangan ekspor dan kemitraan antara industri besar dan IKM.
4. Rendahnya legalitas usaha meliputi izin, sertifikasi, SNI, maupun halal diatasi dengan program perizinan, pendaftaran perusahaan, serta standardisasi dan perlindungan konsumen.

5. Belum optimalnya pelayanan metrologi juga menjadi fokus melalui penguatan bidang Metrologi Legal, termasuk penambahan alat tera dan tera ulang.

Selain itu, peran OPD dan mitra strategis sangat menentukan keberhasilan implementasi Renstra. Identifikasi permasalahan utama dan pemetaan aktor penting seperti Bapperida, BPKPAD, Diskominfo, Dinas Koperasi & UKM, serta KADIN yang memiliki kontribusi nyata dalam mendukung penguatan sektor industri dan perdagangan. Renstra Disperindag 2025–2029 menekankan pentingnya kolaborasi lintas OPD, misalnya sinergi dengan Dinas PUPR/Perkim untuk revitalisasi pasar rakyat, koordinasi dengan Diskominfo untuk digitalisasi data IKM dan OSS, serta kerja sama dengan Dekranasda, HIPMI, dan KADIN untuk pendampingan UMKM dan promosi dagang. Dukungan dunia usaha dan perbankan juga diperlukan untuk memperluas akses pembiayaan serta investasi.



Gambar 2.5 Tren Anggaran dan Realisasi

Dari segi isu strategis, temuan seperti rendahnya daya saing IKM, keterbatasan logistik, serta lemahnya pelayanan kemetrologian—selaras dengan analisis SWOT dalam Renstra. Tantangan utama terletak pada aspek legalitas dan tata kelola pasar yang belum optimal. Namun, terdapat peluang besar melalui digitalisasi perdagangan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pasar, dan hilirisasi industri di Cilegon. Ancaman yang perlu diantisipasi meliputi persaingan global yang semakin ketat dan isu lingkungan terkait limbah industri.

2.3 Isu Strategis

Perumusan isu strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon Tahun 2025-2029, ditinjau melalui :

1. Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan Perangkat Daerah;
3. Telaahan Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah; dan
4. Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah baik Global, Nasional maupun Regional.

Perumusan Isu Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.15 : Isu Strategis Perangkat Daerah

NO	Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
				Global	Nasional	Regional	
1.	Posisi strategis Kota Cilegon sebagai pintu gerbang masuk Pulau Jawa	Belum optimalnya implementasi rencana pembangunan industri kota	Transformasi ekonomi dengan urgensi karena diversifikasi belum optimal dan ketergantungan dengan industri	Perkembangan teknologi yang akan menggantikan pekerjaan saat ini, krisis lapangan pekerjaan, krisis utang, konfrontasi geoekonomi	Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia:	Banten: pembangunan ekonomi yang belu optimal yaitu belum meratanya pertumbuhan, pengembangan sektor unggulan dan potensial belum optimal, belum optimalnya inovasi untuk produktivitas dan investasi	Masih lemahnya kolaborasi antara pelaku industri dengan dunia pendidikan dan dunia kerja serta meningkatkan produktivitas IKM
2.	Potensi ekonomi Kota Cilegon sebagai Kota yang memiliki Kawasan peruntukan industri	Belum optimalnya pendataan, pemantauan dan pengawasan industri kecil menengah		Peningkatan urbanisasi dunia: penduduk perkotaan 65% dan peranan Produk Domestik Bruto (PDB) 70%	Penerapan standar sustainability yang tinggi di level global: produk Indonesia harus berorientasi ramah lingkungan agar tetap bersaing di pasar global	Jawa-Bali: Masih tingginya kesenjangan pembangunan antarwilayah karena persebaran pusat ekonomi yang tidak merata, belum optimalnya pemerataan teknologi dalam pengembangan sektor pertanian, belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran	Terbatasnya Pengembangan Kawasan Industri berbasis potensi wilayah dan daya dukung lingkungan dan fasilitas pendukung untuk pengembangan Sentra IKM
3. 3		Belum optimalnya pengelolaan dan peningkatan saran perdagangan		Perubahan konstelasi perdagangan global: perdagangan global tumbuh 3,4% per tahun			Masih terbatasnya inovasi dan pembaruan sistem perdagangan daerah termasuk penguatan pasar rakyat, pemanfaatan teknologi distribusi dan pelayanan kemetrologian.

Renstra Disperindag 2025–2029 menetapkan lima pilar program prioritas:

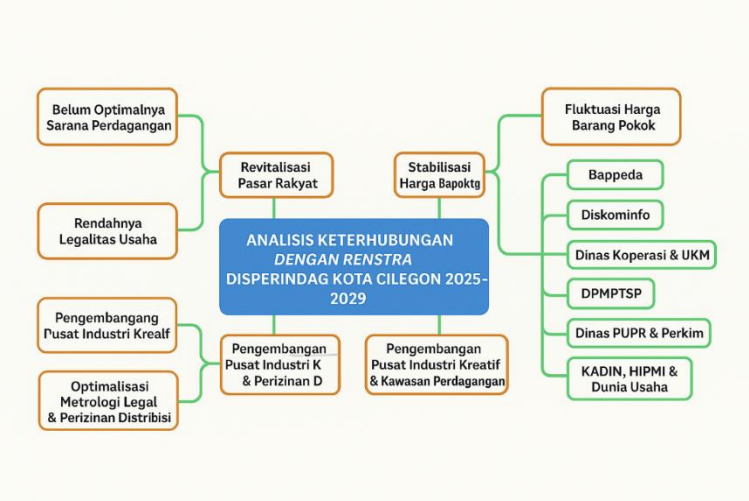
1. Revitalisasi dan penataan pasar rakyat untuk memastikan standar fasilitas perdagangan;
2. Penguatan stabilisasi harga bahan pokok dan barang penting;
3. Pengembangan pusat industri kreatif dan kawasan perdagangan;
4. Penguatan produk IKM serta transformasi digital; dan
5. Optimalisasi pelayanan metrologi legal dan perizinan distribusi.

Kelima pilar tersebut dirancang agar langsung menyasar akar masalah yang teridentifikasi. Sebagai rekomendasi integratif, penting untuk melakukan pemetaan masalah dan program secara sistematis agar setiap akar permasalahan terukur dalam indikator kinerja Renstra, misalnya:

1. Jumlah pasar yang memenuhi SNI;
2. Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan penting (sesuai HET);
3. Persentase IKM yang telah tersertifikasi antara lain halal, SNI, TKDN;
4. Penguatan dalam aspek sinkronisasi lintas OPD, terutama dengan Bapperida, Diskominfo, dan DPMPTSP.

Rencana aksi tahunan perlu dipertegas untuk memastikan sinergi lintas program dan antar perangkat daerah berjalan secara efektif dan terarah.

Di sisi lain, pendekatan digitalisasi dan green industry perlu diperkuat melalui penyusunan roadmap e-commerce bagi pelaku IKM, serta perencanaan bertahap penerapan industri hijau yang sejalan dengan sasaran RPJPN 2045. Dengan perencanaan yang terintegrasi dan berbasis data, Renstra Disperindag Kota Cilegon 2025–2029 diharapkan mampu mendorong transformasi sektor industri dan perdagangan yang inklusif, adaptif terhadap perubahan teknologi serta berkelanjutan secara lingkungan dan teknologi.



Gambar 2.6 Analisis Keterhubungan dengan Renstra Disperindag Kota Cilegon 2025-2029

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan

Untuk mewujudkan pertumbuhan sektor industri dan perdagangan daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan, Disperindag Kota Cilegon menetapkan arah strategi melalui penguatan tata kelola, kelembagaan, dan kolaborasi lintas sektor.

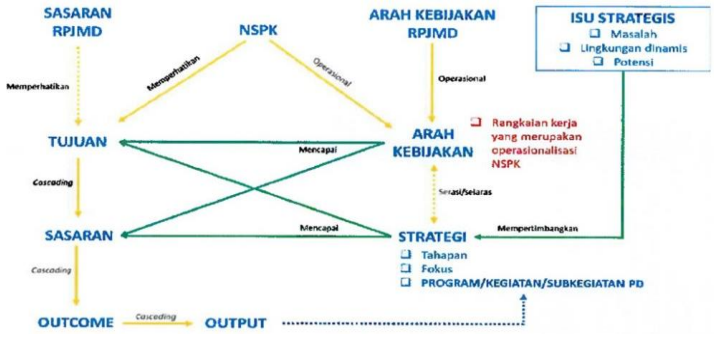
Strategi peningkatan kapasitas SDM dan daya beli masyarakat diarahkan melalui penguatan sektor perdagangan dan industri. Fokus dilakukan pada penataan Pasar Rakyat yang mengacu pada standar SNI, termasuk pengelolaan zonasi, legalitas pedagang, fungsi sosial pasar, serta kolaborasi lintas OPD dalam penyediaan infrastruktur, kebersihan, mitigasi kebencanaan, dan kenyamanan pengunjung.

Untuk memperkuat daya saing perdagangan, perhatian diarahkan pada pengembangan sistem distribusi, pengawasan harga dan produk berbahaya, serta pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai perlindungan bagi konsumen.

Di sektor industri, strategi diarahkan pada penguatan sentra IKM melalui fasilitasi sertifikasi, promosi produk lokal, dan kemitraan antar skala industri dalam rantai pasok lokal. Pemanfaatan lahan strategis seperti koridor JLU untuk pengembangan sentra IKM menjadi bagian dari pendekatan kawasan.

Prioritas pembangunan terfokus pada tata kelola pasar rakyat, sistem informasi distribusi, pengembangan pasar grosir (wholesale market), pembentukan BUMD Pangan, edukasi konsumen, serta penyelenggaraan promosi dagang dalam rangkaian Hari Jadi Kota Cilegon.

Disperindag memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun masih menghadapi tantangan seperti rendahnya legalitas IKM, keterbatasan akses pembiayaan, serta lemahnya sistem pengawasan distribusi. Untuk itu, diperlukan pendekatan kolaboratif, integratif, dan inovatif, termasuk transformasi digital industri, penguatan legalitas usaha, serta akselerasi pemasaran produk lokal secara berkelanjutan.



Gambar 3 1 Konsep Renstra Perangkat Daerah

DIAGRAM ALUR RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA CILEGON 2025-2029



Terwujudnya pertumbuhan industri dan perdagangan daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan



SASARAN

1. Terwujudnya Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang Akuntabel dan Profesional
2. Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan
3. Meningkatnya Daya Saing Sektor Perindustrian



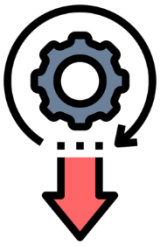
INPUT

1. SDM (190 aparatur)
2. Aset tetap (Rp 134,91 miliar)
3. Anggaran Program



PROSES

1. Sentra Industri Kecil Menengah
2. Pembangunan dan optimalisasi pasar rakyat
3. Pengembangan Kawasan Perdagangan
4. Digitalisasi layanan publik
5. Penguatan distribusi barang pokok
6. Fasilitasi ekspor
7. Pelatihan & pendampingan usaha



OUTPUT

1. Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi
2. Tingkat kepuasan pengunjung pasar terhadap layanan sarana perdagangan
3. Tingkat stabilitas harga pangan dan bahan pokok
4. Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan
5. Persentase Pelaku Usaha yang di fasilitasi Ekspor
6. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
7. Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kesil dan Idustri
8. Persentase realisasi rencana pembangunan industri kota (RPIK)
9. Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam pengisian data SIINAS



1. Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efesien, merata dan terintegritas
2. Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
3. Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor
4. Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
5. Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha
6. Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk
7. Meningkatnya realisasi pembangunan industri
8. Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian
9. Meningkatnya pemanfaatan informasi industri



Kota Cilegon menjadi pusat industri dan perdagangan yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.

3.2 Sasaran

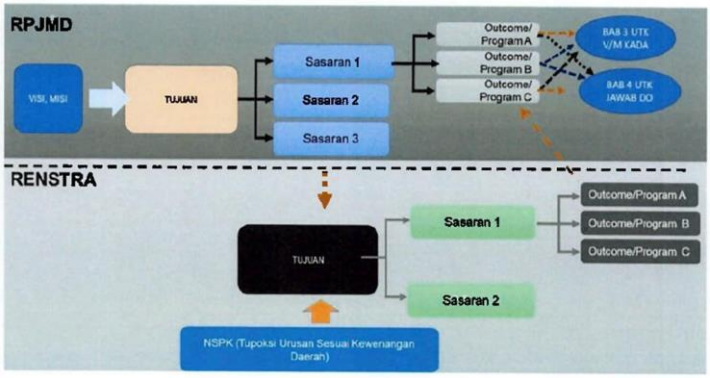
3.2.1 Terwujudnya Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang Akuntabel dan Profesional

Sasaran Terwujudnya Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang Akuntabel dan Profesional mencakup beberapa aspek strategis yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan kelembagaan. Dari sisi tata kelola, sasaran ini diukur melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang selaras dengan prinsip-prinsip SAKIP dan SPIP. Implementasi sistem pelaporan dan pengawasan internal yang efisien dan akurat menjadi kunci dalam menjaga konsistensi pelaksanaan program.

Dari sisi sumber daya manusia dan organisasi, sasaran ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas dan profesionalitas aparatur, melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi teknis, serta pembinaan terhadap kinerja berbasis capaian indikator yang terukur. Sementara itu, dari sisi pelayanan publik, sasaran ini berfokus pada peningkatan efisiensi dan kecepatan layanan melalui penerapan sistem informasi berbasis digital yang memudahkan masyarakat dan pelaku usaha dalam mengakses layanan, seperti sistem pendataan IKM di SIINas, dan pengawasan barang beredar.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, keberhasilan sasaran ini dapat dilihat dari:

- meningkatnya nilai evaluasi SAKIP dinas secara konsisten;
- tersusunnya laporan kinerja tepat waktu dan berbasis data;
- meningkatnya penggunaan sistem informasi digital dalam pelayanan publik;
- serta meningkatnya tingkat kepuasan pengguna layanan (pelaku usaha dan masyarakat).



Gambar 3 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan

3.2.2 Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan

Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan adalah pilar utama dalam upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Sektor perdagangan, sebagai urat nadi perekonomian, memegang peranan krusial dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan daya saing di sektor ini bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan.

Untuk memperkuat daya saing perdagangan, perhatian diarahkan pada:

a. Fasilitasi Sarana Perdagangan

Peningkatan daya saing sektor perdagangan sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas sarana perdagangan. Ini mencakup modernisasi dan pengembangan Pasar Rakyat menjadi pasar rakyat yang bersih, nyaman, dan terintegrasi dengan teknologi digital, sehingga mampu bersaing dengan pasar modern. Selain itu, pengembangan pusat-pusat distribusi logistik yang efisien, seperti gudang berpendingin dan sentra pengumpulan produk, akan memangkas biaya dan waktu distribusi. Dukungan terhadap platform e-commerce dan literasi digital bagi pelaku usaha, terutama UMKM, juga krusial agar mereka dapat memanfaatkan potensi pasar online yang luas. Kita juga perlu memastikan aksesibilitas modal dan pembiayaan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan sarana dan prasarana mereka.

b. Pengembangan ekspor

Selain itu mendorong ekspor adalah kunci untuk memperluas pasar dan meningkatkan skala ekonomi produk-produk lokal. Upaya ini meliputi identifikasi produk unggulan yang memiliki potensi ekspor tinggi, pendampingan bagi UMKM untuk memenuhi standar kualitas dan sertifikasi internasional, serta promosi produk di kancah global melalui pameran dagang dan misi dagang. Fasilitasi akses informasi pasar global, negosiasi perjanjian dagang bilateral maupun multilateral yang menguntungkan, serta penyederhanaan prosedur kepabeanan dan logistik ekspor akan sangat membantu para eksportir. Selain itu, pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang perdagangan internasional menjadi prioritas untuk menghadapi tantangan pasar global.

c. Stabilisasi Harga Komoditas Pokok

Fluktuasi harga komoditas pokok yang tidak terkendali dapat menggerus daya beli masyarakat dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, sasaran stabilisasi harga menjadi sangat penting. Ini dilakukan melalui sistem pemantauan harga yang akurat dan real-time, pengelolaan stok dan pasokan yang efektif, serta intervensi pasar yang tepat sasur ketika terjadi gejolak harga. Kolaborasi erat antara pemerintah, petani/produsen, dan distributor diperlukan untuk memastikan ketersediaan pasokan yang cukup dan distribusi yang lancar, sehingga harga tetap stabil dan terjangkau bagi konsumen, sekaligus memberikan keuntungan yang wajar bagi produsen.

d. Penguatan Kemetrologian

Kemetrologian, sebagai ilmu pengukuran, memegang peranan vital dalam menciptakan keadilan dan kepercayaan dalam transaksi perdagangan. Penguatan kemetrologian berarti peningkatan kualitas dan akurasi alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang digunakan dalam perdagangan. Ini meliputi pengawasan dan tera/tera ulang UTTP secara berkala untuk memastikan kebenaran ukuran, serta penegakan hukum terhadap praktik kecurangan dalam pengukuran. Dengan sistem kemetrologian yang andal, konsumen akan terlindungi dari kerugian dan pelaku usaha dapat beroperasi dengan kepastian hukum, sehingga menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan berinteritas.

Dengan berfokus pada keempat aspek ini, kita tidak hanya akan meningkatkan daya saing sektor perdagangan, tetapi juga memperkuat fundamental ekonomi nasional secara keseluruhan. Peningkatan daya saing ini akan memacu investasi, menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkualitas, serta pada akhirnya, meningkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

3.2.3 Meningkatnya Daya Saing Sektor Perindustrian

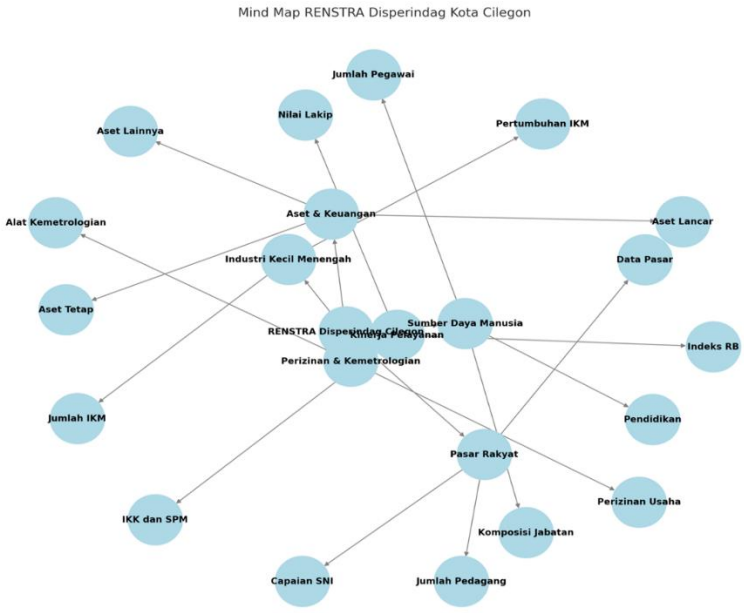
Sasaran “Meningkatnya Daya Saing Sektor Perindustrian” diarahkan untuk menghasilkan sektor industri di Kota Cilegon yang lebih kompetitif, adaptif, dan berkelanjutan dalam jangka menengah. Hasil yang diharapkan dari sasaran ini mencakup peningkatan kualitas dan kapasitas produksi pelaku industri lokal, bertambahnya jumlah industri yang bersertifikasi standar nasional maupun internasional, serta terbentuknya ekosistem industri yang terintegrasi dan berbasis potensi unggulan daerah.

Secara khusus, peningkatan daya saing ini ditandai dengan tumbuhnya jumlah IKM yang memiliki nilai tambah tinggi, peningkatan jumlah tenaga kerja industri yang memiliki kompetensi tersertifikasi, serta terbentuknya klaster industri yang mampu bersinergi dalam rantai pasok. Dalam lima tahun ke depan, sasaran ini diharapkan mampu mendukung pencapaian pertumbuhan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Cilegon, memperluas akses pasar produk industri lokal, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah berbasis pengolahan dan manufaktur.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, keberhasilan sasaran ini dapat dilihat dari:

- Meningkatnya jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan,
- Bertambahnya pelaku usaha yang memiliki sertifikasi standar mutu,
- Terbentuknya sentra IKM,
- Serta meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Cilegon.

Dengan strategi yang tepat dan dukungan lintas sektor, diharapkan daya saing sektor perindustrian kota cilegon dapat tumbuh secara berkelanjutan dan inklusif, membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.



Gambar 3.3 Mind Map Renstra Disperindag Kota Cilegon

Tabel 3.1: Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
3.31.3.30.0.00.02.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN											
- S.2.1 - Terwujudnya ekosistem dan ruang pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Terwujudnya pertumbuhan industri dan perdagangan daerah yang berdaya saing inklusif dan berkelanjutan		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase)	0	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	
			Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (Persentase)	0	56,16	56,16	56,16	56,16	56,16	56,16	
		Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Indeks Harga Konsumen (poin)	107,2	109,32	111,48	113,69	115,94	118,24	120,58	
		Meningkatnya Daya Saing Sektor Perindustrian	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)	21,65	5	5	5	5	5	5	
		Terwujudnya Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (poin)	82,006	82,01	82,02	82,03	82,04	82,05	82,06	

3.3 Strategi

3.3.1. Meningkatkan tata Kelola organisasi melalui perencanaan, penganggaran dan pelaporan berbasis kinerja yang terintegrasi dengan SPBE dan e-sakip

Strategi ini berfokus pada integrasi menyeluruh dari tiga pilar utama manajemen kinerja: perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Selama ini, seringkali ketiga proses ini berjalan secara parsial atau kurang terhubung, menyebabkan inefisiensi dan kesulitan dalam mengukur capaian riil. Melalui integrasi ini, kita memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan memiliki dasar perencanaan yang kuat dan setiap kegiatan yang dilakukan berkontribusi pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

3.3.2. Mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk efisiensi pelayanan

Strategis meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik melalui Penerapan Sistem Informasi dan Penguatan Pengendalian Internal adalah komitmen kuat untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, dan berdaya guna bagi masyarakat. Dalam era digital ini, efisiensi bukan lagi sekadar harapan, melainkan sebuah keharusan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Strategi ini berdiri di atas dua pilar utama yang saling melengkapi: penerapan sistem informasi dan penguatan pengendalian internal. Keduanya adalah kunci untuk mengubah proses birokrasi yang kompleks menjadi alur kerja yang ramping, akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi

3.3.3. Penguatan daya saing perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan sektor perdagangan yang berdaya saing inklusif dan berkelanjutan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menetapkan arah pembangunan yang berfokus pada peningkatan daya saing produk lokal serta penciptaan ekosistem perdagangan yang sehat, aman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Upaya peningkatan daya saing sektor perdagangan dilakukan dengan mendorong fasilitasi pemasaran produk lokal melalui berbagai bentuk promosi dan pameran dagang, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Disperindag juga terus memperluas jejaring kerja sama kemitraan antar pelaku usaha dan pemangku kepentingan strategis lainnya, guna membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal, khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Di sisi infrastruktur, pengembangan dan revitalisasi sarana perdagangan seperti pasar rakyat, gudang logistik, serta fasilitas distribusi lainnya diarahkan untuk mendukung perdagangan yang inklusif, aman, tertib, dan ramah lingkungan. Pasar-pasar rakyat tidak hanya ditata ulang dari sisi fisik, tetapi juga ditingkatkan manajemen pengelolaannya agar lebih profesional dan berbasis pelayanan publik yang transparan serta akuntabel.

Selaras dengan itu, aspek perlindungan konsumen menjadi perhatian utama dalam membangun iklim perdagangan yang sehat. Disperindag secara aktif melakukan pengawasan terhadap peredaran barang, termasuk barang-barang kebutuhan pokok dan produk industri, untuk memastikan kesesuaian dengan standar mutu, keamanan, dan ketentuan regulasi yang berlaku. Edukasi konsumen juga digencarkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih produk yang aman dan legal.

Dengan pendekatan yang menyeluruh tersebut, Disperindag berharap dapat memperkuat struktur perdagangan lokal yang adaptif terhadap perubahan, berpihak pada pelaku usaha kecil, serta menjamin perlindungan bagi konsumen. Hal ini sejalan dengan tujuan strategis daerah dalam menciptakan sistem perdagangan yang inklusif, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan sebagai pilar pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh.

3.3.4. Transformasi IKM menuju naik kelas dan berdaya saing

Dalam sektor industri, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada penguatan kapasitas dan peningkatan daya saing pelaku industri lokal, khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) akan mengembangkan pendekatan bertahap dan berkelanjutan melalui penguatan kualitas sumber daya manusia industri, peningkatan kualitas produk, serta perluasan akses pasar.

Strategi ini dilaksanakan melalui penyediaan layanan pendampingan usaha, pelatihan vokasional yang berbasis kebutuhan pasar kerja, serta fasilitasi sertifikasi mutu produk dan kompetensi tenaga kerja. Fasilitasi juga diberikan dalam bentuk bimbingan teknis, manajerial, hingga akses informasi dan jaringan usaha, sehingga pelaku IKM memiliki kesiapan untuk bersaing di pasar nasional maupun global.

Disperindag juga akan mendorong pelaku IKM untuk melakukan transformasi menuju IKM naik kelas, yakni pelaku usaha yang tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang secara mandiri, menguasai inovasi teknologi, dan terhubung dalam rantai nilai industri. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga memperkuat kualitas, daya saing, dan keberlanjutan usaha.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan industri yang berkelanjutan, Disperindag tetap akan mendorong penerapan prinsip-prinsip industri hijau melalui edukasi, fasilitasi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta advokasi efisiensi energi dan pengurangan limbah. Meskipun pengembangan klaster industri belum menjadi bagian dari rencana induk yang ada, upaya memperkuat sinergi antar pelaku industri akan tetap dilaksanakan melalui pembinaan kolektif dan pemetaan potensi sektor unggulan.

Selanjutnya, penguatan kemitraan strategis antara industri besar dan IKM juga akan menjadi prioritas, khususnya dalam hal alih teknologi, pendampingan produksi, hingga perluasan pasar. Kolaborasi ini diharapkan mampu membuka akses dan peluang baru bagi IKM lokal untuk bertransformasi menjadi pelaku industri yang tangguh, modern, dan responsif terhadap dinamika pasar.

Dengan strategi tersebut, Disperindag berharap terwujudnya sektor industri daerah yang tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitas melalui lahirnya IKM-IKM naik kelas yang siap bersaing, berdaya saing inklusif, dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Cilegon.

3.4. Arah Kebijakan Strategis

3.4.1 Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sebagai upaya mendukung terwujudnya visi Kota Cilegon yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menetapkan arah kebijakan strategis yang difokuskan pada penguatan sektor industri dan perdagangan lokal, secara inklusif dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Sejalan dengan Misi 2, arah kebijakan Disperindag difokuskan untuk menciptakan peluang kerja dan usaha baru melalui pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta pemberdayaan pelaku usaha lokal. Langkah strategis dilakukan melalui fasilitasi pelatihan vokasional, pendampingan usaha, kemudahan perizinan, fasilitasi sertifikasi mutu dan keamanan produk serta pembukaan akses pasar. Program IKM Naik Kelas akan menjadi katalisator dalam mendorong tumbuhnya pelaku industri lokal yang profesional, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

Disperindag juga berkomitmen untuk memfasilitasi peningkatan akses pasar bagi pelaku usaha melalui program promosi dan pameran dagang, baik secara langsung maupun digital. Upaya membangun sistem kemitraan usaha antara industri besar dan pelaku IKM juga menjadi bagian penting dalam strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan saling menguntungkan.

Dalam mendukung Misi 4, Disperindag mendorong transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, arah kebijakan Disperindag didorong untuk mengadopsi teknologi dalam pelayanan publik dan penguatan data sektoral. Langkah ini diwujudkan melalui pengembangan sistem informasi serta pelaporan berbasis teknologi informasi.

Selain itu, kolaborasi lintas pemangku kepentingan melalui pendekatan pentahelix (pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat) diperkuat untuk mempercepat inovasi, penyelesaian masalah sektoral, dan penyesuaian terhadap dinamika global. Disperindag kedepan akan menginisiasi ruang kolaborasi strategis seperti forum bisnis, diskusi multi pihak, dan inkubasi usaha sebagai wadah untuk mendorong kolaborasi antara pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Selaras dengan Misi 6, arah kebijakan Disperindag menyasar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sarana perdagangan yang aman, inklusif, dan ramah lingkungan seperti revitalisasi pasar rakyat, penguatan fungsi distribusi logistik, dan peningkatan aksesibilitas produk lokal ke pasar yang lebih luas. Disperindag juga memperkuat kerja sama lintas daerah dan lintas sektor dalam hal produksi dan distribusi pangan serta barang kebutuhan pokok, guna menjamin ketersediaan, keterjangkauan harga, dan kelancaran pasokan, khususnya pada masa-masa rawan inflasi atau gangguan distribusi. Perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar juga diperkuat guna menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat dan adil.

Disperindag mengarahkan kebijakan pada penyediaan dan pengembangan sarana prasarana perdagangan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fokus diarahkan pada revitalisasi pasar rakyat, klasterisasi IKM atau pembenahan tata ruang perdagangan yang lebih tertata, bersih, aman, dan ramah lingkungan.

Disperindag juga terus mendorong pembentukan pusat-pusat perdagangan yang inklusif, mudah diakses, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Penguatan sistem distribusi barang kebutuhan pokok, pengendalian inflasi komoditas pangan strategis, serta pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen menjadi bagian integral dalam menjamin ekosistem perdagangan yang sehat dan melindungi masyarakat sebagai konsumen akhir.

Sebagai penunjang dari seluruh arah kebijakan di atas, Disperindag memperkuat regulasi dan tata kelola melalui penyesuaian kebijakan sektoral, penyusunan standar pelayanan, serta penyederhanaan prosedur perizinan. Upaya ini diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, mendorong kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta memperkuat daya tarik investasi di sektor industri dan perdagangan.

Seluruh arah kebijakan ini disusun untuk mendukung terwujudnya sektor industri dan perdagangan di Kota Cilegon yang maju, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan kolaborasi, inovasi, dan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Disperindag berkomitmen menjadi garda depan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya kompetitif secara global, tetapi juga berpihak pada kesejahteraan rakyat dan keberlangsungan lingkungan hidup.

Tabel 3.2 : Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Membantu Wali Kota dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tuugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas dukungan penyelenggaraan urusan pemerintahan	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik berbasis digital. 2. Mendorong transparansi, akuntabilitas, serta perencanaan dan pelaporan kinerja yang berbasis hasil.	
		Hilirisasi dan penguatan industri unggulan yang potensial dan berorientasi ekspor, baik pada industri padat karya terampil, padat modal maupun padat teknologi berbasis ekonomi sirkular	Program industri kecil dan menengah (IKM) naik kelas serta pemberdayaan pelaku usaha lokal dengan: 1. Fasilitasi pelatihaan vokasional; 2. Pendampingan usaha; 3. Kemudahan perizinan; 4. Fasilitasi sertifikasi mutu dan keamanan produk; dan 5. Pembukaan akses pasar.	
		Mengembangkan potensi sumber daya wilayah dan Kawasan strategis daerah sebagai wadah pertumbuhan sektor ekonomi		
		Optimalisasi fungsi pasar rakyat sebagai ruang publik multifungsi yang mendukung penumbuhan UMKM dan industri kreatif	Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sarana perdagangan yang aman, inklusif dan ramah lingkungan seperti: • Revitalisasi pasar rakyat; • Penguatan fungsi distribusi logistik; • Peningkatan aksesibilitas produk lokal ke pasar yang lebih luas	

3.4.2 Pentahapan Renstra 2025-2029

2025



Pada tahun 2025, Disperindag memulai optimalisasi 8 pasar rakyat sesuai target kumulatif Renstra. Kegiatan dimulai dengan perencanaan detail dan pembenahan infrastruktur Pasar Rakyat (penataan los, fasilitas sanitasi, pembinaan pedagang) untuk meningkatkan kebersihan dan kenyamanan. Anggaran program ini sekitar Rp 1,32 miliar pada 2025, dan di akhir tahun beberapa pasar percontohan sudah menampilkan output awal yang sesuai indikator “pasar rakyat yang bersih dan terkelola baik” serta “yang direvitalisasi”. Pada program stabilisasi harga Bapokting, Disperindag melakukan operasi pasar perdana dan menggelar pasar murah untuk menekan lonjakan harga kebutuhan pokok. Dalam pengembangan pusat industri kreatif dan kawasan perdagangan, tahun 2025 dialokasikan dana untuk perencanaan dua kawasan perdagangan strategis di Citangkil dan Jombang (masing-masing 1 unit). Sebagai langkah awal penguatan industri kreatif dan IKM, Disperindag memfasilitasi sekitar 2 IKM unggulan dengan pelatihan produk dan sertifikasi mutu, serta memulai koordinasi dengan pelaku ekonomi kreatif. Bidang metrologi legal menindaklanjuti capaian tahun sebelumnya (keterpenuhan tera 83,49% alat ukur) dengan meningkatkan uji tera timbangan di pasar dan pemberian izin distribusi ke toko swalayan besar, menyiapkan target 100% capaian di akhir periode.

2026



Pada 2026, proses revitalisasi pasar rakyat dituntaskan: delapan Pasar Rakyat telah selesai direnovasi (sesuai target kumulatif Renstra). Disperindag memastikan pasar-pasar ini terkelola baik, dengan fasilitas baru dan pelatihan pengelola pasar. Pembangunan Pasar Induk Merak mulai digenjot: pemerintah kota mengalokasikan anggaran lebih besar (misalnya naik dari Rp 200 juta menjadi Rp 300 juta) dan pengerjaan fisik utama dimulai. Pada sisi harga pangan, frekuensi intervensi pasar ditingkatkan: mulai 2026 Disperindag melaksanakan dua kali operasi pasar per tahun (naik dari sekali di 2025) dan kembali menggelar 8 pasar murah sepanjang tahun. Kawasan perdagangan Citangkil dan Jombang keduanya berhasil dikembangkan satu unit sesuai target, misalnya area pasar di Citangkil telah ditata ulang untuk kegiatan perdagangan. Disperindag menambah pendampingan dua IKM unggulan lagi, sehingga total IKM yang difasilitasi menjadi empat. Bersamaan itu program industri kreatif diperluas melalui pelatihan kewirausahaan kreatif dan penguatan jejaring pemasaran (terukur dalam indikator IKM/UKM kreatif dibina). Di bidang metrologi, uji tera dilanjutkan untuk alat ukur tambahan dan izin distribusi dikeluarkan bagi agen pangan baru, meningkatkan cakupan legalisasi distribusi.



2027

Pada 2027, Disperindag fokus pada operasionalisasi fasilitas yang telah dibangun. Semua pasar rakyat yang direvitalisasi dipelihara kualitasnya, dan Pasar Induk Merak pada tahap perencanaan. Kegiatan stabilisasi harga terus dijalankan sesuai rencana: dua operasi pasar reguler dan 8 pasar murah tetap diselenggarakan setiap tahun, menjaga harga pokok tetap stabil. Kawasan Citangkil dan Jombang berfungsi penuh sebagai sentra perdagangan lokal, melayani distribusi barang kebutuhan kawasan sekitarnya. Disperindag kembali memfasilitasi dua IKM unggulan baru (total kumulatif enam unit sejak 2025), dengan pendampingan pengembangan produk dan akses pasar. Program industri kreatif menghasilkan platform promosi tahunan bagi produk kreatif (indikatornya jumlah UKM kreatif yang dibina) , misalnya dengan menggelar pameran lokal. Di sektor metrologi, hampir semua alat ukur pasar telah dites tera, dan izin distribusi pangan telah diberikan secara luas, sehingga indikator “persentase alat ukur tertera” hampir tuntas menjelang akhir tahun.

2028



Pada 2028, capaian besar terwujud: Pasar Induk Merak mulai tahap pembangunan sebagai upaya menambah kapasaitas distribusi bahan pokok Kota secara signifikan. Kedelapan pasar rakyat tetap dioperasikan baik sehingga akses masyarakat ke pasar rakyat semakin lancar. Disperindag melanjutkan 8 pasar murah dan operasi pasar reguler setiap tahun untuk stabilisasi harga; indikator stabilitas harga (koefisien variasi) tercapai sesuai sasaran. Kawasan Citangkil dan Jombang diperkuat fungsinya. Disperindag kembali mendampingi 2 IKM baru (total 8 unit sejak 2025) yang menghasilkan produk unggulan masuk ke pasar nasional. Produk kreatif lokal dipromosikan aktif lewat pameran dan platform digital, mendekati target tersedianya ajang promosi tahunan. Di bidang metrologi legal, capaian 100% alat ukur tertera dan semua distributor pangan berizin sudah hampir tercapai, sesuai tugas pokok Disperindag dalam perlindungan konsumen.

2029



Tahun 2029 adalah tahun konsolidasi. Seluruh pasar rakyat (8 unit) yang direnovasi dan Pasar Induk Merak sudah beroperasi optimal, menjamin sarana distribusi pangan terjaga. Pengendalian harga pangan dijalankan rutin; target stabilitas tercapai dengan variasi harga rendah. Kawasan Citangkil dan Jombang telah menjadi pusat perdagangan kecamatan yang mandiri. Disperindag kembali memfasilitasi 2 IKM unggulan (sehingga total minimal 10 IKM sejak 2025) dengan fokus pada hilirisasi produk, mendorong peningkatan nilai tambah industri lokal. Program industri kreatif juga menunjukkan hasil: tercatat lebih banyak wirausaha kreatif baru dan platform digital aktif untuk produk lokal. Akhirnya, metrologi legal dipertegas secara permanen: seluruh pasokan pangan mengikuti standardisasi alat ukur, dan perizinan distribusi diperkuat sesuai kewenangan Disperindag, mengokohkan perlindungan konsumen selama lima tahun.

Tabel 3.3 : Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Optimalisasi 8 pasar rakyat, pembenahan infrastruktur (los, sanitasi, pembinaan pedagang), dan studi kelayakan Pasar Induk Merak	Optimalisasi 8 Pasar Rakyat, pengelolaan & pelatihan pengelola pasar dan penyusunan DED Pasar Induk Merak	Optimalisasi 8 Pasar Rakyat dan Pembangunan Pasar Induk Merak	Optimalisasi 8 Pasar Rakyat dan Pasar Induk Merak beroperasi optimal	Konsolidasi akhir periode, evaluasi 8 pasar rakyat & Pasar Induk Merak sebagai model pengelolaan
Operasi pasar perdana & pasar murah	2 kali operasi pasar & 8 pasar murah	1. 2 operasi pasar & 8 pasar murah rutin 2. Pemetaan dan penyajian informasi distribusi bapokting antara lain data agen dan distributor resmi seperti lpg, beras, gula, minyak goreng serta komoditas strategis lainnya	1. operasi pasar & 8 pasar murah rutin 2. pengadaan papan harga digital untuk menampilkan informasi harga di pasar rakyat	Operasi pasar & pasar murah tetap berjalan, hasil evaluasi menunjukkan stabilitas harga terjaga secara konsisten
Pengembangan 1 unit kawasan perdagangan di Kecamatan Citangkil	Pengembangan 1 unit kawasan perdagangan di Kecamatan Jombang	Penguatan fungsi kawasan Citangkil & Jombang	Kawasan Citangkil & Jombang mandiri sebagai pusat perdagangan	Kawasan Citangkil & Jombang diperkuat sebagai model pengembangan perdagangan kota.
Fasilitasi 2 IKM unggulan, pelatihan & sertifikasi mutu	Tambahan 2 IKM (total 4), pelatihan kewirausahaan kreatif	Tambahan 2 IKM (total 6), platform promosi kreatif tahunan dimulai	Tambahan 2 IKM (total 8), promosi nasional & digital	Tambahan 2 IKM (total 10), hilirisasi produk & platform kreatif aktif
Pemenuhan data potensi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.	1. Pengadaan awal peralatan dasar metrologi 2. Modernisasi peralatan (digitalisasi sistem tera)			

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program

Program merupakan satu kesatuan kegiatan yang dirancang untuk mencapai sasaran dan tujuan strategis perangkat daerah dalam kurun waktu tertentu, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), program menjadi instrumen utama pelaksanaan kebijakan pembangunan sektor industri dan perdagangan, yang dijabarkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan.

Setiap program memiliki sasaran yang terukur, indikator kinerja yang jelas, serta diarahkan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD. Program-program ini juga menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan menjadi bagian integral dari proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.

4.2 Kegiatan

Untuk mendukung terwujudnya sektor industri dan perdagangan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon melaksanakan kegiatan dalam 10 (sepuluh) program utama yang dirancang untuk meningkatkan kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha, kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegritas, pelaku usaha yang berorientasi ekspor, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, tertib niaga dan mutu produk, kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian, pemanfaatan informasi industri dan realisasi pembangunan industri sebagaimana tercantum dalam tabel 4.2 Program/ Kegiatan/Subkegiatan dan Tabel 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Pemerintah Kota Cilegon

4.3 Sub Kegiatan

Sub kegiatan adalah unit terkecil dari pelaksanaan suatu kegiatan yang merinci bagaimana kegiatan itu akan dilaksanakan, termasuk Langkah-langkah konkret, sumber daya yang dibutuhkan, dan output yang diharapkan. Penyusunan uraian subkegiatan dalam dokumen Renstra ini didasarkan pada struktur program dan kegiatan yang telah ditetapkan, dengan mengacu pada nomenklatur yang berlaku secara nasional sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam tabel 4.2 Program/ Kegiatan/Subkegiatan dan Tabel 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan Pemerintah Kota Cilegon.

Tabel 4.1 Program / Kegiatan / Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
3.31.3.30.0.00.02.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							
- S.2.1 - Terwujudnya ekosistem dan ruang pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Terwujudnya pertumbuhan industri dan perdagangan daerah yang berdaya saing inklusif dan berkelanjutan				Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ()		
					Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ()		
		Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan			Indeks Harga Konsumen (poin)		
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha		Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
				Capaian Kinerja Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
					Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	3.30.02.2.02.0001 - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
				Capaian Kinerja Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.03 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	
					Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri (Dokumen)	3.30.02.2.03 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	
					Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.03.0001 - Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	
					Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri (Dokumen)	3.30.02.2.03.0002 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Capaian Kinerja Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya (Laporan)	3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya (Laporan)	3.30.02.2.06.0001 - Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	3.30.02.2.06.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	
				Capaian Kinerja Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	3.30.02.2.07 - Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	
					Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	3.30.02.2.07.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efesien, merata dan terintegritas		Tingkat kepuasan pengunjung pasar terhadap layanan sarana perdagangan (poin)	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				Capaian Kinerja Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Capaian Kinerja Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	3.30.03.2.02.0002 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		Tingkat stabilitas harga pangan dan bahan pokok (%)	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
				Capaian Kinerja Menjamin Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3.30.04.2.01.0003 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
				Capaian Kinerja Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor		Persentase Pelaku Usaha yang di fasilitasi Ekspor (%)	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
				Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional	
					Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	3.30.05.2.01.0005 - Peningkatan Citra Produk Ekspor	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				Capaian Kinerja Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
					Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan ()	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
				Capaian Kinerja Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Daya Saing Sektor Perindustrian			Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)		
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri		Persentase realisasi rencana pembangunan industri kota (RPIK) (%)	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Capaian Kinerja Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
					- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian		Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kesil dan Idustri Menengah Yang dilakukan oleh Instansi terkait (%)	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
				Capaian Kinerja Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
					-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri		Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam pengisian data SIINAS (%)	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Capaian Kinerja Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	
		Terwujudnya Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang Akuntabel dan Profesional			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (poin)		
			Meningkatnya kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase BMD dalam kondisi baik dan termanfaatkan (%)	3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Nilai)	3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Pelayanan Publik (poin)	3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3.31.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.31.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.31.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3.31.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.31.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.31.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.31.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.31.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.31.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.31.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.31.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.31.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.31.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.31.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.31.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.31.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.31.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.31.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.31.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.31.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.31.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.31.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.31.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.31.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.31.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.31.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.31.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.31.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.31.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.31.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.31.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.31.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	3.31.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.31.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.31.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.31.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.31.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.31.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	3.31.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.31.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Meningkatnya kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah				
			Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program Kegiatan Serta Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah (Skor)	3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Kinerja pendapatan retribusi kewenangan perangkat daerah (OPD penghasil) (%)	3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	3.31.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3.31.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3.31.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.31.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.31.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.31.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.31.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.31.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.31.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3.31.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3.31.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	3.31.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Capaian kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	3.31.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.31.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.31.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.31.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.31.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.31.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.31.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	3.31.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Capaian kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.31.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.31.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.31.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.31.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Capaian kinerja Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	3.31.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	3.31.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
3.31.3.30.0.00.02.0001 - UPTD Pasar Baru Merak							
- S.2.1 - Terwujudnya ekosistem dan ruang pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Terwujudnya pertumbuhan industri dan perdagangan daerah yang berdaya saing inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efesien, merata dan terintegritas		Tingkat kepuasan pengunjung pasar terhadap layanan sarana perdagangan (poin)	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				Capaian Kinerja Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk				
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk				
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
		Terwujudnya Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang Akuntabel dan Profesional	Meningkatnya kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase BMD dalam kondisi baik dan termanfaatkan (%)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Nilai)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Pelayanan Publik (poin)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.30.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	3.30.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	3.30.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program Kegiatan Serta Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah				
3.31.3.30.0.00.02.0002 - UPTD Pasar Baru Cilegon							
- S.2.1 - Terwujudnya ekosistem dan ruang pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Terwujudnya pertumbuhan industri dan perdagangan daerah yang berdaya saing inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efesien, merata dan terintegritas		Tingkat kepuasan pengunjung pasar terhadap layanan sarana perdagangan (poin)	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				Capaian Kinerja Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk				
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk				
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk				
		Terwujudnya Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang Akuntabel dan Profesional	Meningkatnya kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase BMD dalam kondisi baik dan termanfaatkan (%)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Pelayanan Publik (poin)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Nilai)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.30.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah				
			Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program Kegiatan Serta Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
3.31.3.30.0.00.02.0003 - UPTD Pasar Blok F Cilegon							
- S.2.1 - Terwujudnya ekosistem dan ruang pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Terwujudnya pertumbuhan industri dan perdagangan daerah yang berdaya saing inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efesien, merata dan terintegritas		Tingkat kepuasan pengunjung pasar terhadap layanan sarana perdagangan (poin)	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				Capaian Kinerja Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk				
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk				
		Terwujudnya Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang Akuntabel dan Profesional	Meningkatnya kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase BMD dalam kondisi baik dan termanfaatkan (%)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Nilai)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Pelayanan Publik (poin)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.30.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah				
			Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program Kegiatan Serta Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah				

TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA CILEGON

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				10.747.160.000,00		11.084.640.000,00		40.027.970.000,00		10.072.910.000,00		10.072.910.000,00		
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.404.460.000,00		6.419.040.000,00		6.439.070.000,00		6.460.210.000,00		6.460.210.000,00		
Meningkatnya kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah				6.387.960.000,00		6.401.640.000,00		6.420.770.000,00		6.441.010.000,00		6.441.010.000,00	3.31.3.30.0.00.02.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	Persentase BMD dalam kondisi baik dan termanfaatkan (%)	0	90		90		91		93		93		3.31.3.30.0.00.02.0001 - UPTD Pasar Baru Merak	
	Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	0	3,5		3,8		4		4,5		4,5			
	Nilai Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Nilai)	0	60		65		75		85		90			
	Indeks Pelayanan Publik (poin)	0	2,5		3,3		4		4,5		5			
3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				29.950.000,00		31.290.000,00		32.720.000,00		34.130.000,00		35.640.000,00		
Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	29.950.000,00	1	31.290.000,00	1	32.720.000,00	1	34.130.000,00	1	35.640.000,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
3.30.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000,00		2.050.000,00		2.150.000,00		2.150.000,00		2.200.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	2.000.000,00	1	2.050.000,00	1	2.150.000,00	1	2.150.000,00	1	2.200.000,00		
3.30.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000,00		5.250.000,00		5.510.000,00		5.790.000,00		6.080.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000,00	1	5.250.000,00	1	5.510.000,00	1	5.790.000,00	1	6.080.000,00		
3.30.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000,00		5.130.000,00		5.260.000,00		5.390.000,00		5.520.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000,00	1	5.130.000,00	1	5.260.000,00	1	5.390.000,00	1	5.520.000,00		
3.30.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.500.000,00		7.880.000,00		8.270.000,00		8.680.000,00		9.110.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	7.500.000,00	2	7.880.000,00	2	8.270.000,00	2	8.680.000,00	2	9.110.000,00		
3.30.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000,00		5.250.000,00		5.510.000,00		5.790.000,00		6.080.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000,00	1	5.250.000,00	1	5.510.000,00	1	5.790.000,00	1	6.080.000,00		
3.30.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.450.000,00		5.730.000,00		6.020.000,00		6.330.000,00		6.650.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1	5.450.000,00	1	5.730.000,00	1	6.020.000,00	1	6.330.000,00	1	6.650.000,00		
3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.092.530.000,00		1.091.450.000,00		1.091.890.000,00		1.092.350.000,00		1.090.620.000,00		
Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	12	1.092.530.000,00	12	1.091.450.000,00	12	1.091.890.000,00	12	1.092.350.000,00	12	1.090.620.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
3.30.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00		
3.30.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				8.350.000,00		7.270.000,00		7.710.000,00		8.170.000,00		6.440.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	12	8.350.000,00	12	7.270.000,00	12	7.710.000,00	12	8.170.000,00	12	6.440.000,00		
3.30.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.082.680.000,00		1.082.680.000,00		1.082.680.000,00		1.082.680.000,00		1.082.680.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.082.680.000,00	1	1.082.680.000,00	1	1.082.680.000,00	1	1.082.680.000,00	1	1.082.680.000,00		
3.30.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				66.400.000,00		69.600.000,00		73.000.000,00		76.610.000,00		76.830.000,00		
Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	0	66.400.000,00	1	69.600.000,00	0	73.000.000,00	1	76.610.000,00	0	76.830.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1		1		1		1		1			
3.30.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0,00		3.000.000,00		0,00		4.600.000,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	0	0,00	1	3.000.000,00	0	0,00	1	4.600.000,00	0	0,00		
3.30.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.400.000,00		6.600.000,00		6.800.000,00		7.010.000,00		7.230.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1	6.400.000,00	1	6.600.000,00	1	6.800.000,00	1	7.010.000,00	1	7.230.000,00		
3.30.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000,00		60.000.000,00		66.200.000,00		65.000.000,00		69.600.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	66.200.000,00	1	65.000.000,00	1	69.600.000,00		
Meningkatnya kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik dan termanfaatkan (%)	0	90	6.387.960.000,00	90	6.401.640.000,00	91	6.420.770.000,00	93	6.441.010.000,00	93	6.441.010.000,00	3.31.3.30.0.00.02.0002 - UPTD Pasar Baru Cilegon	
	Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	0	3,5		3,8		4		4,5		4,5			
	Indeks Pelayanan Publik (poin)	0	2,5		3,3		4		4,5		5			
	Nilai Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Nilai)	0	60		65		75		85		90			
3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				29.950.000,00		31.290.000,00		32.670.000,00		34.130.000,00		35.640.000,00		
Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	29.950.000,00	1	31.290.000,00	1	32.670.000,00	1	34.130.000,00	1	35.640.000,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1		2		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
3.30.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000,00		2.050.000,00		2.100.000,00		2.150.000,00		2.200.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	2.000.000,00	1	2.050.000,00	1	2.100.000,00	1	2.150.000,00	1	2.200.000,00		
3.30.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000,00		5.250.000,00		5.510.000,00		5.790.000,00		6.080.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000,00	1	5.250.000,00	1	5.510.000,00	1	5.790.000,00	1	6.080.000,00		
3.30.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000,00		5.130.000,00		5.260.000,00		5.390.000,00		5.520.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000,00	1	5.130.000,00	1	5.260.000,00	1	5.390.000,00	1	5.520.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.500.000,00		7.880.000,00		8.270.000,00		8.680.000,00		9.110.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	7.500.000,00	2	7.880.000,00	2	8.270.000,00	2	8.680.000,00	2	9.110.000,00		
3.30.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000,00		5.250.000,00		5.510.000,00		5.790.000,00		6.080.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000,00	1	5.250.000,00	1	5.510.000,00	1	5.790.000,00	1	6.080.000,00		
3.30.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.450.000,00		5.730.000,00		6.020.000,00		6.330.000,00		6.650.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1	5.450.000,00	2	5.730.000,00	1	6.020.000,00	1	6.330.000,00	1	6.650.000,00		
3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.327.790.000,00		3.327.660.000,00		3.329.100.000,00		3.330.610.000,00		3.328.880.000,00		
Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	3.327.790.000,00	12	3.327.660.000,00	12	3.329.100.000,00	12	3.330.610.000,00	12	3.328.880.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		14		14		14		14		14			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		1		1		1		1		1			
3.30.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00		
3.30.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				27.450.000,00		27.320.000,00		28.760.000,00		30.270.000,00		28.540.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	27.450.000,00	12	27.320.000,00	12	28.760.000,00	12	30.270.000,00	12	28.540.000,00		
3.30.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.298.840.000,00		3.298.840.000,00		3.298.840.000,00		3.298.840.000,00		3.298.840.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		14	3.298.840.000,00	14	3.298.840.000,00	14	3.298.840.000,00	14	3.298.840.000,00	14	3.298.840.000,00		
3.30.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				66.400.000,00		69.600.000,00		73.000.000,00		76.610.000,00		76.830.000,00		
Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1	66.400.000,00	1	69.600.000,00	1	73.000.000,00	1	76.610.000,00	1	76.830.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
3.30.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.400.000,00		6.600.000,00		6.800.000,00		7.010.000,00		7.230.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1	6.400.000,00	1	6.600.000,00	1	6.800.000,00	1	7.010.000,00	1	7.230.000,00		
3.30.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000,00		63.000.000,00		66.200.000,00		69.600.000,00		69.600.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	60.000.000,00	1	63.000.000,00	1	66.200.000,00	1	69.600.000,00	1	69.600.000,00		
Meningkatnya kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik dan termanfaatkan (%)	0	90	6.387.960.000,00	90	6.401.640.000,00	91	6.420.770.000,00	93	6.441.010.000,00	93	6.441.010.000,00	3.31.3.30.0.00.02.0003 - UPTD Pasar Blok F Cilegon	
	Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	0	3,5		3,8		4		4,5		4,5			
	Nilai Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Nilai)	0	60		65		75		85		90			
	Indeks Pelayanan Publik (poin)	0	2,5		3,3		4		4,5		5			
3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				29.950.000,00		31.290.000,00		32.620.000,00		34.130.000,00		35.640.000,00		
Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	29.950.000,00	1	31.290.000,00	1	32.620.000,00	1	34.130.000,00	1	35.640.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
3.30.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000,00		2.050.000,00		2.050.000,00		2.150.000,00		2.200.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	2.000.000,00	1	2.050.000,00	1	2.050.000,00	1	2.150.000,00	1	2.200.000,00		
3.30.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000,00		5.250.000,00		5.510.000,00		5.790.000,00		6.080.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000,00	1	5.250.000,00	1	5.510.000,00	1	5.790.000,00	1	6.080.000,00		
3.30.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000,00		5.130.000,00		5.260.000,00		5.390.000,00		5.520.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000,00	1	5.130.000,00	1	5.260.000,00	1	5.390.000,00	1	5.520.000,00		
3.30.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.500.000,00		7.880.000,00		8.270.000,00		8.680.000,00		9.110.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	7.500.000,00	1	7.880.000,00	1	8.270.000,00	1	8.680.000,00	1	9.110.000,00		
3.30.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000,00		5.250.000,00		5.510.000,00		5.790.000,00		6.080.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000,00	1	5.250.000,00	1	5.510.000,00	1	5.790.000,00	1	6.080.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.450.000,00		5.730.000,00		6.020.000,00		6.330.000,00		6.650.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	5.450.000,00	1	5.730.000,00	1	6.020.000,00	1	6.330.000,00	1	6.650.000,00		
3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.678.590.000,00		1.679.860.000,00		1.682.770.000,00		1.685.830.000,00		1.684.100.000,00		
Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	1.678.590.000,00	3	1.679.860.000,00	3	1.682.770.000,00	3	1.685.830.000,00	3	1.684.100.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
3.30.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00		
3.30.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				55.490.000,00		56.760.000,00		59.670.000,00		62.730.000,00		61.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	55.490.000,00	3	56.760.000,00	3	59.670.000,00	3	62.730.000,00	3	61.000.000,00		
3.30.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.621.600.000,00		1.621.600.000,00		1.621.600.000,00		1.621.600.000,00		1.621.600.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.621.600.000,00	1	1.621.600.000,00	1	1.621.600.000,00	1	1.621.600.000,00	1	1.621.600.000,00		
3.30.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				66.400.000,00		69.600.000,00		73.000.000,00		76.610.000,00		76.830.000,00		
Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1	66.400.000,00	1	69.600.000,00	1	73.000.000,00	1	76.610.000,00	1	76.830.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
3.30.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.400.000,00		6.600.000,00		6.800.000,00		7.010.000,00		7.230.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1	6.400.000,00	1	6.600.000,00	1	6.800.000,00	1	7.010.000,00	1	7.230.000,00		
3.30.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000,00		63.000.000,00		66.200.000,00		69.600.000,00		69.600.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	60.000.000,00	1	63.000.000,00	1	66.200.000,00	1	69.600.000,00	1	69.600.000,00		
Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program Kegiatan Serta Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	84,5	85,5	16.500.000,00	85,9	17.400.000,00	86	18.300.000,00	86,5	19.200.000,00	86,9	19.200.000,00	3.31.3.30.0.00.02.0001 - UPTD Pasar Baru Merak	
	Kinerja pendapatan retribusi kewenangan perangkat daerah (OPD penghasil) (%)	114,08	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah (Skor)	0	80		85		90		95		100			
3.30.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				5.500.000,00		5.800.000,00		6.100.000,00		6.400.000,00		6.400.000,00		
Capaian kinerja Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	5.500.000,00	1	5.800.000,00	1	6.100.000,00	1	6.400.000,00	1	6.400.000,00		
3.30.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				5.500.000,00		5.800.000,00		6.100.000,00		6.400.000,00		6.400.000,00		
Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	5.500.000,00	1	5.800.000,00	1	6.100.000,00	1	6.400.000,00	1	6.400.000,00		
Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program Kegiatan Serta Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	84,5	85,5	16.500.000,00	85,9	17.400.000,00	86	18.300.000,00	86,5	19.200.000,00	86,9	19.200.000,00	3.31.3.30.0.00.02.0002 - UPTD Pasar Baru Cilegon	
	Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah (Skor)	0	80		85		90		95		100			
	Kinerja pendapatan retribusi kewenangan perangkat daerah (OPD penghasil) (%)	114,08	100		100		100		100		100			
3.30.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				5.500.000,00		5.800.000,00		6.100.000,00		6.400.000,00		6.400.000,00		
Capaian Kinerja Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	5.500.000,00	1	5.800.000,00	1	6.100.000,00	1	6.400.000,00	1	6.400.000,00		
3.30.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				5.500.000,00		5.800.000,00		6.100.000,00		6.400.000,00		6.400.000,00		
Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	5.500.000,00	1	5.800.000,00	1	6.100.000,00	1	6.400.000,00	1	6.400.000,00		
Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program Kegiatan Serta Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	84,5	85,5	16.500.000,00	85,9	17.400.000,00	86	18.300.000,00	86,5	19.200.000,00	86,9	19.200.000,00	3.31.3.30.0.00.02.0003 - UPTD Pasar Blok F Cilegon	
	Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah (Skor)	0	80		85		90		95		100			
	Kinerja pendapatan retribusi kewenangan perangkat daerah (OPD penghasil) (%)	114,08	100		100		100		100		100			
3.30.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				5.500.000,00		5.800.000,00		6.100.000,00		6.400.000,00		6.400.000,00		
Capaian Kinerja Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	5.500.000,00	1	5.800.000,00	1	6.100.000,00	1	6.400.000,00	1	6.400.000,00		
3.30.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				5.500.000,00		5.800.000,00		6.100.000,00		6.400.000,00		6.400.000,00		
Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	5.500.000,00	1	5.800.000,00	1	6.100.000,00	1	6.400.000,00	1	6.400.000,00		
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	3.31.3.30.0.00.02.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Capaian Kinerja Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	0	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00		
3.30.02.2.02.0001 - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	0	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00		
3.30.02.2.03 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Capaian Kinerja Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri (Dokumen)	0	0	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	0	1		0		0		0		0			
3.30.02.2.03.0001 - Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik				5.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terfasilitasinya Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.30.02.2.03.0002 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri (Dokumen)	0	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Capaian Kinerja Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya (Laporan)	0	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	0	33		33		33		33		33			
3.30.02.2.06.0001 - Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksanakannya Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya (Laporan)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
3.30.02.2.06.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	0	33	30.000.000,00	33	30.000.000,00	33	30.000.000,00	33	30.000.000,00	33	30.000.000,00		
3.30.02.2.07 - Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Capaian Kinerja Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	0	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00		
3.30.02.2.07.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	0	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00		
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				2.650.000.000,00		2.950.000.000,00		31.850.000.000,00		1.850.000.000,00		1.850.000.000,00		
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efesien, merata dan terintegritas	Tingkat kepuasan pengunjung pasar terhadap layanan sarana perdagangan (poin)	0	78	2.650.000.000,00	79	2.950.000.000,00	80	31.850.000.000,00	81	1.850.000.000,00	82	1.850.000.000,00	3.31.3.30.0.00.02.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				2.320.000.000,00		2.609.500.000,00		31.498.400.000,00		1.486.700.000,00		1.486.700.000,00		
Capaian Kinerja Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3	8	2.320.000.000,00	8	2.609.500.000,00	9	31.498.400.000,00	9	1.486.700.000,00	9	1.486.700.000,00		
	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	1	2		1		0		0		0			
3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				1.440.000.000,00		1.809.500.000,00		31.498.400.000,00		1.486.700.000,00		1.486.700.000,00		
Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3	8	1.440.000.000,00	8	1.809.500.000,00	9	31.498.400.000,00	9	1.486.700.000,00	9	1.486.700.000,00		
3.30.03.2.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				880.000.000,00		800.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	1	2	880.000.000,00	1	800.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Capaian Kinerja Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	1	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00		
3.30.03.2.02.0002 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	1	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00		
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efesien, merata dan terintegritas	Tingkat kepuasan pengunjung pasar terhadap layanan sarana perdagangan (poin)	0	78	2.650.000.000,00	79	2.950.000.000,00	80	31.850.000.000,00	81	1.850.000.000,00	82	1.850.000.000,00	3.31.3.30.0.00.02.0001 - UPTD Pasar Baru Merak	
3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				70.000.000,00		73.500.000,00		77.200.000,00		81.100.000,00		81.100.000,00		
Capaian Kinerja Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	0	2	70.000.000,00	2	73.500.000,00	2	77.200.000,00	2	81.100.000,00	2	81.100.000,00		
3.30.03.2.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				70.000.000,00		73.500.000,00		77.200.000,00		81.100.000,00		81.100.000,00		
Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	0	2	70.000.000,00	2	73.500.000,00	2	77.200.000,00	2	81.100.000,00	2	81.100.000,00		
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efesien, merata dan terintegritas	Tingkat kepuasan pengunjung pasar terhadap layanan sarana perdagangan (poin)	0	78	2.650.000.000,00	79	2.950.000.000,00	80	31.850.000.000,00	81	1.850.000.000,00	82	1.850.000.000,00	3.31.3.30.0.00.02.0002 - UPTD Pasar Baru Cilegon	
3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				70.000.000,00		73.500.000,00		77.200.000,00		81.100.000,00		81.100.000,00		
Capaian Kinerja Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	0	3	70.000.000,00	3	73.500.000,00	3	77.200.000,00	3	81.100.000,00	3	81.100.000,00		
3.30.03.2.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				70.000.000,00		73.500.000,00		77.200.000,00		81.100.000,00		81.100.000,00		
Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	0	3	70.000.000,00	3	73.500.000,00	3	77.200.000,00	3	81.100.000,00	3	81.100.000,00		
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efesien, merata dan terintegritas	Tingkat kepuasan pengunjung pasar terhadap layanan sarana perdagangan (poin)	0	78	2.650.000.000,00	79	2.950.000.000,00	80	31.850.000.000,00	81	1.850.000.000,00	82	1.850.000.000,00	3.31.3.30.0.00.02.0003 - UPTD Pasar Blok F Cilegon	
3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				70.000.000,00		73.500.000,00		77.200.000,00		81.100.000,00		81.100.000,00		
Capaian Kinerja Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	0	3	70.000.000,00	3	73.500.000,00	3	77.200.000,00	3	81.100.000,00	3	81.100.000,00		
3.30.03.2.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				70.000.000,00		73.500.000,00		77.200.000,00		81.100.000,00		81.100.000,00		
Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	0	3	70.000.000,00	3	73.500.000,00	3	77.200.000,00	3	81.100.000,00	3	81.100.000,00		
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				642.700.000,00		655.600.000,00		668.700.000,00		682.000.000,00		682.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Tingkat stabilitas harga pangan dan bahan pokok (%)	9,28	10	642.700.000,00	10	655.600.000,00	10	668.700.000,00	10	682.000.000,00	10	682.000.000,00	3.31.3.30.0.00.02.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Capaian Kinerja Menjamin Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
3.30.04.2.01.0003 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				592.700.000,00		605.600.000,00		618.700.000,00		632.000.000,00		632.000.000,00		
Capaian Kinerja Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	0	4	592.700.000,00	4	605.600.000,00	4	618.700.000,00	4	632.000.000,00	4	632.000.000,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1	10		10		10		10		10			
	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				25.000.000,00		75.000.000,00		25.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	0	4	25.000.000,00	4	75.000.000,00	4	25.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00		
3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				542.700.000,00		505.600.000,00		568.700.000,00		532.000.000,00		532.000.000,00		
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1	10	542.700.000,00	10	505.600.000,00	10	568.700.000,00	10	532.000.000,00	10	532.000.000,00		
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				0		0		0		0		0	3.31.3.30.0.00.02.0001 - UPTD Pasar Baru Merak	
													3.31.3.30.0.00.02.0002 - UPTD Pasar Baru Cilegon	
													3.31.3.30.0.00.02.0003 - UPTD Pasar Blok F Cilegon	
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase Pelaku Usaha yang di fasilitasi Ekspor (%)	0	15	450.000.000,00	15	450.000.000,00	15	450.000.000,00	15	450.000.000,00	15	450.000.000,00	3.31.3.30.0.00.02.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	0	3	450.000.000,00	3	450.000.000,00	3	450.000.000,00	3	450.000.000,00	3	450.000.000,00		
	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	7	3		3		3		3		3			
3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional				330.000.000,00		330.000.000,00		330.000.000,00		330.000.000,00		330.000.000,00		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	0	3	330.000.000,00	3	330.000.000,00	3	330.000.000,00	3	330.000.000,00	3	330.000.000,00		
3.30.05.2.01.0005 - Peningkatan Citra Produk Ekspor				120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	7	3	120.000.000,00	3	120.000.000,00	3	120.000.000,00	3	120.000.000,00	3	120.000.000,00		
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				400.000.000,00		410.000.000,00		420.200.000,00		430.700.000,00		430.700.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	100	93,5	400.000.000,00	94	410.000.000,00	94,5	420.200.000,00	95	430.700.000,00	95,5	430.700.000,00	3.31.3.30.0.00.02.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				400.000.000,00		410.000.000,00		420.200.000,00		430.700.000,00		430.700.000,00		
Capaian Kinerja Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	5.515	5.624	400.000.000,00	5.654	410.000.000,00	5.685	420.200.000,00	5.714	430.700.000,00	5.744	430.700.000,00		
	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	693	693		693		700		700		700			
3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				240.000.000,00		245.000.000,00		250.200.000,00		255.700.000,00		255.700.000,00		
Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	5.515	5.624	240.000.000,00	5.654	245.000.000,00	5.685	250.200.000,00	5.714	255.700.000,00	5.744	255.700.000,00		
3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal				160.000.000,00		165.000.000,00		170.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		
Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	693	693	160.000.000,00	693	165.000.000,00	700	170.000.000,00	700	175.000.000,00	700	175.000.000,00		
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk				0		0		0		0		0	3.31.3.30.0.00.02.0001 - UPTD Pasar Baru Merak	
													3.31.3.30.0.00.02.0002 - UPTD Pasar Baru Cilegon	
													3.31.3.30.0.00.02.0003 - UPTD Pasar Blok F Cilegon	
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	0	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	3.31.3.30.0.00.02.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Capaian Kinerja Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	0	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00		
3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	0	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				16.699.161.542,00		17.017.101.041,00		17.351.831.532,00		17.693.551.542,00		17.692.391.542,00		
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15.082.061.542,00		15.357.501.041,00		15.649.031.532,00		15.946.951.542,00		15.945.791.542,00		
Meningkatnya kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik dan termanfaatkan (%)	0	90	4.359.971.542,00	90	4.359.710.027,00	91	4.378.386.642,00	93	4.397.431.580,00	93	4.270.763.881,00	3.31.3.30.0.00.02.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	0	3,5		3,8		4		4,5		4,5			
	Nilai Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Nilai)	0	60		65		75		85		90			
	Indeks Pelayanan Publik (poin)	0	2,5		3,3		4		4,5		5			
3.31.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				4.190.000,00		14.184.000,00		15.894.000,00		14.894.000,00		15.639.000,00		
Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	4.190.000,00	0	14.184.000,00	1	15.894.000,00	0	14.894.000,00	0	15.639.000,00		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	3		3		3		3		3			
3.31.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		1.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	0	0,00	1	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
3.31.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4.190.000,00		14.184.000,00		14.894.000,00		14.894.000,00		15.639.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	3	4.190.000,00	3	14.184.000,00	3	14.894.000,00	3	14.894.000,00	3	15.639.000,00		
3.31.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				262.212.250,00		267.992.250,00		272.883.250,00		283.213.250,00		289.853.250,00		
Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	262.212.250,00	2	267.992.250,00	2	272.883.250,00	2	283.213.250,00	2	289.853.250,00		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
3.31.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000,00		8.200.000,00		8.410.000,00		8.620.000,00		8.840.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	8.000.000,00	1	8.200.000,00	1	8.410.000,00	1	8.620.000,00	1	8.840.000,00		
3.31.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000,00		31.500.000,00		33.080.000,00		34.730.000,00		36.470.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	30.000.000,00	3	31.500.000,00	3	33.080.000,00	3	34.730.000,00	3	36.470.000,00		
3.31.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000,00		15.380.000,00		15.760.000,00		16.150.000,00		16.550.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	15.000.000,00	1	15.380.000,00	1	15.760.000,00	1	16.150.000,00	1	16.550.000,00		
3.31.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				37.500.000,00		39.380.000,00		41.350.000,00		43.420.000,00		45.590.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	37.500.000,00	2	39.380.000,00	2	41.350.000,00	2	43.420.000,00	2	45.590.000,00		
3.31.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				88.772.250,00		89.272.250,00		89.802.250,00		90.352.250,00		90.932.250,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	88.772.250,00	2	89.272.250,00	2	89.802.250,00	2	90.352.250,00	2	90.932.250,00		
3.31.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				10.900.000,00		11.450.000,00		12.030.000,00		12.640.000,00		13.280.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	10.900.000,00	2	11.450.000,00	2	12.030.000,00	2	12.640.000,00	2	13.280.000,00		
3.31.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				56.820.000,00		56.820.000,00		55.661.000,00		59.661.000,00		59.661.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	56.820.000,00	12	56.820.000,00	12	55.661.000,00	12	59.661.000,00	12	59.661.000,00		
3.31.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				9.430.000,00		9.910.000,00		10.410.000,00		10.940.000,00		11.490.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	9.430.000,00	1	9.910.000,00	1	10.410.000,00	1	10.940.000,00	1	11.490.000,00		
3.31.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5.790.000,00		6.080.000,00		6.380.000,00		6.700.000,00		7.040.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	5.790.000,00	1	6.080.000,00	1	6.380.000,00	1	6.700.000,00	1	7.040.000,00		
3.31.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				65.000.000,00		68.300.000,00		74.500.000,00		78.000.000,00		78.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	7	65.000.000,00	4	68.300.000,00	4	74.500.000,00	4	78.000.000,00	4	78.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0		0		1		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		1		0		0			
3.31.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		2.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	1	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
3.31.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		0,00		1.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	1	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
3.31.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				65.000.000,00		68.300.000,00		71.500.000,00		78.000.000,00		78.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	7	65.000.000,00	4	68.300.000,00	4	71.500.000,00	4	78.000.000,00	4	78.000.000,00		
3.31.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.683.037.742,00		3.582.762.227,00		3.638.087.842,00		3.593.732.780,00		3.509.100.081,00		
Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	12	3.683.037.742,00	12	3.582.762.227,00	12	3.638.087.842,00	12	3.593.732.780,00	12	3.509.100.081,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8	7		7		7		7		7			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	2		2		2		2		2			
3.31.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00		
3.31.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				126.480.726,00		126.480.726,00		126.480.726,00		126.480.726,00		126.480.726,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	12	126.480.726,00	12	126.480.726,00	12	126.480.726,00	12	126.480.726,00	12	126.480.726,00		
3.31.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				177.400.000,00		10.500.000,00		11.030.000,00		11.580.000,00		12.160.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7	3	177.400.000,00	3	10.500.000,00	3	11.030.000,00	3	11.580.000,00	3	12.160.000,00		
3.31.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.374.157.016,00		3.440.781.501,00		3.495.577.116,00		3.450.672.054,00		3.365.459.355,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8	7	3.374.157.016,00	7	3.440.781.501,00	7	3.495.577.116,00	7	3.450.672.054,00	7	3.365.459.355,00		
3.31.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				345.531.550,00		426.471.550,00		377.021.550,00		427.591.550,00		378.171.550,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1	0	345.531.550,00	1	426.471.550,00	0	377.021.550,00	1	427.591.550,00	0	378.171.550,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	28	27		27		27		27		27			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	38	23		23		23		24		25			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	1		3		3		3		3			
3.31.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				15.000.000,00		45.410.000,00		45.410.000,00		45.410.000,00		45.410.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	1	15.000.000,00	3	45.410.000,00	3	45.410.000,00	3	45.410.000,00	3	45.410.000,00		
3.31.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				312.931.550,00		312.931.550,00		312.931.550,00		312.931.550,00		312.931.550,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	28	27	312.931.550,00	27	312.931.550,00	27	312.931.550,00	27	312.931.550,00	27	312.931.550,00		
3.31.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				0,00		50.000.000,00		0,00		50.000.000,00		0,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0,00		
3.31.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.600.000,00		18.130.000,00		18.680.000,00		19.250.000,00		19.830.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	38	23	17.600.000,00	23	18.130.000,00	23	18.680.000,00	24	19.250.000,00	25	19.830.000,00		
Meningkatnya kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah				0		0		0		0		0	3.31.3.30.0.00.02.0001 - UPTD Pasar Baru Merak	
													3.31.3.30.0.00.02.0002 - UPTD Pasar Baru Cilegon	
													3.31.3.30.0.00.02.0003 - UPTD Pasar Blok F Cilegon	
Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program Kegiatan Serta Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	84,5	85,5	10.722.090.000,00	85,9	10.997.791.014,00	86	11.270.644.890,00	86,5	11.549.519.962,00	86,9	11.675.027.661,00	3.31.3.30.0.00.02.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah (Skor)	0	80		85		90		95		100			
	Kinerja pendapatan retribusi kewenangan perangkat daerah (OPD penghasil) (%)	114,08	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.31.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				106.620.000,00		108.992.000,00		112.358.000,00		115.008.000,00		118.675.000,00		
Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	106.620.000,00	1	108.992.000,00	1	112.358.000,00	1	115.008.000,00	1	118.675.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1		1		1		1		1			
3.31.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				32.930.000,00		34.570.000,00		36.300.000,00		38.120.000,00		40.030.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	32.930.000,00	2	34.570.000,00	2	36.300.000,00	2	38.120.000,00	2	40.030.000,00		
3.31.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.150.000,00		3.150.000,00		3.150.000,00		3.150.000,00		3.150.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.150.000,00	1	3.150.000,00	1	3.150.000,00	1	3.150.000,00	1	3.150.000,00		
3.31.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.580.000,00		1.575.000,00		1.575.000,00		1.575.000,00		1.575.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.580.000,00	1	1.575.000,00	1	1.575.000,00	1	1.575.000,00	1	1.575.000,00		
3.31.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.150.000,00		3.150.000,00		3.150.000,00		3.150.000,00		3.150.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.150.000,00	1	3.150.000,00	1	3.150.000,00	1	3.150.000,00	1	3.150.000,00		
3.31.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.580.000,00		1.575.000,00		1.575.000,00		1.575.000,00		1.575.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.580.000,00	1	1.575.000,00	1	1.575.000,00	1	1.575.000,00	1	1.575.000,00		
3.31.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16.070.000,00		16.070.000,00		16.070.000,00		16.070.000,00		16.070.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3	16.070.000,00	3	16.070.000,00	3	16.070.000,00	3	16.070.000,00	3	16.070.000,00		
3.31.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16.710.000,00		16.702.000,00		17.538.000,00		17.538.000,00		18.415.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	2	16.710.000,00	2	16.702.000,00	2	17.538.000,00	2	17.538.000,00	2	18.415.000,00		
3.31.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				6.230.000,00		6.540.000,00		6.870.000,00		7.210.000,00		7.570.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	6.230.000,00	1	6.540.000,00	1	6.870.000,00	1	7.210.000,00	1	7.570.000,00		
3.31.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				10.720.000,00		11.160.000,00		11.630.000,00		12.120.000,00		12.640.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1	10.720.000,00	1	11.160.000,00	1	11.630.000,00	1	12.120.000,00	1	12.640.000,00		
3.31.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14.500.000,00		14.500.000,00		14.500.000,00		14.500.000,00		14.500.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1	14.500.000,00	1	14.500.000,00	1	14.500.000,00	1	14.500.000,00	1	14.500.000,00		
3.31.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.581.070.000,00		10.854.399.014,00		11.123.886.890,00		11.400.111.962,00		11.521.952.661,00		
Capaian kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	10.581.070.000,00	12	10.854.399.014,00	12	11.123.886.890,00	12	11.400.111.962,00	12	11.521.952.661,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	770	798		798		798		798		798			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
3.31.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.506.180.000,00		10.779.515.014,00		11.049.002.890,00		11.325.227.962,00		11.447.068.661,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	770	798	10.506.180.000,00	798	10.779.515.014,00	798	11.049.002.890,00	798	11.325.227.962,00	798	11.447.068.661,00		
3.31.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				60.890.000,00		60.884.000,00		60.884.000,00		60.884.000,00		60.884.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	60.890.000,00	12	60.884.000,00	12	60.884.000,00	12	60.884.000,00	12	60.884.000,00		
3.31.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00		
3.31.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		
3.31.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00		
3.31.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				24.400.000,00		24.400.000,00		24.400.000,00		24.400.000,00		24.400.000,00		
Capaian kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	24.400.000,00	1	24.400.000,00	1	24.400.000,00	1	24.400.000,00	1	24.400.000,00		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
3.31.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1.820.000,00		1.820.000,00		1.820.000,00		1.820.000,00		1.820.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1.820.000,00	1	1.820.000,00	1	1.820.000,00	1	1.820.000,00	1	1.820.000,00		
3.31.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.180.000,00		2.180.000,00		2.180.000,00		2.180.000,00		2.180.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	2.180.000,00	1	2.180.000,00	1	2.180.000,00	1	2.180.000,00	1	2.180.000,00		
3.31.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				20.400.000,00		20.400.000,00		20.400.000,00		20.400.000,00		20.400.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	20.400.000,00	12	20.400.000,00	12	20.400.000,00	12	20.400.000,00	12	20.400.000,00		
3.31.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Capaian kinerja Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
3.31.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program Kegiatan Serta Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah				0		0		0		0		0	3.31.3.30.0.00.02.0001 - UPTD Pasar Baru Merak	
													3.31.3.30.0.00.02.0002 - UPTD Pasar Baru Cilegon	
													3.31.3.30.0.00.02.0003 - UPTD Pasar Blok F Cilegon	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				1.577.100.000,00		1.619.300.000,00		1.662.100.000,00		1.705.600.000,00		1.705.600.000,00		
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase realisasi rencana pembangunan industri kota (RPIK) (%)	0	30,44	1.577.100.000,00	52,59	1.619.300.000,00	69,95	1.662.100.000,00	85,17	1.705.600.000,00	100	1.705.600.000,00	3.31.3.30.0.00.02.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				1.577.100.000,00		1.619.300.000,00		1.662.100.000,00		1.705.600.000,00		1.705.600.000,00		
Capaian Kinerja Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	5	2	1.577.100.000,00	2	1.619.300.000,00	2	1.662.100.000,00	2	1.705.600.000,00	2	1.705.600.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	1		0		0		0		0			
3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				761.100.000,00		813.300.000,00		806.100.000,00		859.600.000,00		859.600.000,00		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1	2	761.100.000,00	2	813.300.000,00	2	806.100.000,00	2	859.600.000,00	2	859.600.000,00		
3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				259.000.000,00		299.000.000,00		279.000.000,00		319.000.000,00		319.000.000,00		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	1	2	259.000.000,00	2	299.000.000,00	2	279.000.000,00	2	319.000.000,00	2	319.000.000,00		
3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				357.000.000,00		397.000.000,00		377.000.000,00		417.000.000,00		417.000.000,00		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	5	2	357.000.000,00	2	397.000.000,00	2	377.000.000,00	2	417.000.000,00	2	417.000.000,00		
3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				0,00		10.000.000,00		100.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	0	0	0,00	1	10.000.000,00	1	100.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				25.000.000,00		25.300.000,00		25.700.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00		
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kesil dan Idustri Menengah Yang dilakukan oleh Instansi terkait (%)	19,88	26,09	25.000.000,00	32,30	25.300.000,00	38,51	25.700.000,00	44,72	26.000.000,00	50,93	26.000.000,00	3.31.3.30.0.00.02.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				25.000.000,00		25.300.000,00		25.700.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00		
Capaian Kinerja Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	1	25.000.000,00	1	25.300.000,00	1	25.700.000,00	1	26.000.000,00	1	26.000.000,00		
	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3	1		1		1		1		1			
3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)				15.000.000,00		15.300.000,00		15.700.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		
Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	1	15.000.000,00	1	15.300.000,00	1	15.700.000,00	1	16.000.000,00	1	16.000.000,00		
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam pengisian data SIINAS (%)	0	10	15.000.000,00	15	15.000.000,00	20	15.000.000,00	25	15.000.000,00	25	15.000.000,00	3.31.3.30.0.00.02.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Capaian Kinerja Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis di sektor industri dan perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon menetapkan sejumlah program prioritas yang selaras dengan program pembangunan daerah. Program Prioritas tersebut dirancang sebagai bentuk intervensi yang terukur dan terarah, dengan pendekatan berbasis hasil (outcome-based), guna memperkuat kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari strategi pembangunan tersebut, Disperindag Kota Cilegon menetapkan tiga prioritas utama, yaitu:

a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan bertujuan memperkuat infrastruktur perdagangan daerah melalui pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat serta kawasan perdagangan strategis. Fokus utama adalah meningkatkan kenyamanan, kebersihan, dan aksesibilitas pasar, sekaligus mengurangi kesenjangan wilayah dalam akses perdagangan.

Program ini mencakup tiga subkegiatan utama:

1. **Revitalisasi Pasar Rakyat**

   Ditargetkan 8 pasar rakyat direvitalisasi hingga 2026 agar lebih layak dan representatif sebagai pusat ekonomi lokal di tiap kecamatan.

2. **Pembangunan Pasar Induk Merak**

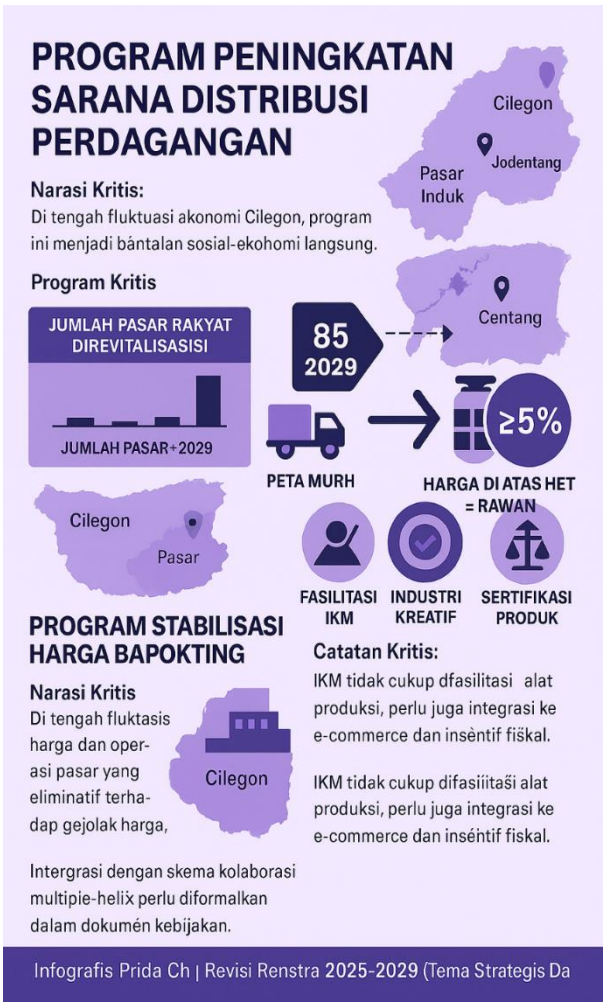
   Pasar berskala kota ini dirancang sebagai pusat distribusi bahan pokok menggantikan pasar lama di Merak. Ditargetkan selesai dan beroperasi penuh pada tahun 2028.

3. **Pengembangan Kawasan Perdagangan Citangkil dan Jombang**

   Dua titik di Kawasan Perdagangan Citangkil dan Satu titik di kawasan perdagangan Jombang ditargetkan tuntas pada 2026–2027 untuk mendukung pemerataan pusat ekonomi.

Indikator kinerja utama program ini meliputi jumlah pasar yang dibangun/direvitalisasi dan persentase progres Pasar Induk Merak. Targetnya adalah 8 pasar rakyat rampung direvitalisasi dan 1 Pasar Induk Merak beroperasi 100% pada 2028.

Anggaran program akan meningkat signifikan pada 2028 untuk mendukung konstruksi pasar induk, lalu menurun kembali untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan. Program ini sejalan dengan arah RPJMD Kota Cilegon 2025–2029 dalam memperluas pemerataan pembangunan wilayah dan memperkuat ekonomi lokal. Infrastruktur pasar yang memadai diharapkan mampu memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok dan memperkuat posisi Cilegon sebagai pusat perdagangan regional.



TABEL KRITIS PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN, STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK, DAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

TABEL PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah pasar rakyat yang direvitalisai/banun	unit	0	8	8	8	8
Progres pembangunan Pasar Induk Merak	%	0%	30%'	60%'	100%	100%
Anggaran Program (Rp)	-	-	2,32 miliar		2,61 miliar 31 miliar	31,50 miliar

TABEL STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK

Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Koefisien variasi harga Bapokting (stabillies harga)	–	-baseline	(stabil)	(stabil)	(stabil)	(stabil)
Persentase komoditas dengan harga > HET	Pesaline	-baseline	<5%	<5%	<5%	<5%
Jumlah laporan pelaksanaan operaspisa	laporan	1	2	2	2	2
Jumlah penyelenggaraan pasar murah	kegiatan	8	8	8	8	8
Anggaran Program (Rp)	–	557.7 juta	507,6 juta	562.7 juta	527.0 juta	527.0. juta

TABEL PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase realisasi RPIK Cilegon (perlode awal)	%	–	531 juta	500.6 juta	570.6 juta	386 juta
Jumlah dokumen koordinasi pembangunan industri				2	2	2

b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting)

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) bertujuan menjaga stabilitas harga bahan pokok di Kota Cilegon agar daya beli dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Program ini menjadi prioritas di sektor ekonomi kerakyatan dan dilaksanakan melalui berbagai bentuk intervensi pasar.

Tiga subkegiatan utama program ini meliputi:

1. **Operasi Pasar dan Pengendalian Stok**

   Pelaksanaan operasi pasar rutin dan insidental saat terjadi gejolak harga, serta pengawasan ketersediaan stok. Target kegiatan meningkat dari 1 laporan di 2025 menjadi 2 laporan per tahun mulai 2026.

2. **Pengawasan Harga dan HET**

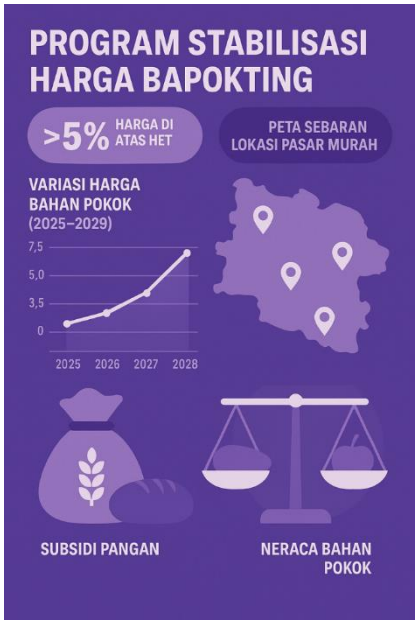
   Pemantauan harga barang kebutuhan pokok di pasar untuk memastikan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Indikator kinerja mencakup rendahnya variasi harga dan minimalnya komoditas yang melebihi HET (<5%).

3. **Penyelenggaraan Pasar Murah**

   Pasar murah dilaksanakan 8 kali per tahun di berbagai titik, khususnya menjelang hari besar keagamaan, sebagai upaya pemerintah menghadirkan pangan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Keberhasilan program diukur melalui stabilitas harga (koefisien variasi), frekuensi operasi pasar, dan tingkat pelanggaran HET. Anggaran program dialokasikan sekitar Rp500–600 juta per tahun (2026–2029), digunakan untuk subsidi pasar murah, operasi pasar, dan pengawasan harga.

Program ini sejalan dengan RPJMD Kota Cilegon 2025–2029 yang menekankan kesejahteraan merata dan pengendalian inflasi lokal. Selain melalui intervensi harga, program ini juga terintegrasi dengan penguatan infrastruktur pasar rakyat, sehingga menciptakan stabilisasi jangka pendek maupun jangka panjang dalam sistem distribusi dan harga kebutuhan pokok.



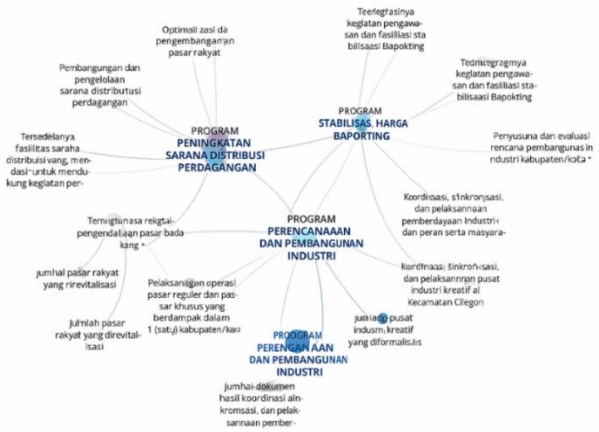
c. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri merupakan langkah strategis Disperindag Kota Cilegon dalam merancang pengembangan sektor industri yang terpadu dan berkelanjutan, sejalan dengan identitas Cilegon sebagai "Kota Baja". Program ini bertujuan mendukung capaian RPIK Cilegon 2023–2043, khususnya tahap awal 2025–2029, serta memperkuat sinergi antara industri besar dan lokal.

Program ini terdapat pada Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, termasuk dalam Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dengan Kegiatan prioritas **Pengembangan Pusat industri kreatif di kecamatan Cilegon** dan fokus dalam mendukung wirausaha baru melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan promosi,.

Program ini mendukung agenda RPJMD 2025–2029 dalam mewujudkan Cilegon sebagai kota industri modern, kompetitif, dan berkelanjutan. Penyerapan tenaga kerja dan hilirisasi produk lokal menjadi bagian dari sasaran yang didukung program ini.

Secara keseluruhan, program ini menunjukkan keterpaduan Renstra Disperindag dengan RPJMD dan RPIK, serta menjadi bagian penting dalam membangun fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang Cilegon menuju visi 2043: **Cilegon Maju, Sejahtera, dan Bermartabat**.



Kerangka analitis **tiga Program Prioritas Daerah (Prida)** Disperindag Kota Cilegon menggambarkan keterhubungan strategis antara *Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan*, *Stabilisasi Harga Bapokting*, dan *Perencanaan & Pembangunan Industri*. Ketiganya saling berkaitan dalam hal infrastruktur, logistik pangan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Setiap program membentuk simpul implementasi:

- **Pasar Induk Merak** dan **Pasar Rakyat** sebagai pusat distribusi,
- **Pasar Murah** dan **Operasi Pasar** sebagai instrumen kendali harga,
- **IKM dan RPIK** sebagai penggerak hilirisasi industri.

Irisan antar program menandai perlunya koordinasi lintas sektor serta transformasi kelembagaan melalui digitalisasi, dashboard komoditas, dan sistem peringatan dini—selaras dengan arah perubahan Renstra 2025–2029.

Implikasi kebijakan **utama**:

- Prida harus diarahkan tidak hanya pada output fisik, tetapi juga *outcome* strategis seperti stabilitas harga dan pertumbuhan industri lokal.
- Diperlukan kolaborasi lintas OPD dan kawasan industri.
- Pengembangan pemetaan spasial dan digital penting sebagai alat perencanaan dan evaluasi berbasis data.

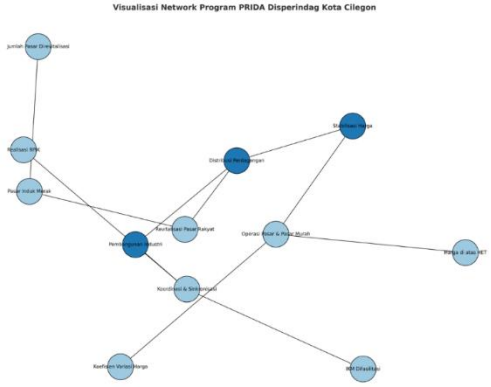
Penguatan Interkoneksi Programik dalam Prioritas Daerah Disperindag Kota Cilegon

Kajian kritis berbasis literasi jaringan menjadi kunci arah kebijakan pembangunan ekonomi Cilegon ke depan, mengingat tantangan fragmentasi program, disrupsi logistik, dan kurangnya integrasi antara kebijakan industri, distribusi, dan stabilisasi harga.

Dalam **Renstra Disperindag 2025–2029**, tiga *Program Prioritas Daerah (Prida)* yakni Peningkatan Sarana Distribusi, Stabilisasi Harga Bapokting, dan Pembangunan Industri menunjukkan keterkaitan erat melalui simpul-simpul strategis seperti revitalisasi pasar dan penguatan IKM. Namun, integrasi spasial, digital, dan kelembagaan dalam dokumen perencanaan masih lemah.

Ketiga program ini menandai pergeseran menuju tata kelola kolaboratif yang menuntut literasi publik sebagai dasar partisipasi. Dalam konteks RPJMD 2025–2029, hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, daya saing industri, dan ketahanan pangan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian kebijakan untuk memetakan irisan antar simpul program, mengukur kekuatan keterhubungan (network centrality), dan merumuskan arah kebijakan lintas program yang lebih integratif, partisipatif, dan berbasis literasi jaringan.



TABEL 4.3 : PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Program Kegiatan Sub Kegiatan	KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rumus Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja						Rencana Anggaran					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	22	23	24	25	27	28	29	30	31	32
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN																	
Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan																	
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																	
	KP-2.2.1 Optimalisasi dan pengembangan pasar rakyat	Tersedianya fasilitas sarana distribusi yang memadai untuk mendukung kegiatan perdagangan	Jumlah pasar rakyat yang bersih dan terkelola baik	Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi	unit	0	8	8	8	9	9		1.320.000.000	1.509.500.000	1.498.400.000	1.486.700.000	1.486.700.000
	KP-5.2.4 Pembangunan Pasar Induk Merak	terbangunnya Pasar Induk Merak yang lengkap dan memadai	Jumlah pasar induk yang beroperasi/ jumlah fasilitas pasar yang terbangun dan siap beroperasi Presentase fasilitas yang selesai dibangun	- Progres fisik pembangunan/ total rencana pembangunan -Jumlah fasilitas yang selesai dibangun/ jumlah fasilitas yang direncanakan	Persen	0	0	0	1	0	0		200.000.000	300.000.000	30.000.000.000		
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																	
	KP-2.2.7 Pengembangan Kawasan Perdagangan di Kecamatan Citangkil	terlaksananya Pengembangan Kawasan Perdagangan di Kecamatan Citangkil	jumlah kawasan perdagangan yang dikembangkan di Kecamatan Citangkil	jumlah kawasan perdagangan yang difasilitasi di Kecamatan Citangkil	unit	0	2	1	0	0	0		400.000.000	400.000.000			
	KP-2.2.7 Pengembangan Kawasan Perdagangan di Kecamatan Jombang	terlaksananya Pengembangan Kawasan Perdagangan di Kecamatan Jombang	jumlah kawasan perdagangan yang dikembangkan di Kecamatan Jombang	jumlah kawasan perdagangan yang difasilitasi di Kecamatan Jombang	unit	0	2	1	0	0	0		400.000.000	400.000.000			
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING																	
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota																	
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan																	

Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																	
	KP-2.2.3 Penyelenggaraan pasar murah	terlakasananya penyelenggaraan pasar murah	jumlah penyelenggaraan pasar murah yang dilaksanakan	jumlah penyelenggaraan pasar murah yang dilaksanakan	kegiatan	8	8	8	8	8	8		417.700.000	380.600.000	443.700.000	407.000000	407.000.000
PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI																	
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																	
	KP-2.2.8 Pengembangan Pusat industri kreatif di kecamatan Cilegon	terlaksananya pengembangan pusat industri kreatif di Kecamatan Cilegon	jumlah pusat industri kreatif yang dikembangkan di Kecamatan Cilegon	jumlah pusat industri kreatif yang dikembangkan di Kecamatan Cilegon	IKM	10	10	10	10	10	10		150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) Disperindag

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon Tahun 2025–2029 disusun sebagai alat ukur yang menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan. IKU dirumuskan untuk memastikan bahwa setiap target yang ditetapkan dapat dicapai secara terukur, terarah, dan relevan dengan capaian pembangunan daerah.

Indikator ini menjadi faktor penentu keberhasilan (critical success factor) dalam pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2025–2029. Dengan demikian, terbangun keterkaitan yang jelas antara kinerja perangkat daerah dengan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, guna mewujudkan pertumbuhan sektor industri dan perdagangan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan di Kota Cilegon, Disperindag Kota Cilegon menetapkan lima Indikator Kinerja Utama (IKU) :

a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ditargetkan naik hingga 12,16% pada 2030, mencerminkan peningkatan kinerja distribusi, penguatan pasar rakyat, dan promosi produk lokal.
b. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB dipertahankan di angka 56,16% sebagai pilar ekonomi daerah, didukung oleh peningkatan kapasitas IKM dan penguatan sektor industri bernilai tambah.
c. Indeks Reformasi Birokrasi ditingkatkan secara bertahap dari 82,01 menjadi 82,06, menunjukkan komitmen terhadap tata kelola yang profesional dan berbasis digital.
d. Indeks Harga Konsumen (IHK) ditargetkan naik terkendali, dari 107,20 menjadi 120,58, menandakan penguatan pengawasan harga dan sistem distribusi barang kebutuhan pokok.
e. Proporsi IKM dipertahankan di 5% per tahun, dengan fokus pada peningkatan kualitas, legalitas, dan daya saing melalui program pembinaan dan fasilitasi IKM naik kelas.
f. Kelima IKU ini menjadi tolok ukur pencapaian sasaran strategis dan arah kebijakan Disperindag selama lima tahun ke depan**.**

TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KOTA CILEGON

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						CARA PENGHITUNGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	3.31.3.30.0.00.02.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN									
2.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	0	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	(PDRB Sektor Perdagangan/ Total PDRB) x 100% PDRB Sektor Perdagangan: Perdagangan Besar dan Eceran
3.	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persentase	0	56,16	56,16	56,16	56,16	56,16	56,16	(PDRB Sektor industri/Total PDRB) x 100% PDRB Sektor rindustri: Industri Pengolahan
4.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%	21,65	5	5	5	5	5	5	(Jumlah IKM tahun N- Jumlah IKM tahun N-1)/Jumlah IKM tahun N-1) x 100%
5.	Indeks Harga Konsumen	poin	107,2	109,32	111,48	113,69	115,94	118,24	120,58	Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Desember tahun N : (hasil publish BPS)
6.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	82,006	82,01	82,02	82,03	82,04	82,05	82,06	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan sektor industri dan perdagangan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon menetapkan sejumlah Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolok ukur capaian strategis yang terukur dan berorientasi pada hasil. IKK ini mencakup dua urusan pemerintahan, yaitu perdagangan dan perindustrian, dengan target hingga tahun 2030 sebagai berikut**:**

a. Bidang Perdagangan

1. Persentase pelaku usaha yang difasilitasi ekspor ditargetkan mencapai 15% secara kumulatif, sebagai upaya mendorong IKM dan pelaku usaha lokal menembus pasar global.
2. Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan dipertahankan di angka 5% per tahun, mencerminkan konsistensi dalam penguatan pemasaran produk unggulan daerah.
3. Tingkat kepuasan pengunjung pasar terhadap layanan sarana perdagangan meningkat dari 78 poin (2025) menjadi 82 poin (2030), menunjukkan perbaikan kualitas fasilitas dan pelayanan pasar rakyat.
4. Tingkat stabilitas harga pangan dan bahan pokok dijaga pada kisaran 10%, menandakan efektivitas pengawasan distribusi dan kendali inflasi harga strategis.
5. Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah ditargetkan naik menjadi 95,5% pada 2030, sebagai bentuk peningkatan kepercayaan konsumen dan kepastian transaksi.
6. Persentase Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang difasilitasi ditingkatkan hingga 95% pada 2030, memperlihatkan peningkatan kemudahan dan keterjangkauan layanan perizinan bagi pelaku usaha.

b. Bidang Perindustrian

1. Persentase hasil pemantauan dan pengawasan terhadap izin Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) ditargetkan meningkat signifikan dari 26,09% (2025) menjadi 50,93% (2030), sebagai bentuk peningkatan kontrol dan pengawasan sektor industri.
2. Persentase realisasi Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) ditetapkan meningkat secara progresif hingga 100% pada 2030, sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembangunan industri.
3. Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam pengisian data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) ditingkatkan hingga 25%, mencerminkan komitmen terhadap digitalisasi dan basis data industri yang akurat.

Dengan capaian indikator-indikator tersebut, Disperindag Kota Cilegon berupaya memastikan bahwa pembangunan sektor industri dan perdagangan tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga mencerminkan keberlanjutan, kepastian hukum, dan keadilan bagi seluruh pelaku usaha dan masyarakat.

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KOTA CILEGON

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						CARA PERHITUNGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02))*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
1.	Persentase Pelaku Usaha yang di fasilitasi Ekspor	komulatif	%	0	15	15	15	15	15	15	Jumlah pelaku usaha berorientasi ekspor yang difasilitasi/ jumlah total pelaku usaha berorientasi ekspor x 100%
2.	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	komulatif	Persentase	0	5	5	5	5	5	5	(produk lokal yang difasilitasi atau dilaksanakan/ jumlah IKM yang terdaftar di SIINAS) x 100%
3.	Tingkat kepuasan pengunjung pasar terhadap layanan sarana perdagangan	positif	poin	0	77	78	79	80	81	82	Jumlah kepuasan responden/ total responden
4.	Tingkat stabilitas harga pangan dan bahan pokok	negatif	%	9,28	10	10	10	10	10	10	Jumlah koefisien variasi harga antar waktu Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok (10 komoditas diluar beras). Formula : (CV1 + CV2 + CV3 + ... + CV10)/10 CVi = SDi / Mi X 100% CV : koefisien variasi SD : standar deviasi M : mean/rata-rata I : komoditas ke-i , i = 1,2,3,....,10
5.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	positif	%	100	93	93.5	94	94.5	95	95.5	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan/ Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang x 100%
6.	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah izin yang difasilitasi/ jumlah permohonan izin) x 100%
	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
7.	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kesil dan Idustri Menengah Yang dilakukan oleh Instansi	positif	%	19.88	19.88	26.09	32.30	38.51	44.72	50.93	Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan IKM/ Jumlah IKM
8.	Persentase realisasi rencana pembangunan industri kota (RPIK)	komulatif	%	0	6.83	30.44	52.59	69.95	85.17	100	Jumlah Realisasi Pembangunan Industri sesuai Target RPIK/ Jumlah Target RPIK
9.	Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam pengisian data SIINAS	positif	%	0	5	10	15	20	25	25	Jumlah IKM yang melakukan kepatuhan dalam penyampaian laporan data di SIINAS / Jumlah IKM yang terdata di SIINAS

BAB V
PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 20221 tentang Hasil Verivikasi, Validasi, Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan memperhatikan:

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029;
2. Penyelarasan program prioritas provinsi dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029;
3. Penyelarasan program prioritas Kota dalam RPJMD Kota CIlegon Tahun 2025-2029
4. Evaluasi hasil capaiaan kinerja, tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra Perangkat Daerah masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja sampai dengan Tahun 2024;
5. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/ sub kegiatan sampai dengan Tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome);
6. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan, tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
7. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangun daerah.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon Tahun 2025–2029 merupakan dokumen yang memuat perencanaan program, kegiatan dan pendanaannya selama 5 (lima) tahun yaitu periode Tahun 2025-2029, dan disusun sebagai pedoman dalam mengarahkan pembangunan sektor industri dan perdagangan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Seluruh perencanaan dalam dokumen ini telah diselaraskan dengan visi dan misi RPJMD Kota Cilegon, serta mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan regional.

Renstra ini menegaskan komitmen Disperindag untuk mendukung tiga Prioritas Daerah (Prida) yaitu:

1. Penguatan kemandirian ekonomi lokal melalui pemberdayaan IKM dan modernisasi perdagangan;
2. Transformasi pelayanan publik melalui digitalisasi sistem informasi industri dan perdagangan;
3. Penguatan daya tahan masyarakat melalui stabilisasi harga, pengawasan barang beredar, dan perlindungan konsumen.

Seluruh strategi, sasaran, dan program dirancang untuk menjawab isu-isu strategis serta mendukung pencapaian target pembangunan yang terukur. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) ditetapkan untuk memastikan pelaksanaan program Disperindag berjalan akuntabel dan outcome-based. Program prioritas seperti “IKM Naik Kelas,” digitalisasi sistem distribusi, revitalisasi pasar rakyat, dan kemitraan perdagangan merupakan refleksi konkret dari arah pembangunan daerah yang berpihak pada pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.

Dokumen Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahunnya sebagai pedoman pelaksanaan program dan anggaran di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon, untuk kemudian dapat dijadikan bahan evaluasi keberhasilan pelaksanaan dari Renstra ini.

Dalam pelaksanaannya, Disperindag akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix (pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat) sebagai landasan membangun sinergi dan inovasi. Aspek tata kelola juga diperkuat melalui penerapan SPBE, peningkatan kualitas pelayanan, dan reformasi birokrasi menuju organisasi yang profesional dan responsif terhadap dinamika global.

Akhirnya, dengan sinergi dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Renstra ini diharapkan menjadi arah kebijakan yang kokoh dalam mewujudkan sektor industri dan perdagangan di Kota Cilegon yang tangguh, mandiri, dan berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat serta daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA CILEGON



ANDRIYANTI, SE., MM
NIP. 19760701 200701 2 012

MATRIK CASCADING DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
3.31.3.30.0.00.02.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							
- S.2.1 - Terwujudnya ekosistem dan ruang pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Terwujudnya pertumbuhan industri dan perdagangan daerah yang berdaya saing inklusif dan berkelanjutan				Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase)		
					Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (Persentase)		
		Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan			Indeks Harga Konsumen (poin)		
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha		Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
				Capaian Kinerja Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
					Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	3.30.02.2.02.0001 - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
				Capaian Kinerja Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.03 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	
					Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri (Dokumen)	3.30.02.2.03 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	
					Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.2.03.0001 - Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	
					Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri (Dokumen)	3.30.02.2.03.0002 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Capaian Kinerja Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya (Laporan)	3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya (Laporan)	3.30.02.2.06.0001 - Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	3.30.02.2.06.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	
				Capaian Kinerja Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	3.30.02.2.07 - Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	
					Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	3.30.02.2.07.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efesien, merata dan terintegritas		Tingkat kepuasan pengunjung pasar terhadap layanan sarana perdagangan (poin)	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				Capaian Kinerja Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Capaian Kinerja Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	3.30.03.2.02.0002 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		Tingkat stabilitas harga pangan dan bahan pokok (%)	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
				Capaian Kinerja Menjamin Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3.30.04.2.01.0003 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
				Capaian Kinerja Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor		Persentase Pelaku Usaha yang di fasilitasi Ekspor (%)	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
				Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional	
					Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	3.30.05.2.01.0005 - Peningkatan Citra Produk Ekspor	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				Capaian Kinerja Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
					Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
				Capaian Kinerja Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Daya Saing Sektor Perindustrian			Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)		
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri		Persentase realisasi rencana pembangunan industri kota (RPIK) (%)	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Capaian Kinerja Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
					- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian		Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kesil dan Idustri Menengah Yang dilakukan oleh Instansi terkait (%)	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
				Capaian Kinerja Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
					-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri		Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam pengisian data SIINAS (%)	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Capaian Kinerja Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	
		Terwujudnya Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang Akuntabel dan Profesional			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (poin)		
			Meningkatnya kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase BMD dalam kondis baik dan termanfaatkan (%)	3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Nilai)	3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Pelayanan Publik (poin)	3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3.31.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.31.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.31.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3.31.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.31.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.31.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.31.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.31.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.31.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.31.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.31.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.31.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.31.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.31.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.31.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.31.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.31.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.31.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.31.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.31.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.31.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.31.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.31.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.31.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.31.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.31.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.31.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.31.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.31.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.31.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.31.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.31.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	3.31.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	3.31.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.31.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.31.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.31.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.31.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	3.31.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.31.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program Kegiatan Serta Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah (Skor)	3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Kinerja pendapatan retribusi kewenangan perangkat daerah (OPD penghasil) (%)	3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	3.31.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3.31.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3.31.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.31.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.31.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.31.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.31.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.31.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.31.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3.31.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3.31.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	3.31.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Capaian kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	3.31.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.31.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.31.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.31.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.31.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.31.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.31.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	3.31.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Capaian kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.31.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.31.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.31.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.31.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.31.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Capaian kinerja Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	3.31.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	3.31.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
			Meningkatnya kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah				
3.31.3.30.0.00.02.0001 - UPTD Pasar Baru Merak							
- S.2.1 - Terwujudnya ekosistem dan ruang pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Terwujudnya pertumbuhan industri dan perdagangan daerah yang berdaya saing inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efesien, merata dan terintegritas		Tingkat kepuasan pengunjung pasar terhadap layanan sarana perdagangan (poin)	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				Capaian Kinerja Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk				
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk				
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
		Terwujudnya Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang Akuntabel dan Profesional	Meningkatnya kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase BMD dalam kondis baik dan termanfaatkan (%)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Nilai)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Pelayanan Publik (poin)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.30.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	3.30.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	3.30.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program Kegiatan Serta Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah				
3.31.3.30.0.00.02.0002 - UPTD Pasar Baru Cilegon							
- S.2.1 - Terwujudnya ekosistem dan ruang pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Terwujudnya pertumbuhan industri dan perdagangan daerah yang berdaya saing inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efesien, merata dan terintegritas		Tingkat kepuasan pengunjung pasar terhadap layanan sarana perdagangan (poin)	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				Capaian Kinerja Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk				
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk				
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk				
		Terwujudnya Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang Akuntabel dan Profesional	Meningkatnya kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase BMD dalam kondis baik dan termanfaatkan (%)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

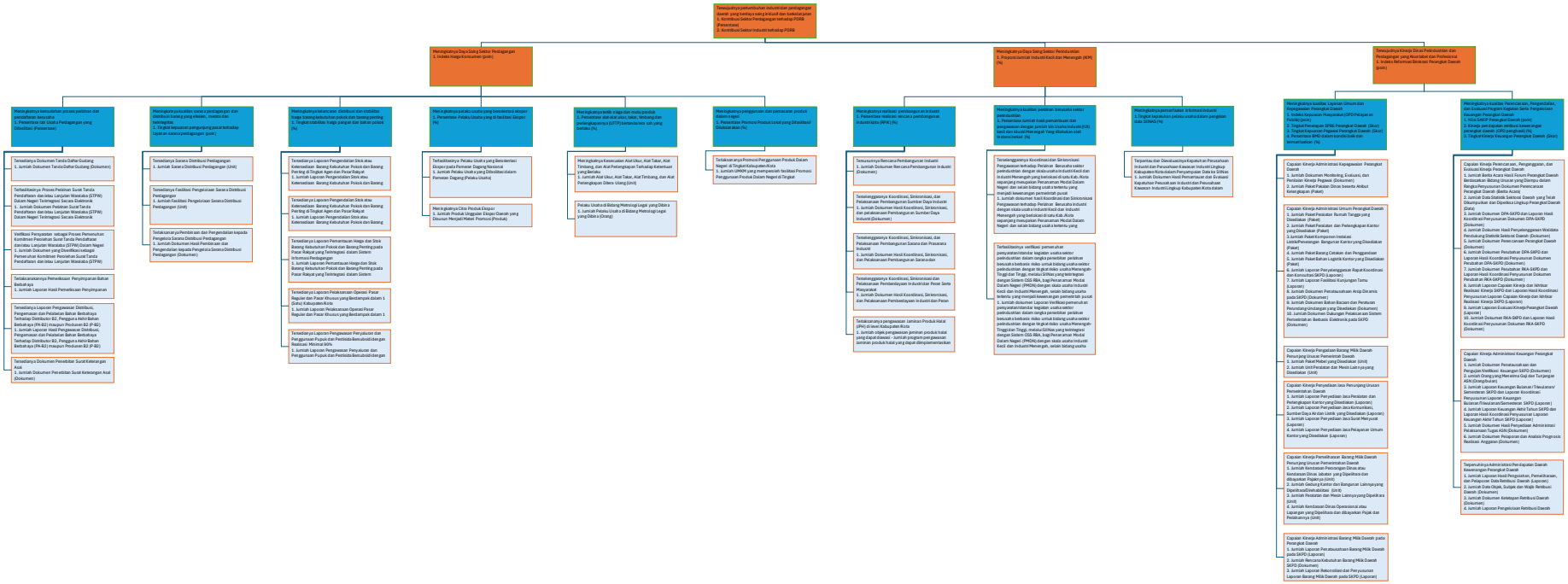
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Pelayanan Publik (poin)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Nilai)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.30.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah				
			Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program Kegiatan Serta Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
3.31.3.30.0.00.02.0003 - UPTD Pasar Blok F Cilegon							
- S.2.1 - Terwujudnya ekosistem dan ruang pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Terwujudnya pertumbuhan industri dan perdagangan daerah yang berdaya saing inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efesien, merata dan terintegritas		Tingkat kepuasan pengunjung pasar terhadap layanan sarana perdagangan (poin)	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				Capaian Kinerja Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk				
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk				
		Terwujudnya Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang Akuntabel dan Profesional	Meningkatnya kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase BMD dalam kondis baik dan termanfaatkan (%)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Nilai)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Pelayanan Publik (poin)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.30.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah				
			Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program Kegiatan Serta Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah				


Terwujudnya perlindungan industri dan perdagangan daerah yang berdaya saing tinggi dan berkeadilan
1. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase)
2. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB
Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan
1. Indeks Harga Konsumen (poin)
Meningkatnya Daya Saing Sektor Perindustrian
1. Pangsa Nilai Ekspor Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)
Terwujudnya Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang Akuntabel dan Profesional
1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (poin)
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran barang/jasa
1. Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Diterbitkan (Persentase)
Meningkatnya pelayanan sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi
1. Tingkat kepuasan pengunjung pasar terhadap layanan sarana perdagangan (poin)
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
1. Tingkat stabilitas harga pangan dan bahan pokok (%)
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor
1. Persentase Pelaku Usaha yang Ekspor (%)
Meningkatnya kreatifitas, inovasi dan kualitas produk
1. Persentase jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) berstandar sah yang berlaku (%)
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
1. Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Diakselerasi (%)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas industri (IKM)
1. Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)
Meningkatnya kualitas pelatihan berbasis sektor unggulan
1. Persentase lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi (%)
Meningkatnya pemanfaatan teknologi industri
1. Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)
Meningkatnya kualitas Laporan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik (poin)
2. Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Skor)
3. Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)
4. Persentase BMD dalam kondisi baik dan termanfaatkan (%)
Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program Kegiatan Serta Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)
2. Kinerja pemrograman anggaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah (OPD penghasil) (%)
3. Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah (Skor)
Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang
1. Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)
Terfasilitasinya Proses Penitipan Surat Tanda Pendaftaran Gudang Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik
1. Jumlah Dokumen Penitipan Surat Tanda Pendaftaran dan Izin Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik
Verifikasi Penyusatan sebagai Proses Penerusan Komitmen Penarikan Surat Tanda Pendaftaran dan Izin Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri
1. Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Penerusan Komitmen Penarikan Surat Tanda Pendaftaran dan Izin Lanjutan Waralaba (STPW)
Terlaksanakannya Pemeliharaan Penyimpanan Bahan Berbahaya
1. Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Penyimpanan
Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal
1. Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)
Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan
1. Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)
Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
1. Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
1. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)
Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
1. Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
1. Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
1. Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1
Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 80%
1. Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Komoditas Unggulan Daerah yang Diboikot dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)
1. Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)
Meningkatnya Citra Produk Ekspor
1. Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Dikenal Menjadi Materi Promosi (Produk)
Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku
1. Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Others Utang (Unit)
Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina
1. Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)
Tertaksanannya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
1. Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri
1. Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Pesan
1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembetayaan Industri dan Pesan
Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Industri
1. Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)
Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor pembudidaya dalam rangka pemerintah pusat Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang
1. Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang
Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor pembudidaya dalam rangka pemerintah pusat berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor pembudidaya dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SiPMas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha
1. Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor pembudidaya dalam rangka pemerintah pusat berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor pembudidaya dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SiPMas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha
Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten Kota dalam pengisian data SIINAS (%)
1. Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten Kota dalam
Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)
2. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)
Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. Jumlah Paket Penataan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)
2. Jumlah Paket Pelatihan dan Pertangkupan Kantor yang Disediakan (Paket)
3. Jumlah Paket Komputer Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)
4. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)
6. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)
7. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)
8. Jumlah Dokumen Perencanaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)
9. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)
10. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)
Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)
2. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lain yang Disediakan (Unit)
Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah
1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Pemeliharaan Kantor yang Disediakan (Laporan)
2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)
3. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)
4. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)
Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)
2. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dimelabilasi (Unit)
3. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)
4. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pemeliharanya (Unit)
Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)
2. Jumlah Rencana Kebutuhan an Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)
3. Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)
Capaian Kinerja Penerusan, Penggunaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)
2. Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Dipadukan Lingkup Perangkat Daerah (Data)
3. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)
4. Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)
5. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)
6. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)
7. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)
8. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)
9. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)
10. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Kasetile ad Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)
Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah Dokumen Perutacuah an dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)
2. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)
3. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)
4. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)
5. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)
6. Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)
Terpenuhinya Administrasi Perlengkapan Daerah
Meningkatnya Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
1. Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemutakhiran, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)
2. Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)
3. Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)
4. Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR : 800.5/Kep.203-ORG/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN 2025-2030

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Kota Cilegon 2025-2030, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2025-2030;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Cilegon, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2025-2030

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 807);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinetja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 123);
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 127);
14. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2025 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tahun 2025-2030, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama pada Lampiran I sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman untuk Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja Wali Kota.

KETIGA ...

KETIGA : Indikator Kinerja Utama pada Lampiran II sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan digunakan sebagai Pedoman untuk Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 10 September 2025
WALI KOTA CILEGON,

ROBINSAR

Tembusan :
1. Yth. Ketua DPRD Kota Cilegon
2. Yth. Inspektur Daerah Kota Cilegon
3. Yth. Kepala BPKPAD Kota Cilegon
4. Kepala Perangkat Daerah terkait

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR : 800.05/Kep.203-ORG/2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN 2025-2030.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN 2025-2030

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
T.1 - Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan inklusif		Indeks Pendidikan	Poin	Indeks Pendidikan = (IHLS + IRLS)/2 IHLS (Indeks Harapan Lama Sekolah) = (HLS - 0)/ (18-0) * batas maksimum HLS ditetapkan 18 tahun, setara pendidikan S1 IRLS (Indeks Rata-rata Lama Sekolah) = (RLS - 0)/ (15-0) * batas maksimum RLS ditetapkan 15 tahun, setara SMA

	S.1.1 - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan yang merata	Angka Partisipasi PAUD (%)	Persentase	Angka Partisipasi PAUD (%) = (Jumlah anak usia 3 - 6 tahun yang ikut PAUD / Jumlah anak usia 3 - 6 tahun) x 100%
		Angka Partisipasi Pendidikan Dasar (SD)	Persentase	Angka Partisipasi Pendidikan Dasar (%) = (Jumlah anak usia7 – 15 tahun yang sedang bersekolah / Jumlah anak usia 7 - 15 tahun) x 100%
		Angka Partisipasi SMP	Persentase	Angka partisipasi pendidikan keseteraan (%) = (jumlah peserta program keseteraan /jumlah populasi yang memenuhi syarat) x 100%
	S.1.2 - Terwujudnya generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)	Poin	IPP=0,20 × (Pendidikan + Kesehatan + Ketenagakerjaan + Partisipasi + Gender)
	S.1.3 - Meningkatnya budaya literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Poin	IPLM = (Skor_Ketersediaan x 0,25) + (Skor_Aksesibilitas x 0,25) + (Skor Kualitas x 0,25) + (Skor_Budaya_Baca x 0,25)
T.2 - Pertumbuhan ekonomi yang inklusif		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	Diukur berdasarkan pertambahan Produk Domestik Regional Bruto secara riil atau PDRB ADHK (menghilangkan faktor inflasi).

				Pertumbuhan Ekonomi (%) = (PDRB ADHK Tahun n – PDRB ADHK Tahun n-1 / PRDB ADHK Tahun n-1) × 100
	S.2.1 - Terwujudnya ekosistem dan ruang pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Pertumbuhan realisasi investasi	Persentase	Pertumbuhan Investasi (%) = (Realisasi Investasi Tahun n – Realisasi Tahun n-1) × 100
	S.2.2 - Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka		TPT (%) = (Jumlah Penganggur Terbuka / Jumlah Angkatan Kerja) x 100%
T.3 - Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	Perhitungan UHH menggunakan tabel hidup (life table) yang diukur oleh BPS setiap tahunnya.
	S.3.1 - Terwujudnya Layanan Kesehatan yang berkualitas, adil dan terjangkau	Indeks Pelayanan Publik di bidang pelayanan kesehatan (poin)	Poin	Setiap indikator dinilai dalam bentuk skor kuantitatif oleh responden (masyarakat pengguna layanan). IPP = (∑ni / n) x 100
	S.3.2 - Meningkatnya kualitas penerapan gaya hidup sehat masyarakat	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	Persentase	Rumus Perhitungan Persentase PHBS: Persentase PHBS (%) = (Jumlah rumah tangga yang menerapkan seluruh indikator PHBS / Jumlah seluruh rumah tangga yang di survei) x 100
T.4 - Terwujudnya birokrasi bersih,		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi

akuntabel dan berintegritas tinggi				kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	S.4.1 - Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	Persentase	Rasio Kemandirian Fiskal (%) = (Pendapatan Asli Daerah (PAD) / Total Pendapatan) x 100
	S.4.2 - Terwujudnya transformasi digital tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional	Indeks Pemerintahan Digital	Poin	Perhitungan Skor DGI = ∑(Nilai Subkomponen x Bobotnya) Total skor berada dalam rentang 0–100.
	S.4.3 - Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Sakip	Poin	Berdasarkan penilaian kemenpan-RB atas implementasi Sakip Pemerintah Daerah
	S.4.4 - Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan dan kolaborasi pemerintah daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Poin	Metode Penghitungan IKK 1. Dilakukan dengan self-assessment oleh instansi pemerintah. 2. Objek penilaian: kebijakan pembangunan strategis yang sudah diimplementasikan minimal 3 tahun terakhir. 3. Instrumen penilaian menggunakan kuisioner digital berbasis web (Sistem Informasi IKK – LAN). Skor dihitung dengan metode weighted

				scoring, lalu dikategorikan dalam predikat kualitas. Kategori Nilai IKK : 91,00 – 100 : Unggul 80,00 – 90,99 : Sangat Baik 65,00 – 79,99 : Baik 50,00 – 64,99 : Cukup < 50,00 : Kurang
T.5 - Terwujudnya kota layak huni dan berkelanjutan		Indeks Kota Layak Huni (livable city index)	Poin	Cara penghitungan : 1. Nilai per Indikator Setiap indikator diberi skor antara 0–100 berdasarkan capaian aktual dibandingkan standar. Standar ditetapkan dalam lampiran Permen berdasarkan tipe kota. 2. Hitung Nilai per Dimensi Skor Dimensi= (∑Skor indikator pada dimensi)/(Jumlah Indikator) 3. Hitung Indeks Kota Layak Huni IKLH = ∑_(i=1)^6▒ ⟦(Skor Dimensi "i × Bobot i" ⟧)
	S.5.1 - Terwujudnya infrastruktur layanan perkotaan yang inklusif, modern dan terintegrasi	Indeks Infrastruktur	Poin	Indeks Infrastruktur adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kualitas dan kinerja infrastruktur di suatu daerah. Indeks ini mencakup berbagai aspek infrastruktur,

				seperti: - Jaringan dan Jalan: Kondisi dan aksesibilitas jalan. - Angkutan Umum: Ketersediaan dan kualitas layanan transportasi publik. - Air Bersih: Akses terhadap air bersih yang layak konsumsi. - Sanitasi: Ketersediaan fasilitas sanitasi yang memadai. - Listrik: Akses terhadap pasokan listrik yang stabil. - Telekomunikasi: Ketersediaan dan kualitas layanan komunikasi dan internet. Pengukuran Indeks Infrastruktur dilakukan dengan menghitung rata-rata geometrik dari nilai indeks masing-masing komponen infrastruktur. Nilai indeks berkisar antara 0 hingga 100, di mana nilai mendekati 100 menunjukkan kondisi infrastruktur yang baik, sedangkan nilai mendekati 0 menunjukkan kondisi yang buruk.
	S.5.2 - Meningkatnya keselarasan ruang dan berkembangnya kawasan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase	PKPR (%) = (Luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR)/(Total luas pemanfaatan ruang eksisting) x 100%

	strategis daerah			RTR = Rencana tata ruang yang belaku (RTRW/RDTR)
	S.5.3 - Berkurangnya resiko bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Poin	Indeks Resiko Bencana (IRB) = Ancaman x Kerentanan / Kapasitas Kategori Nilai IRB (BNPB) - 0,00 – 0,25 : Risiko Rendah - 0,26 – 0,50 : Risiko Sedang - 0,51 – 1,00 : Risiko Tinggi
	S.5.4 - Meningkatnya kualitas daya dukung lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan	Poin	IKLH = (35% x IKA) + (35% x IKU) + (30% x ITL) keterangan : IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara ITL : Indeks Tutupan Lahan Nilai IKLH disajikan dalam skala 0–100, dengan interpretasi: - ≥ 80 : Baik (Lingkungan sangat mendukung kehidupan) - 60 – 79 : Sedang (lingkungan cukup mendukung) - < 60 : Buruk (Lingkungan tidak mendukung secara optimal)
	S.5.5 - Meningkatnya keamanan dan kondusivitas daerah	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di	Persentase	Proporsi Rasa Aman= (Jumlah penduduk usia > 15 tahun yang merasa aman berjalan sendirian /

		Area Tempat Tinggalnya		jumlah total penduduk usia > 15 tahun) x 100%
	S.5.6 - Terwujudnya pemerataan pembangunan potensi kewilayahan	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang	Persentase	Presentase Kelurahan Cepat Berkembang (%) = (Jumlah kelurahan atau desa kategori "Cepat Berkembang") / (Total kelurahan atau desa) x 100%
T.6 - Pemerataan kesejahteraan masyarakat		Tingkat Kemiskinan	Persentase	Tingkat kemiskinan = Jumlah penduduk miskin / Jumlah penduduk x 100% Ket : Penduduk miskin : penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan Jumlah penduduk : seluruh penduduk di Kota Cilegon pada periode tertentu Garis Kemiskinan (GK) : nilai pengeluaran minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (setara 2100 kkal/kapita/hari) dan kebutuhan dasar non-makanan
	S.6.1 - Meningkatnya perlindungan sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	Indikator ini diukur dari 3 dimensi yaitu : 1)dimensi kebutuhan dasar (bobot 27%) yang meliputi pangan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan 2)dimensi peranan sosial (bobot 31%)

				yang meliputi partisipasi, kohesi sosial dan kelembagaan inklusi 3)dimensi keberdayaan ekonomi (bobot 41%) yang meliputi partisipasi dalam aktifitas ekonomi, utilitas/daya guna, ketahanan ekonomi.
	S.6.2 - Meningkatnya Daya Beli dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Daya Beli Masyarakat	Ribu Rupiah per Kapita/ Tahun	Diukur oleh BPS sebagai indikator pembentuk indeks pembangunan manusia (IPM)
	S.6.3 - Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	Setiap dimensi terdiri dari beberapa indikator yang diukur berdasarkan data dari Formulir Pendataan Keluarga (PK). Penghitungan iBangga dilakukan dengan memberikan skor 1 untuk variabel yang terpenuhi dan 0 untuk yang tidak, kemudian dihitung rata-rata skor per dimensi dan dikonversi menjadi nilai indeks antara 0 hingga 100. Kategori Nilai iBangga : - Kurang Baik (Rentan): Nilai iBangga < 40 - Cukup Baik (Berkembang): Nilai iBangga 40–70 - Baik (Tangguh): Nilai iBangga > 70

25. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya pertumbuhan industri dan perdagangan daerah yang berdaya saing inklusif dan berkelanjutan		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	(PDRB Sektor Perdagangan/ Total PDRB) x 100% PDRB Sektor Perdagangan: Perdagangan Besar dan Eceran
		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	(PDRB Sektor industri/Total PDRB) x 100% PDRB Sektor rindustri: Industri Pengolahan
	Terwujudnya Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Point	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam

	Akuntabel dan Profesional			menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Indeks Harga Konsumen (IHK)	Angka	Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Desember Tahun N (*Hasil Publish BPS*)
	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perindustrian	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%	((Jumlah IKM tahun N- Jumlah IKM tahun N-1)/ Jumlah IKM tahun N-1) x 100%

28. KECAMATAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya Pelayanan Berkualitas dan Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Kecamatan		Skor Penilaian Kecamatan		Skor Kecamatan = $\sum(Bobot_i \times Nilai_i) / \sum Bobot_i$ dengan keterangan: $Nilai_i$ = skor capaian indikator ke-i (skala bisa 0–100) $Bobot_i$ = bobot kepentingan indikator ke-i (jumlah total bobot = 100%) Range nilai : 91 - 100 -- Unggul 80 - 90,99 -- Sangat Baik 65 - 79,99 -- Baik 50,00 - 64,99 -- Cukup <50,00 – Kurang

	Terwujudnya Kinerja Kecamatan Jombang yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Terwujudnya Kualitas Pembangunan Kecamatan yang Berkelanjutan	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang	Persen	Rumus : (X/Y)*100% X = Jumlah Kelurahan Cepat Berkembang di Wilayah Kecamatan Y = Jumlah Kelurahan yang Ada di Wilayah Kecamatan

WALI KOTA CILEGON,

ROBINSAR